



# PEMBINAAN DISIPLIN DI LINGKUNGAN MASYARAKAT KOTAMADYA MEDAN



Direktorat  
Kebudayaan

2

DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

711.12  
ZUR  
P

MILIK DEPDIBUD

TIDAK DIPERDAGANGKAN

# PEMBINAAN DISIPLIN DI LINGKUNGAN MASYARAKAT KOTAMADYA MEDAN

## TIM PENULIS / PENELITI

Drs. Darmono M. Ed : Konsultan  
Dra. Zuraida Tanjung : Ketua  
Drs. Ahmad Husin Ritonga : Anggota  
Drs. Zulkifli Lubis : Anggota  
Drs. Wilson Siagian : Anggota  
Drs. Amir S. Nadapdap : Anggota

**Editor : Drs. M. Juramadi Esram**

Departemen Pendidikan dan Kebudayaan  
Direktorat Jenderal Kebudayaan  
Direktorat Sejarah dan Nilai Tradisional  
Proyek Penelitian Pengkajian dan Pembinaan  
Nilai - Nilai Budaya (P3NB)  
1993 / 1994

## **PRAKATA**

Perkembangan dan pertumbuhan Kotamadya Medan yang cukup pesat pada gilirannya menimbulkan dinamika dan perubahan di berbagai bidang kehidupan. Pertambahan penduduk yang besar akan berpengaruh terhadap kualitas dan perilaku warga masyarakat dalam mematuhi disiplin dan peraturan yang berlaku.

Pembangunan yang sedang dilaksanakan selain memiliki manfaat yang besar, dapat pula menimbulkan akses negatif terutama menyangkut keamanan dan kedisiplinan masyarakat.

Sesuai dengan TOR yang di keluarkan oleh Direktorat Jenderal Kebudayaan, Direktorat Sejarah dan Nilai Tradisional Proyek Penelitian Pengkajian dan Pembinaan Nilai-Nilai Budaya tahun 1992/1993, salah satu aspeknya adalah Pembinaan Disiplin di Lingkungan Masyarakat Kota. Untuk ini Tim Daerah Sumatera Utara mengambil lokasi di Kotamadya Medan, tepatnya Kelurahan Tegalsari III Kecamatan Medan Area sebagai lingkungan tempat pemukiman dan Kelurahan Pusat Pasar Kecamatan Medan Kota sebagai lingkungan tempat-tempat umum.

Tujuan penelitian ini adalah untuk memperoleh gambaran dan mengungkapkan berbagai hal yang menyangkut kedisiplinan masyarakat. Pemilihan kedua kelurahan ini dianggap memenuhi kriteria yang ditetapkan sesuai dengan kondisi fisik dan jumlah penduduk yang relatif padat dan heterogen.

Dalam penelitian ini Tim Daerah mengalami hambatan-hambatan, antara lain kurangnya data-data yang tersedia sesuai dengan permasalahan. Akan tetapi berkat kerjasama yang baik dari semua pihak, hambatan tersebut dapat diatasi.

Medan, Februari 1993

Ketua Tim,

dto

Dra. Zuraida Tanjung

NIP. 130251331

## KATA PENGANTAR

Tujuan Bagian Proyek Penelitian, Pengkajian dan Pembinaan Nilai-Nilai Budaya Sumatera Utara untuk menggali nilai-nilai luhur budaya daerah dalam rangka memperkuat penghayatan dan pengamalan Pancasila demi terwujudnya Ketahanan Nasional di bidang sosial budaya. Dalam perwujudan itu maka Bagian Proyek Penelitian, Pengkajian dan Pembinaan Nilai-Nilai Budaya Sumatera Utara dalam tahun anggaran 1993/1994 berkesempatan untuk memperbanyak/mencetak naskah hasil perekaman/penelitian yaitu:

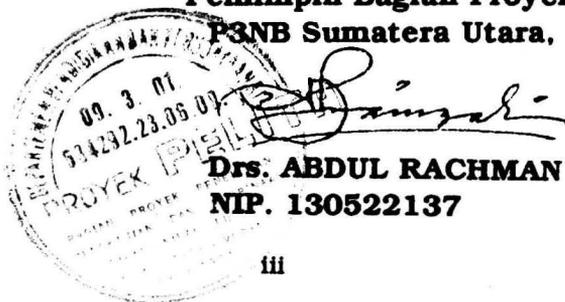
### **"PEMBINAAN DISIPLIN DI LINGKUNGAN MASYARAKAT: KOTA MADYA MEDAN".**

Naskah ini diperbanyak/dicetak berdasarkan hasil penelitian oleh suatu Tim dengan penuh kesungguhan. Namun demikian disadari bahwa hasil penelitian yang digandakan ini masih terasa belum mencapai kesempurnaan. Kritik dan saran dari berbagai pihak yang bersifat konstruktif sangat kami harapkan, sebagai acuan bagi penyempurnaan pada penelitian selanjutnya.

Terwujudnya upaya ini adalah berkat adanya kepercayaan dari Bapak Direktur Sejarah dan Nilai Tradisional Ditjen Kebudayaan dan dorongan dari Bapak Kepala Kantor Wilayah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Propinsi Sumatera Utara, serta kerjasama yang baik dari berbagai pihak.

Akhirnya semoga upaya penerbitan naskah ini bermanfaat bagi pelestarian nilai-nilai luhur budaya bangsa dalam rangka memperkuat jati diri bangsa guna menunjang pembangunan manusia seutuhnya.

**Medan, Oktober 1993**  
**Pemimpin Bagian Proyek**  
**P3NB Sumatera Utara,**





**SAMBUTAN KEPALA KANTOR WILAYAH  
DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN  
PROPINSI SUMATERA UTARA**

Kita bersyukur kepada Tuhan yang Maha Esa, dengan rahmatnya Kantor Wilayah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Propinsi Sumatera Utara melalui bagian Proyek Penelitian, Pengkajian dan Pembinaan Nilai-Nilai Budaya Sumatera Utara tahun anggaran 1993/1994 dapat mencetak buku ini.

Begitu pentingnya pembinaan disiplin di kalangan masyarakat, sehingga terungkap pula dalam Garis-Garis Besar Haluan Negara (GBHN). Menurut GBHN Pembinaan Disiplin Nasional diarahkan untuk memperbaiki kesetiakawanan Nasional, menanamkan sikap tenggang rasa hemat dan prasojo, bekerja keras, cermat, tertib, penuh rasa pengabdian, jujur dan mandiri.

Karena amanat inilah hasil penelitian tentang "**PEMBINAAN DISIPLIN DI LINGKUNGAN MASYARAKAT KOTAMADYA MEDAN**" perlu diterbitkan.

Pencetakan buku ini dimaksudkan agar Tingkat Disiplin Masyarakat Kota dikenal lebih dalam secara meluas baik di kalangan masyarakat Sumatera Utara sendiri maupun di kalangan masyarakat Indonesia.

Sudah barang tentu buku ini belum sepenuhnya sempurna; walaupun demikian diharapkan dapat membantu para pembaca lebih menghayati nilai-nilai yang terkandung di dalamnya.

Kepada semua pihak yang telah membantu usaha ini kami menyampaikan penghargaan dan terima kasih.

Medan, Oktober 1993

**KEPALA KANTOR WILAYAH DEPDIKBUD  
PROPINSI SUMATERA UTARA**



**CHAINUR ARRASYID, SH**

**NIP 130231549**

## DAFTAR ISI

PRAKATA .....	I
KATA PENGANTAR .....	III
KATA SAMBUTAN .....	V
DAFTAR ISI .....	VII
DAFTAR PETA .....	IX
DAFTAR TABEL .....	XI
DAFTAR GAMBAR .....	XIII
BAB I. PENDAHULUAN .....	1
1.1 Latar Belakang .....	1
1.2 Masalah .....	2
1.3 Tujuan .....	3
1.4 Ruang Lingkup .....	4
1.5 Metodologi .....	4
BAB II. GAMBARAN UMUM DAERAH PENELITIAN ....	7
2.1 Kotamadya Medan .....	7
2.2 Daerah Penelitian .....	24
2.2.1 Kelurahan Tegalsari III Kecamatan Medan Area .....	24
2.2.2 Kelurahan Pusat Pasar Kecamatan medan Kota .....	31
2.3. Berbagai Permasalahan Kotamadya Medan .....	35

BAB	III. DISIPLIN MASYARAKAT DI LINGKUNGAN PERMUKIMAN KELURAHAN TEGALSARI III....	55
	3.1 Disiplin dalam Penanganan Limbah Keluarga /Sampah .....	56
	3.2 Disiplin dalam Partisipasi Masyarakat Terhadap Kegiatan Sosial .....	64
	3.3 Disiplin terhadap Administrasi Pemerintah .....	70
	3.4 Disiplin dalam Hubungan Ketetanggaan .....	74
BAB	IV. DISIPLIN MASYARAKAT DI LINGKUNGAN TEMPAT-TEMPAT UMUM DI KOTAMADYA MEDAN ..	83
	4.1 Disiplin di Lingkungan Pasar / Pertokoan ...	83
	4.2 Disiplin di Lingkungan Terminal .....	93
	4.3 Disiplin di Tempat Hiburan .....	98
	4.4 Disiplin di Jalan Raya .....	102
BAB	V. UPAYA PEMBINAAN DISIPLIN PADA MASYARAKA KOTA .....	115
	5.1 Pembinaan Oleh Pemerintah .....	115
	5.2 Pembinaan Oleh Tokoh Masyarakat .....	117
BAB	VI. KESIMPULAN DAN SARAN .....	119
	6.1 Kesimpulan .....	119
	6.2 Saran-saran .....	121
	DAFTAR PUSTAKA .....	123
	DAFTAR INFORMAN .....	125

## **DAFTAR PETA**

Nomor Peta	Halaman
1. Kotamadya Medan .....	49
2. Kecamatan Medan Area .....	50
3. Kecamatan Medan Kota .....	51
4. Kelurahan Tegalsari III .....	52
5. Kelurahan Pusat Pasar .....	53

## DAFTAR TABEL

Nomor Tabel	halama
1. Curah hujan dan banyaknya hujan di Kodya Medan, 1990 .....	39
2. Jumlah pasar menurut kecamatan di Kodya Medan tahun 1990 .....	40
3. Luas, jumlah desa dan rumah tangga, jumlah penduduk dan kepadatan per kecamatan di Kodya Medan tahun 1990 .....	41
4. Jumlah penduduk menurut jenis kelamin per kecamatan di Kodya Medan tahun 1990 .....	42
5. Jumlah penduduk menurut kelompok umur per kecamatan di Kodya Medan tahun 1990 .....	43
6. Luas wilayah Kelurahan Tegalsari III berdasarkan lingkungan tahun 1991 .....	44
7. Jumlah penduduk per lingkungan di kelurahan Tegalsari III .....	45
8. Jumlah penduduk menurut kelompok umur per lingkungan di Kelurahan Tegalsari III tahun 1991 .....	46
9. Komposisi mata pencaharian penduduk Kelurahan Tegalsari III Tahun 1991 .....	47
10. Komposisi penduduk Kelurahan Pusat Pasar menurut kelompok umur tahun 1991 .....	48
11. Jumlah pasar dan klasifikasinya di Kodya Medan tahun 1992 .....	106

## DAFTAR GAMBAR

Nomor Gambar	Halaman
1. Pembuangan sampah yang sembarang di sekitar pekarangan yang kosong . . . . .	76
2. Suasana jalan yang berlumpur serta bak sampah yang berubah fungsi menjadi tempat jemuran . . . . .	76
3. Selokan yang sering menjadi tempat pembuangan sampah sehingga pada musim hujan sering tersumbat . . . . .	77
4. Tempat pembuangan sampah yang sembarangan di Kelurahan Tegalsari III . . . . .	78
5. Sisi jalan yang dimanfaatkan tempat pembuangan sampah di Lingkungan II . . . . .	78
6. Tempat pembuangan sampah sementara (TPS) di sudut jalan yang sering mengganggu arus lalu lintas . . . . .	79
7. Petugas kebersihan menarik gerobak sampah ke TPS di Lingkungan III . . . . .	79
8. Ruas jalan yang menjadi lokasi TPS dan pedagang kaki lima . . . . .	80
9. Aliran Parit Busuk yang membelah kawasan Kelurahan Tegalsari III . . . . .	81
10. Plakat dan organisasi kemasyarakatan yang terdapat di Kelurahan Tegalsari III . . . . .	82
11. Salah satu organisasi kemasyarakatan yang terdapat di Kelurahan Tegalsari III . . . . .	82
12. Kubangan lumpur di salah satu pintu masuk Pusat Pasar Medan . . . . .	107
13. Tempat atau lubang corong pembuangan sampah di Pusat Pasar . . . . .	108

Nomor Gambar	Halaman
14. Keadaan lokasi tempat pembuangan sampah sementara di Pusat Pasar . . . . .	109
15. Keranjang yang menumpuk sebagai sampah pedagang di Pusat Pasar . . . . .	109
16. Terminal Sambu yang dimanfaatkan pedagang kaki lima sebagai tempat berjualan . . . . .	110
17. Container sebagai tempat pembuangan sampah sementara di Pusat Pasar . . . . .	110
18. Sampah yang berserakan di sekitar pintu masuk terminal . . . . .	111
19. Keadaan taman Pusat Pasar Medan yang dijadikan tempat pembuangan sampah . . . . .	111
20. Keadaan Terminal Sambu pada musim hujan yang tergenang dan benampung . . . . .	112
21. Pedagang kaki lima yang menggelar dagangannya di pintu masuk Pusat Pasar . . . . .	112
22. Kics banyak yang terbengkalai dan kosong karena ditinggalkan pedagang . . . . .	113
23. Pajak ikan di Pusat Pasar yang setiap hari tergenang dan berlumpur . . . . .	113
24. Trotoar yang digunakan pedagang kaki lima sebagai tempat berjualan . . . . .	114
25. Terminal Sambu yang setiap harinya dipadati bus angkutan kota . . . . .	114

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang**

Sebagai makhluk sosial manusia senantiasa hidup berkelompok. Melalui kerjasama hidup berkelompok itulah manusia dapat memenuhi kebutuhan hidupnya. Betapapun ukuran dari pengelompokan sosial tersebut diperlukan pula sebuah organisasi sosial sebagai wadah pemer-satunya. Dalam kaitan ini ada empat hal utama yang terdapat di dalam sebuah pengelompokan masyarakat, yaitu pemilahan sosial, sarana penghubung, kaidah-kaidah sosial dan pengendalian sosial (Budhisantoso, 1990).

Kota sebagai satuan wilayah pemukiman pada hakekatnya merupakan salah satu tempat di mana manusia mengadakan pengelompokan sosial, yang biasanya ditandai dengan tingginya pertumbuhan penduduk dan heterogenitas masyarakat. Pertambahan penduduk di kota sangat dipengaruhi oleh derasnya arus urbanisasi dari daerah belakang dan sekitarnya yang berlangsung secara kontinyu. Adapun faktor yang mempengaruhi urbanisasi tersebut antara lain adalah banyaknya fasili-

kehidupan yang ada di kota.

Pertambahan penduduk yang tinggi serta kurangnya prasarana dan sarana kehidupan menyebabkan timbulnya berbagai permasalahan di perkotaan. Beberapa permasalahan yang teridentifikasi di kota besar yang ada di Indonesia antara lain masalah pencemaran lingkungan sebagai akibat pengelolaan limbah yang kurang benar, masalah pemukiman yang kurang memenuhi persyaratan hidup dan berbagai masalah sosial kemasyarakatan seperti kriminalitas dan masalah tuna susila.

Ketatnya persaingan masyarakat untuk mendapatkan prasarana dan sarana kehidupan, tidak jarang seseorang kurang memperhatikan orang lain untuk memenuhi kebutuhan pribadinya. Selain dari pada itu, kurangnya pemahaman sejumlah warga kota terhadap lingkungan tempat tinggal mereka juga mempunyai andil cukup besar terhadap munculnya berbagai permasalahan di perkotaan. Kenyataan ini ditambah lagi masih adanya warga yang bersikap dan berperilaku seperti di daerah asalnya. Di samping itu, tingkat kedisiplinan warga kota dalam mentaati segala peraturan dan kaidah-kaidah yang berlaku dapat pula menimbulkan permasalahan di perkotaan. Oleh karena itu untuk menjaga ketertiban dalam hidup bermasyarakat perlu adanya pembinaan disiplin terhadap warga masyarakat yang bersangkutan.

Pentingnya pembinaan disiplin di kalangan masyarakat terungkap pula dalam Garis-Garis Besar Haluan Negara (GBHN). Dalam GBHN disebutkan bahwa Pembinaan Disiplin Nasional diarahkan untuk memperbaiki kesetiakawanan nasional, menanamkan sikap tenggang rasa, hemat, prasojo, bekerja keras, cermat, tertib, penuh rasa pengabdian, jujur dan mandiri, karena amanat inilah penelitian tentang pembinaan disiplin di lingkungan masyarakat dilakukan.

## **1.2 Masalah**

Dalam kehidupan sehari-hari timbul berbagai permasalahan di perkotaan. Perpaduan antara kurang memadainya prasarana dan sarana

kehidupan, dengan kurangnya pemahaman warga kota terhadap tata aturan dan kaidah-kaidah sosial yang berlaku di perkotaan, diduga menyebabkan timbulnya ketidak-disiplinan warga masyarakatnya. Sehubungan dengan hal itu, pokok-pokok permasalahan dalam penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut :

1. Sejauh mana tingkat disiplin warga masyarakat di lingkungan perkotaan, khususnya di Kotamadya Medan.
2. Aturan dan kaidah-kaidah sosial apa saja yang berlaku di lingkungan masyarakat perkotaan.
3. Upaya-upaya apa saja yang dilakukan dalam rangka pembinaan disiplin pada masyarakat perkotaan, dalam hal ini masyarakat Medan.

### **1.3. Tujuan**

Sesuai dengan permasalahan di atas penelitian ini bertujuan mengungkap dan mendeskripsikan tingkat disiplin warga masyarakat di daerah perkotaan, salah satu diantaranya yang dijadikan sebagai lokasi penelitian ini ialah kota Medan, ibukota Propinsi Sumatera Utara. Sebagai acuan sampai sejauh mana tingkat disiplin warga masyarakat, dalam kajian ini akan diungkapkan pula aturan-aturan dan kaidah-kaidah yang berlaku di kalangan masyarakat Medan. Upaya pembinaan disiplin yang telah dilakukan oleh pihak-pihak terkait dalam masalah ini dapat digunakan untuk mengetahui sejauh mana warga masyarakat telah mematuhi berbagai aturan dan kaidah-kaidah sosial yang berlaku.

Data dan informasi tentang disiplin di lingkungan kota sangat penting artinya bagi perumusan kebijaksanaan-kebijaksanaan yang akan diambil terhadap warga di daerah perkotaan. Hal ini menjadi penting mengingat semakin kompleksnya permasalahan-permasalahan yang muncul di daerah perkotaan sejalan dengan perkembangan kota itu sendiri. Asumsi dalam penelitian ini adalah : semakin padat penduduk suatu lingkungan pemukiman, semakin rendah tingkat disiplin warga masyarakatnya.

## **1.4 Ruang Lingkup**

Penelitian tentang Pembinaan Disiplin di Lingkungan Masyarakat Kotamadya Medan akan dilakukan pada dua lokasi pemukiman, yaitu Kelurahan Tegal Sari III Kecamatan Medan Area dan tempat-tempat umum yang terdapat di kelurahan pusat Pasar Kecamatan Medan Kota. Melalui data dan informasi yang terkumpul di lokasi tersebut, diharapkan dapat diketahui dan diungkap berbagai permasalahan kedisiplinan yang terdapat di Kotamadya Medan. Kedua lokasi tersebut merupakan daerah pusat kota yang di dalamnya terdapat berbagai permasalahan yang disebabkan kurangnya disiplin warga masyarakat. Yang dimaksud dengan tempat-tempat umum dalam penelitian ini adalah lingkungan pusat perbelanjaan (pasar dan pertokoan), lingkungan terminal, lingkungan tempat hiburan dan lingkungan jalan raya.

Adapun data dan informasi yang diungkapkan di lingkungan pemukiman antara lain; disiplin warga masyarakat terhadap penanganan limbah keluarga, kebersihan lingkungan, partisipasi warga masyarakat terhadap kegiatan sosial, administrasi pemerintahan dan hubungan ketetanggaan. Sedangkan data dan informasi yang diungkapkan pada lingkungan tempat-tempat umum adalah disiplin terhadap: kebersihan, aturan-aturan dalam pelayanan, aturan-aturan di tempat umum dan disiplin terhadap peraturan-peraturan formal.

## **1.5 Metodologi**

Dalam penelitian ini, sampel di lingkungan pemukiman dan tempat-tempat umum dipilih berdasarkan kriteria kepadatan dan tingkat mobilitas penduduk. Pengumpulan data dan informasi dilakukan dengan cara studi kepustakaan, wawancara dan pengamatan. Bahkan untuk menambah masukan data dan informasi, tim peneliti juga menjalankan teknik kuesioner. Kuesioner dilakukan terhadap sejumlah penduduk yang tinggal di daerah pemukiman dan sejumlah responden yang berstatus sebagai

pedagang, petugas pasar, supir dan sejumlah penonton yang memanfaatkan fasilitas hiburan. Melalui studi kepustakaan dihasilkan sejumlah data dan informasi sekunder yang mengungkapkan lokasi penelitian, kependudukan dan berbagai kasus pelanggaran disiplin, antara lain melalui pemberitaan di media massa terbitan Medan, kantor-kantor pemerintah seperti Bappeda Tk. II Kodya Medan, Kantor Camat dan kantor Lurah di lokasi penelitian.

Wawancara dilakukan secara mendalam (*dept interview*) dengan menggunakan pedoman wawancara. Selain itu dilakukan pula wawancara secara sepintas terhadap informan tertentu yang dijumpai di lokasi penelitian. di samping itu tim peneliti juga melakukan pengamatan atau observasi untuk dapat melihat secara langsung sejumlah gejala sosial yang menjadi sasaran atau fokus pengamatan di dua lokasi tersebut. Melalui pengamatan diharapkan dapat terungkap keselarasan hasil wawancara dengan keadaan sebenarnya yang terjadi dalam kehidupan masyarakat. Sedangkan pengetahuan tentang kaidah-kaidah dan aturan-aturan sosial yang berlaku dalam masyarakat, dijadikan sebagai acuan untuk mengukur tingkat kedisiplinan warga masyarakat pada lokasi penelitian.

Responden dipilih melalui *purposive sampling* karena cara ini dianggap lebih akurat untuk mendapatkan data-data yang diperlukan. Walaupun menggunakan kuesioner, teknik pengumpulan data tetap dilakukan dengan metode kualitatif. Dalam hal ini data-data yang didapat melalui kuesioner dijadikan sebagai pendukung dan sekaligus pembanding data-data yang diperoleh melalui wawancara mendalam.

Untuk mencapai tujuan penelitian, yaitu mengungkap dan mendeskripsikan tingkat disiplin warga masyarakat di beberapa daerah perkotaan di Indonesia, telah ditempuh prosedur-prosedur metodologis seperti dikemukakan pada bagian terdahulu. Khusus untuk lokasi lingkungan pemukiman, selain melakukan pengamatan, wawancara mendalam dan wawancara sepintas, juga dilakukan wawancara dengan menggunakan kuesioner terhadap 100 responden terpilih melalui teknik

random sampling. Dari data yang diperoleh tersebut diperbandingkan satu sama lain untuk mendapatkan gambaran yang lebih mendekati kebenaran. Selanjutnya data dan informasi yang diperoleh dianalisis secara kualitatif.

## **BAB II**

### **GAMBARAN UMUM DAERAH PENELITIAN**

#### **2.1. Kotamadya Medan**

##### **2. 1.1. Lokasi dan Luas**

Kotamadya Medan merupakan ibukota Propinsi Sumatera Utara. Kota tersebut merupakan kota terbesar di Propinsi Sumatera Utara terletak pada  $03^{\circ} - 32' - 03^{\circ} 48'$  Lintang Utara dan  $98^{\circ} 39' - 98^{\circ} 47'$  Bujur Timur (Kantor Statistik Kodya Medan, 1990). Adapun kota-kota yang berbatasan langsung dengan Kodya Medan adalah : Labuhan Deli, Hampan Perak dan Sunggal di sebelah Barat; Pancur Batu, Delitua dan Patumbak di sebelah Selatan; Tanjung Morawa, Percut Sei Tuan dan Labuhan Deli di sebelah Timur; dan Selat Sumatera di sebelah Utara (peta 1)

Luas wilayah Kodya Medan  $265 \text{ km}^2$ , yang secara administratif terbagi menjadi 11 wilayah kecamatan. Sejak tahun 1991, sesuai PP. No 50/1991, Kotamadya Medan dimekarkan menjadi 19 kecamatan dan pada tahun 1992 dimekarkan lagi menjadi 21 kecamatan sesuai dengan

PP. No 35 Tahun 1992. Namun demikian luas wilayahnya tetap, hanya beberapa kecamatan dipecah untuk lebih meningkatkan koordinasi pemerintah dan pembangunan di Kotamadya Medan yang semakin kompleks dalam rangka menuju kota metropolitan. Dalam penulisan ini, penyusun masih mengacu kepada data tahun 1990 (sebelum dimekarkan) yang terdiri dari 11 kecamatan.

Sebagai kota besar, kodya Medan memiliki berbagai jenis jalan, seperti jalan arteri, jalan radial, jalan lingkungan dan jalan kolektor. Jalan arteri (protokol) berfungsi menghubungkan pusat kota dengan pelabuhan, kota satelit dan daerah belakang. Jalan ini meliputi Jalan Sisingamangaraja, Jenderal Gatot Subroto, Komodor Laut Yos Sudarso, Prof M. Yamin, SH dan Jalan Kapten Tendean (sekarang Jalan Letjend. Jamin Ginting). Sedangkan jalan radial terbagi dua, yaitu jalan radial utama dan non utama. Jalan radial utama meliputi : jalan menuju Binjai, Belawan, Tanjung Morawa dan Pancurbatu. Adapun jalan non utama (kedua) adalah jalan menuju Percut, Batangkuis dan Delitua.

Jalan kolektor (jalan antar lingkungan) berfungsi sebagai penghubung antar jalan protokol serta antara jalan protokol dengan jalan lingkungan. Berdasarkan polanya jalan kolektor adalah jalan lingkaran meliputi : Jalan Pattimura, Gaperta, Cemara, Seksama dan Jalan Zainul Arifin. Sedangkan jalan lingkungan (jalan lokal) merupakan jalan yang terdapat di suatu kompleks atau lingkungan serta di daerah perumahan seperti di Perumnas Mandala, Helvetia dan Simalingkar.

Dengan demikian jalan yang terdapat di Kodya Medan merupakan gabungan antara jalan radial dan jalan lingkaran. Jalan radial berfungsi menampung arus lalu lintas dari luar kota menuju pusat kota atau sebaliknya, Akan tetapi dalam kenyataannya, fungsi ini sering tumpang tindih dengan jalan lingkaran dan jalan lokal yang dapat menimbulkan kemacetan lalu lintas. Oleh karena itu untuk mengatasi kemacetan lalu lintas terutama pada jalan radial yang menuju pusat kota, sejak tahun 1982 dibangun jalan bebas hambatan (jalan tol) Belmera (Belawan - Medan- Tanjung Morawa) sepanjang 34 km.

### **2.1.2 Keadaan Alam**

Letak geografis Kotamadya Medan memanjang dari Utara ke Selatan. Sebagian besar wilayahnya merupakan dataran rendah. Bagian Barat dan Selatan merupakan daerah berbukit dengan ketinggian sekitar 25 meter di atas permukaan laut. Rata-rata ketinggian Kotamadya Medan adalah berkisar 3 - 27 meter di atas permukaan laut.

Kotamadya Medan dilewati beberapa sungai, yaitu sungai Belawan di bagian Barat, sungai Deli di bagian Tengah dan sungai Percut di bagian Timur. Selain ketiga sungai tersebut, di kota Medan juga terdapat sungai-sungai kecil yang merupakan anak-anak sungai seperti sungai Babura, sungai Sikaming, sungai Putih dan sungai Kera.

Curah hujan di Kodya Medan termasuk tinggi (rata-rata berkisar antara 2000 - 2500 mm per-tahun), terutama pada bulan September sampai Desember (Tabel II.1). Pada musim hujan wilayah Kodya Medan sering mengalami banjir. Hal ini antara lain disebabkan menyempitnya alur sungai akibat proses sedimentasi.

Suhu udara maksimum  $32^{\circ}$  C dan suhu minimum sekitar  $22^{\circ}$  C. Suhu udara yang dicatat pada stasiun Polonia tahun 1990 pada pagi hari adalah  $23,9^{\circ}$  C dan pada siang hari  $30,8^{\circ}$  C serta pada malam hari  $29^{\circ}$  C. Sedangkan kelembaban udara berkisar antara 82-84. Penyinaran matahari rata-rata 14 % dengan lama penyinaran setiap bulannya adalah 155,8 jam, sebagaimana yang tercatat pada Stasiun Sampali. Sedangkan data yang terdapat pada Stasiun Polonia menunjukkan pada tahun 1990, rata-rata penyinaran setiap bulannya 43 % dengan lama penyinaran setiap bulan berkisar 119,2 jam.

### **2.1.3 Keadaan Fisik**

Gambaran umum tentang kondisi fisik Kotamadya Medan mencakup jaringan jalan, penerangan, air bersih, sarana kebersihan dan pembuangan

air limbah.

### **2.1.3.1 Jaringan Jalan**

Prasarana jalan di Kodya Medan saat ini keadaannya cukup baik, dan apabila pembangunan MUTP (Medan Urban Transportation Proyek) selesai tahun 1995 jaringan jalan akan lebih baik lagi. Dari data yang diperoleh tahun 1990 pada Kantor Statistik Kodya Medan, panjang jalan di Kodya Medan menurut permukaannya adalah 1.338,35 km. Jalan aspal sepanjang 1.164,27 km, jalan kerikil 2.360 km, jalan tanah 144,19 km dan jalan lainnya 6,29 km. Bila dirinci menurut kelas jalan, panjang jalan di Kodya Medan adalah : jalan kelas I sepanjang 17,07 km, kelas II sepanjang 54,62 km, kelas III sepanjang 405,83 km, kelas IV sepanjang 587,7 km, kelas V sepanjang 18,08 km dan jalan lainnya sepanjang 256,12 km. Sedangkan menurut kondisi jalannya, panjang jalan dibagi atas : kondisi baik sepanjang 590,07 km, sedang sepanjang 528,21 km, rusak sepanjang 73,61 km, rusak berat sepanjang 12,05 km dan lain-lainnya sepanjang 134,41 km (Kantor Statistik Kodya Medan, 1990)

Jaringan jalan di Kodya Medan bila ditinjau dari segi fungsinya, digolongkan ke dalam jalan arteri (protokol), jalan kolektor dan jalan lingkungan. Selain itu juga ada jalan lingkaran yang lebarnya 20 m menghubungkan jalan Glugur dengan jalan S. Parman, Sudirman, Suprpto, Sutomo dan jalan Jati (sekarang jalan Perintis Kemerdekaan) yang telah selesai pembangunannya, Sedangkan jalan lingkaran tengah dengan lebar 33 m menghubungkan jalan Kapt, Muslim, jalan Sunggal, jalan Tanjung Sari, Jalan Letjend. Jamin Ginting dan jalan ke Gedung Johor. Adapun jalan lingkaran luar dengan lebar 48 m sedang dalam perencanaan.

### **2.1.3.2 Penerangan**

Kebutuhan akan energi listrik di Kodya Medan setiap tahun

meningkat, sesuai dengan perkembangan dan bertambahnya industri serta kegiatan lain yang menggunakan energi listrik. Disamping itu kebutuhan akan penerangan pada rumah penduduk, perkantoran, hotel dan tempat-tempat lain turut pula menambah pemakaian listrik di Kodya Medan.

Dalam rangka memenuhi kebutuhan tersebut di Kodya Medan telah dibangun beberapa pembangkit tenaga listrik, meliputi Pembangkit Listrik Tenaga Diesel (PLTD) di beberapa lokasi sumber antara lain : PLTD di Glugur dengan kapasitas 33.300 Kw, PLTD di Titi Kuning dengan kapasitas 24.000 Kw dan PLTD di Paya Pasir 69.000 Kw (Kantor Statistik Kodya Medan, 1990). Sedangkan Pembangkit Listrik Tenaga Gas (PLTG) di Sicanang Kecamatan Medan Belawan telah memberikan kontribusi yang besar dalam memenuhi kebutuhan listrik di Kodya Medan.

Pemakaian tenaga listrik yang dihasilkan pembangkit tenaga listrik di Kodya Medan tidak hanya melayani kebutuhan penduduk kota, tetapi juga meliputi kota satelit (kawasan sekitar) Medan, yaitu Binjai, Pancurbatu, Tanjung Morawa, Delitua dan Batangkuis, karena daerah ini belum memiliki pembangkit listrik.

Dari Survei Biaya Hidup (SBH) di Kodya Medan tahun 1989 yang dilakukan Biro Pusat Statistik, disebutkan bahwa persentase penggunaan penerangan listrik baik PLN maupun non PLN, pada perumahan dan tempat pemukiman termasuk hotel adalah 89,35 % sedangkan penduduk yang masih menggunakan minyak lampu sekitar 10,65 %. Angka ini menunjukkan bahwa kebutuhan dan pemakaian listrik untuk penerangan termasuk tinggi.

### **2.1..3.3 Air Bersih**

Penyediaan air bersih untuk memenuhi kebutuhan masyarakat perkotaan cukup penting dan mutlak diperlukan. Demikian juga di daerah Kotamadya Medan penyediaan air menjadi penting, mengingat

penggunaan air sungai dan sumur kurang layak dan kurang memenuhi kesehatan. Lebih-lebih sungai di Kodya Medan telah banyak tercemar limbah pabrik dan buangan lain yang tidak menguntungkan kesehatan. Untuk memenuhi kebutuhan tersebut telah ada sarana penyediaan air bersih yang menjamin prasyarat kesehatan yang dikelola oleh Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Tirtanadi.

Sumber mata air PDAM Tirtanadi ini diproses dan disalurkan dari daerah Sibolangit dan Sungai Belawan di Sunggal. Kapasitas kedua sumber air tersebut pada tahun 1982 adalah 1.555 liter/detik (Kantor Stastistik Kodya Medan, 1990). Mengingat kebutuhan dan pemakaian air bersih yang setiap tahunnya terus bertambah maka PDAM berupaya untuk meningkatkan kapasitasnya, menambah jaringan transmisi dan distribusi ke rumah-rumah dan toko-toko di Kodya Medan. Pada tahun 1991 telah ditambah dan diperluas sumber mata air di Desa Pamah Delitua dengan kapasitas 7.000 liter/detik. Menurut rencana penambahan kapasitas air minum di Desa Pamah Delitua akan ditambah lagi pada tahun 1993 sebesar 1.400 liter/detik (Analisa. 1992).

Data yang diperoleh dari Kantor Stastisik Kodya Medan 1990 menyebutkan bahwa masyarakat Kodya Medan yang menggunakan jasa PDAM adalah 44.102 rumah tangga, pompa air 6.589 rumah tangga, sumur gali, 74.398 dan air sungai sebanyak 329 rumah tangga. Data tersebut menunjukkan bahwa masyarakat yang menggunakan sumur gali sebagai sumber air minum jumlahnya masih besar, hal ini disebabkan kemampuan ekonomi masyarakat untuk menggunakan jasa PDAM belum memungkinkan, disamping kapasitas dari PDAM itu sendiri belum sepenuhnya dapat melayani kebutuhan masyarakat.

#### **2.1.3.4 Sarana Kebersihan**

Untuk menangani masalah kebersihan Pemerintah Daerah Tk. II Kodya Medan telah membentuk sebuah Perusahaan Daerah yang khusus membidangi kebersihan dan persampahan yaitu PD. Kebersihan.

Perusahaan Daerah ini dibentuk mengingat setiap harinya sampah yang dihasilkan masyarakat baik di rumah/tempat pemukiman maupun tempat-tempat umum cukup besar.

Dalam mekanisme operasionalnya PD. Kebersihan bekerja sama dengan kelurahan di masing-masing tempat, serta meminta agar sampah yang ada dikumpulkan pada bak dan tempat/tong sampah yang disediakan oleh PD. Kebersihan maupun penduduk itu sendiri. Selanjutnya petugas kebersihan mengangkutnya ke tempat kontainer yang lebih besar yang disebut Tempat Pembuangan Sementara (TPS) yang disediakan PD. Kebersihan di beberapa lokasi, yang kemudian diangkut dengan truk ke Tempat Pembuangan Akhir (TPA), yang terdapat di dua tempat yaitu di Desa Namo Bintang dekat Pancur Batu dan Desa Terjun Kecamatan Medan Labuhan.

Pada tempat-tempat umum, seperti pasar-pasar yang ada di Kodya Medan, jumlah sampah yang dihasilkan seluruh pasar diperkirakan mencapai 180 ton setiap harinya (Analisa, 1992). Dari jumlah tersebut, Pusat Pasar Medan merupakan penghasil sampah terbanyak yaitu sekitar 30 ton setiap harinya, kemudian menyusul Pasar Patisah 20 ton per-hari, Pasar Medan Deli P. Brayon 20 ton per-hari, Pasar Sei Sikambing 15 ton per-hari dan Pasar Sukaramai 15 ton perhari. Untuk mengatasi hal ini PD. Kebersihan menyediakan container dan bak sampah sebagai tempat penampungan sementara sebelum diangkut ke tempat pembuangan akhir. Adapun frekuensi pembuangan sampah ke tempat pembuangan akhir tergantung kepada banyaknya sampah, yang berkisar 3-7 kali sehari.

Petugas yang dikerahkan untuk menangani sampah pada pasar-pasar di Kodya Medan sebanyak 400 orang, dengan petugas yang paling banyak terdapat di Pusat Pasar sekitar 86 orang. Menurut data statistik Kodya Medan 1990 jumlah sampah yang dihasilkan sebanyak 1.109 ton, dengan sarana yang ada berupa tong sampah, container dan kereta dorong serta bak besar yang dianggap cukup memadai untuk menampung sampah-sampah serta armada pengangkut (truk) sebanyak 79 unit.

Untuk tahun 1992 ditambah lagi 60 unit truk pengangkut sampah.

### **2.1.3.5. Pembuangan Air Limbah dan Air Hujan**

Letak geografis Kodya Medan termasuk rendah sehingga pada musim hujan sering terjadi banjir yang menggenangi beberapa kawasan Kodya Medan, terutama daerah yang belum ada parit atau saluran airnya. Untuk mengatasi hal tersebut, sejak tahun 1989 telah diadakan pembangunan meliputi MUDPI (Medan Urban Development Project) yang antara lain menangani pembuangan air hujan (*drainage*), penataan jalan kota (*urban road*), penanganan air bersih, pembuangan air limbah (*sewage*) dan pengendalian banjir (*flood control*) yang sekarang dalam tahap pembangunan dan diperkirakan selesai pada tahun 1995.

Saat ini pembuangan limbah keluarga masuk ke Sungai Deli. Akan tetapi sungai ini tidak dapat sepenuhnya menampung rembesan air hujan dan limbah penduduk akibat padatnya pemukiman dan pendangkalan sungai itu sendiri. Disamping itu saluran pembuangan air (Parit) di beberapa tempat kurang berfungsi karena saluran dan paritnya kecil sehingga pada musim hujan tidak dapat menampung air hujan yang mengakibatkan air tergenang dan banjir. Dengan selesainya pembangunan MUDP II diharapkan kawasan Medan akan bebas dari banjir.

Adapun data volume pembuangan kotoran dan limbah masyarakat yang diperoleh dari Kantor Statistik Kodya Medan tahun 1990 meliputi tangki kotoran sebanyak 76.845 keluarga, jamban templung 41.008 keluarga dan jamban kelompok 1.493 keluarga.

## **2.1.4. Bangunan**

### **2.1.4.1 Perumahan**

Kebutuhan perumahan pada masyarakat perkotaan cukup tinggi. Hasil survei yang dilakukan Biro Pusat Stastistik 1989 menunjukkan

pertambahan pengadaan tempat tinggal yang baru. Oleh karena itu Pemerintah terus mengupayakan penyediaan perumahan murah yang dapat dijangkau masyarakat ekonomi lemah. Menurut perkiraan, penduduk kota di Indonesia akan meningkat dari 50,2 juta jiwa pada akhir Pelita IV menjadi 61.1 juta pada akhir Pelita V.

Untuk Kodya Medan, peningkatan kebutuhan rumah tempat tinggal meningkat dari 153.057 buah pada tahun 1975 menjadi 221.543 buah pada tahun 1980 dan tahun 1990 diperkirakan 324.084 buah (Kantor Stastistik Kodya Medan, 1990). Perumahan yang ada ini umumnya merupakan usaha pembangunan masyarakat itu sendiri dan di luar kendali Rencana Tata Ruang Perkotaan. Sedangkan pembangunan perumahan yang berdasarkan pada perencanaan tata ruang perkotaan mengacu pada Peraturan Pemerintah No. 29 Tahun 1974 tentang Pembangunan Perumnas di Kodya Medan.

Dalam kenyataannya di Kodya Medan dijumpai adanya pemukiman masyarakat yang kurang berpola dan ditambah lagi dengan berdirinya perumahan kumuh di beberapa tempat pada gilirannya menimbulkan daerah atau perkampungan kumuh yang kurang memenuhi syarat kesehatan, baik menyangkut kondisi bangunan, tata ruang maupun lingkungan fisiknya.

Untuk meningkatkan dan merehabilitasi pemukiman kumuh, sejak tahun 1979 Pemda Tk. II Kodya Medan telah memulai kegiatan perbaikan pemukiman penduduk melalui Kampung Improvement Project (KIP). Luas pemukiman yang termasuk KIP adalah 1.028 ha, meliputi beberapa kelurahan yaitu : Kota Maksum I, II dan III, Sei Kera Hulu, Sidorame Barat, Tegal Sari, Aur, Ham dan Sukarame I, yang secara bertahap akan ditingkatkan kondisi pemukiman dan lingkungan perumahannya. Sedangkan pemukiman yang dibangun Pemerintah melalui Perum Perumnas kondisi lingkungannya lebih baik karena dari segi tata ruang telah diperhitungkan, begitu pula kondisi rumahnya sesuai dengan tipe perumahan yang direncanakan. Lokasi perumahan tersebut meliputi: Perumnas Helvetia memiliki areal seluas 98 ha yang terdiri dari 4.802 unit,

mencakup beberapa tipe seperti tipe M. 70 sebanyak 262 unit, tipe D. 45 sebanyak 1.404 unit, tipe D. 36 sebanyak 2.238 unit dan tipe D. 25 sebanyak 898 unit. Prasarana dan sarana juga dibangun di lokasi perumahan ini seperti sekolah, lapangan olah raga, tempat ibadah, puskesmas dan sarana fisik lainnya. Adapun Perumnas II yang terletak di Mandala, meliputi areal seluas 198 ha, terdiri dari 8.813 unit meliputi beberapa tipe, seperti tipe D. 36 sebanyak 1008 unit., tipe D. 33 sebanyak 2.350 unit, tipe D. 24 sebanyak 550 unit, tipe D. 21 sebanyak 4500 unit dan tipe S.1 sebanyak 403 unit rumah.

Perumahan lain yang termasuk Perum Perumnas adalah Perumnas Simalingkar yang berlokasi di Kecamatan Medan Tuntungan (sebelum pemekaran), dan sejak pemekaran menjadi wilayah Kecamatan Medan Selayang. Perumahan ini juga terdiri dari beberapa tipe, seperti tipe 36, D. 42, M. 72 yang dilengkapi dengan berbagai sarana seperti pasar, sekolah dan prasarana lain. Selain itu Kodya Medan juga terdapat perumahan instansi pemerintah dan swasta yang dibangun oleh swasta dengan sistem kredit pemilikan rumah serta perumahan dinas seperti Perumahan Pondok Indah Setia Budi, Perumahan DPRD, Perumahan Pemda dan Perumahan Guru-Guru serta perumahan di Kelurahan Tanjung Gusta.

#### **2.1.4.2. Bangunan-Bangunan Umum**

Menurut Sensus Ekonomi 1980, bangunan di luar pemukiman di Kodya Medan meliputi pertokoan, industri/kerajinan perkantoran, gedung sekolah dan tempat ibadah. Hasil sensus tersebut menunjukkan bahwa penggunaan bangunan terbesar adalah bangunan tempat tinggal sekitar 78,7% bangunan perkantoran/sekolah dan tempat ibadah 16,7%, pertokoan 3,3% dan bangunan industri 1,1%.

Pertokoan termasuk rumah toko (ruko) terdapat di kawasan pusat kota yang pemiliknya didominasi etnis Tionghoa, Minangkabau dan suku bangsa Batak. Berdasarkan jenis bangunan dan proporsi bangunan toko/

perdagangan terbesar terdapat pada 5 kecamatan yaitu : Kecamatan Medan Kota (28,2%), Medan Barat (14%), Medan Timur (14%), Medan Sunggal (12,4%) dan Medan Baru (9,6%) (sensus Ekonomi Kodya Medan, 1980).

Adapun bangunan sekolah di Kodya Medan berdasarkan data Statistik tahun 1990 terdapat 795 sekolah dasar dengan jumlah siswa 273.103 orang, tingkat SMTP sebanyak 366 buah dan tingkat SMTA sebanyak 314 buah, termasuk sekolah kejuruan dan sekolah swasta. Sedangkan prasarana kesehatan yang terdapat di Kodya Medan meliputi Puskesmas sebanyak 32 buah, Puskesmas Pembantu 32 buah, Balai Kesehatan Ibu dan Anak (BKIA) sebanyak 16 buah, Balai Pengobatan Umum sebanyak 10 buah, Rumah Sakit Bersalin sebanyak 9 buah dan Rumah Sakit sebanyak 30 buah (Kantor Statistik Kodya Medan, 1990).

### **2.1.5. Tempat-Tempat Umum**

#### **2.1.5.1 Pasar/Pajak**

Pasar atau "pajak" merupakan kompleks perdagangan yang dikelola oleh Pemerintah Daerah melalui Dinas Pasar Kodya Medan. Menurut data statistik Kodya Medan tahun 1980, di daerah ini terdapat 43 pasar yang berbeda kelas maupun fasilitasnya, dengan luas seluruhnya 154.501 m<sup>2</sup>. Sedangkan pada tahun 1990 jumlah ini bertambah menjadi 53 buah dengan luas areal 220.288 m<sup>2</sup> dan jumlah pedagang seluruhnya 17.568 orang (Tabel II.2). Dengan semakin pesatnya perkembangan dan pertumbuhan perekonomian di daerah ini maka pada tahun 1992 jumlah pasar bertambah menjadi 58 buah sesuai dengan Peraturan Daerah Kodya Medan No. 14 Tahun 1992 tentang Perubahan Kedua Peraturan Daerah Kodya Medan No. 8 Tahun 1988 tentang pengelolaan pasar.

Berdasarkan Perda tersebut maka pasar-pasar di Kodya Medan diklasifikasikan menjadi empat kelas. Kelas IA adalah tipe pasar yang bangunannya permanen dan mempunyai fasilitas yang baik seperti :

ini jumlahnya dua buah yaitu Proyek Pusat Pasar Medan dan Pasar Aksara. Pasar kelas I merupakan pasar yang bangunannya terdiri dari bangunan permanen dan semi permanen serta mempunyai fasilitas yang cukup seperti tempat parkir, wc/kamar mandi dan aliran listrik. Pasar kelas I ini berjumlah enam buah, yaitu : Pasar Sambu, Pasar Baru, Sambas, Rame, Peringgan dan Petisah, dengan kegiatan yang berlangsung mulai pagi (06.00 wib) sampai sore (18.00 Wib).

Pasar kelas II merupakan pasar yang bangunannya semi permanen dan sebagian permanen dengan fasilitas yang belum mencukupi seperti parkir, listrik dan kamar mandi. Jenis pasar ini di Kodya Medan berjumlah 20 buah, yang pada umumnya adalah pasar inpres. Tipe pasar lainnya adalah pasar kelas III, yaitu pasar yang bersifat darurat dengan mengambil tempat di lapangan dan tidak mempunyai fasilitas yang layak untuk disebut pasar. Jumlah pasar ini adalah 13 buah. Sedangkan pasar kelas IV merupakan pasar yang mempergunakan lapangan sebagai tempat berjualan dan tidak memiliki bangunan. Pasar ini kegiatannya hanya sebentar yang biasanya pagi, sore atau malam hari saja, yang jumlahnya sekitar 17 buah.

Pasar-pasar yang terdapat di Kodya Medan umumnya kurang terawat/terpelihara kebersihannya. Hal ini disebabkan belum adanya kesadaran dan kedisiplinan pedagang/pembeli untuk memelihara kebersihan pasar, di samping lokasi pasar yang sempit, saluran air dan penanganan sampah yang belum lancar serta fasilitas pendukung yang belum memadai. Disamping itu, di Kodya Medan juga terdapat pedagang kaki lima yang biasanya menggelarkan dagangannya di pinggir jalan, di terminal atau tempat lain yang bukan tempat berjualan. Pedagang kaki lima ini umumnya berjualan di sekitar Terminal Sambu pada sore hari, pasar Sukarame, di pinggir jalan dan tempat lain yang ramai dilalui pembeli.

### **2.1.5.2. Terminal dan Perparkiran**

Kotamadya Medan memiliki beberapa terminal yang dikelola oleh Unit Pelaksana Lalu Lintas Angkutan Kota Medan. Satu diantaranya adalah Terminal Sambu yang merupakan pusat terminal bus kota, yang melayani trayek ke berbagai jurusan seperti Belawan, Jalan Rakyat, Padang Bulan, Jalan Binjai, Titi Kuning, yang umumnya menghubungkan pusat kota dengan daerah-daerah kantong di kawasan Kodya Medan.

Untuk terminal antar kota yang menghubungkan kota Medan dengan daerah lain, telah dibangun tiga buah terminal terpadu, yaitu Terminal Terpadu Amplas yang melayani trayek antar kota dan antar propinsi. Terminal Terpadu Pinang Baris yang berlokasi di Medan Sunggal melayani trayek kota Medan dengan kota kabupaten/kodya dan jurusan ke Propinsi Aceh. Sedangkan terminal lainnya adalah Terminal Terpadu Taksi Teladan yang melayani trayek antar kabupaten/kodya di Sumatera Utara.

Pembangunan terminal terpadu ini merupakan salah satu upaya untuk mengatasi kemacetan dan kesemrawutan lalu lintas di Kodya Medan. Dalam hal ini bus kota tidak dibenarkan lagi memasuki pusat kota dan beroperasi di sekitar jalan-jalan protokol.

Mengenai pengelolaan perparkiran di Kodya Medan telah diatur sesuai dengan SK Walikota No. 188.342/09/SK/1991 tanggal 5 Januari 1991 yang memuat tentang pelaksanaan dan pengelolaan perparkiran di Kota Medan. Lokasi perparkiran ini meliputi berbagai jalan, pelataran perparkiran, plaza, pasar-pasar, hotel, supermarket, perkantoran dan tempat-tempat lain yang ditetapkan Pemda. Selain itu di Kodya Medan juga telah ditetapkan Parkir Lingkungan (Parling) di kawasan-kawasan tertentu seperti pusat pertokoan/perbelanjaan dan tempat-tempat yang dianggap strategis. Setiap kendaraan yang parkir di tempat tersebut akan di pungut retribusi. Untuk retribusi parkir ini telah diatur tipe-tipe jalan yang dibagi atas dua tipe, yaitu tipe A dan tipe B sesuai dengan fungsi jalan, keadaan kawasan dan jenis kendaraan yang parkir tersebut.

Pengelolaan parkir ini umumnya tertib dan lancar karena petunjuk pelaksanaan dan tarifnya telah diatur dengan jelas. Namun realisasinya tergantung kepada petugas dan pemilik kendaraan apakah mau mematuhi peraturan tersebut atau tidak.

### **2.1.5.3 Hiburan**

Tempat-tempat hiburan yang terdapat di Kodya Medan meliputi bioskop, taman ria Medan, plaza, kebun binatang, bar, diskotik, pub dan lain-lainnya. Disamping itu Kodya Medan juga memiliki hotel dan penginapan, yang menurut data 1990 terdiri dari hotel berbintang satu sebanyak 7 buah dengan 329 kamar dan 522 tempat tidur, hotel berbintang dua sebanyak 4 buah, hotel berbintang tiga sebanyak 3 buah, hotel berbintang empat berjumlah 2 buah dan hotel/penginapan melati sebanyak 128 buah dengan 3.919 kamar dan 6.092 kamar. Sedangkan bioskop/PHR yang ada di Kodya Medan sebanyak 57 buah yang tersebar di berbagai lokasi dengan kapasitas tempat duduk sebanyak 26.561 buah.

### **2.1.6 Kependudukan**

#### **2.1.6.1 Jumlah dan Persebaran Penduduk**

Menurut data yang diperoleh, jumlah penduduk Kodya Medan tahun 1990 adalah 1.730.750 orang (Tabel II.3) Penduduk tersebut tersebar pada sebelas wilayah kecamatan (sebelum pemekaran) dengan luas seluruhnya 265 km<sup>2</sup>. Penduduk terbanyak dijumpai pada Kecamatan Medan Denai berjumlah 232.775 jiwa dan luas wilayah 18 km<sup>2</sup>, sementara penduduk terkecil dijumpai pada Kecamatan Medan Tuntungan.

Dilihat dari segi kepadatan penduduk, Kecamatan Medan Kota menempati posisi tertinggi, yaitu 22.843 jiwa/km<sup>2</sup>, sedangkan penduduk yang lebih jarang terdapat pada Kecamatan Medan Labuhan dengan kepadatan penduduknya 1.366 jiwa/km<sup>2</sup>. Ini menunjukkan penyebaran

penduduk di Kodya Medan tergolong tidak merata. Gejala ini disebabkan daya tarik dan lapangan kerja serta sektor lain menumpuk pada beberapa kecamatan, sedangkan pada kecamatan yang berpenduduk jarang, umumnya mata pencaharian tertumpu pada sektor pertanian. Namun demikian beberapa tahun mendatang daerah-daerah juga akan berkembang seiring dengan kompleksitas dan padatnya penduduk di beberapa tempat serta ditambah dengan berdirinya industri di daerah pinggiran kota Medan.

#### **2.1.6.2. Dinamika Penduduk**

Pertumbuhan penduduk Kodya Medan setiap tahun bertambah dengan pesat, hal ini disebabkan faktor migrasi yang deras terutama urbanisasi. Sejak tahun 1961 pertambahan penduduk menunjukkan perkembangan yang cukup besar. Bila pada tahun tersebut penduduk Kodya Medan berjumlah 479.098 jiwa dengan luas daerah 5.130 ha maka pada tahun 1971 bertambah menjadi 635.562 jiwa, dan sensus tahun 1980 berjumlah 1.378.955 jiwa serta pada sensus tahun 1990 berjumlah 1.730.752 jiwa.

Berdasarkan data di atas, laju pertumbuhan penduduk Kodya Medan pada periode 1961-1971 adalah 2,9%, periode 1971-1980 sebesar 8,8% dan periode 1980-1990 sebesar 2,03%. Di sini terlihat pertumbuhan penduduk tertinggi terjadi pada periode 1971-1980 yaitu 8,8% yang menunjukkan pertumbuhan penduduk alami (lahir, mati, pindah) serta urbanisasi tergolong tinggi.

#### **2.1.6.3 Komposisi Penduduk**

Komposisi penduduk Kodya Medan dapat dibagi menjadi :

- 1). Komposisi penduduk menurut jenis kelamin dan kelompok umur.

Menurut Sensus Penduduk 1990, penduduk Kodya Medan berjumlah

1.730.752 jiwa, terdiri dari 866,241 jiwa laki-laki dan 864,511 jiwa perempuan. Di sini terlihat selisih jumlah penduduk laki-laki dan perempuan sebanyak 1.690 jiwa (Tabel II.4)

Berdasarkan kelompok umur, jumlah penduduk usia muda (anak-anak) berkisar 0-14 tahun sebanyak 729.975 jiwa dan penduduk dewasa (15 tahun ke atas) sebesar 1.000.777 jiwa. Dari jumlah ini persentase penduduk anak-anak sebesar 42,17% dan penduduk dewasa yang merupakan usia produktif sebesar 57,83%, dengan selisih jumlah penduduk laki-laki dan perempuan sebanyak 7.727 jiwa (Tabel II.5). Angka ini menunjukkan bahwa laju urbanisasi penduduk baik yang pindah tetap maupun sementara cukup besar. Sedangkan pada kelompok umur anak-anak jumlah penduduk perempuan lebih besar.

## 2) Komposisi penduduk menurut kewarganegaraan dan suku bangsa.

Berdasarkan status kewarganegaraan penduduk Kodya Medan tahun 1990 terdiri dari warga negara Indonesia (asli dan keturunan) sebanyak 1.720.672 jiwa meliputi 861.152 jiwa laki-laki dan 859.520 jiwa perempuan, dengan persentase 99% dan warga negara asing sebanyak 10.080 atau sekitar 1 % (Kantor Statistik Kodya Medan, 1990).

Sedangkan menurut suku bangsa penduduk Kodya Medan terdiri dari beberapa suku bangsa, hanya saja data yang akurat tidak diperoleh. Akan tetapi dari penelitian yang pernah dilakukan (1985) menunjukkan bahwa di Kodya Medan tidak terdapat dominasi salah satu suku yang dianggap superior dan dijadikan acuan bagi suku bangsa lain (Usman Pelly, 1985). Adapun suku bangsa yang termasuk besar adalah suku bangsa Batak, Minangkabau, Jawa, Melayu, Aceh dan suku bangsa lainnya.

## 3) Komposisi penduduk menurut agama.

Menurut data yang diperoleh dari Kantor Pusat Statistik Kodya Medan 1990, jumlah penduduk yang terbesar berdasarkan agama di

Kodya Medan adalah pemeluk Agama Islam sebanyak 1.163.275 jiwa, agama Kristen Katolik sebanyak 92.816 jiwa. Kristen Protestan sebanyak 316.764 jiwa, Agama Hindu sebanyak 32.089 jiwa dan Budha sebanyak 124.915 jiwa serta lain-lain sebanyak 893 jiwa.

Penyebaran masing-masing pemeluk agama tersebut terkesan mengelompok pada daerah tertentu, misalnya penganut Agama Hindu mayoritas menetap di Kecamatan Medan Barat dan Medan Baru, penganut Agama Budha banyak menetap di Kecamatan Medan Barat dan Medan Denai. Sedangkan penganut Agama Islam dan Kristen tersebar di setiap kecamatan dengan jumlah yang tidak sama.

#### 4) Komposisi penduduk menurut mata pencaharian

Komposisi penduduk menurut mata pencaharian di Kodya Medan tidak diperoleh secara pasti. Namun demikian dapat dikemukakan bahwa mata pencarian yang ada dapat dibedakan antara bidang pertanian dan non pertanian. Penduduk yang bekerja pada bidang pertanian terdapat di Kecamatan Medan Tuntungan, Medan Labuhan, Medan Deli, Medan Sunggal dan Medan Johor. Sedangkan mata pencaharian non pertanian meliputi : perdagangan, pegawai negeri, karyawan swasta, sektor jasa dan pekerjaan lain yang lebih eksklusif.

#### **2.1.7. Kehidupan Sosial Ekonomi dan Budaya**

Sebagaimana kota besar lainnya di Indonesia, penduduk Kodya Medan terdiri dari keluarga inti (keluarga batih) yang merupakan satu kesatuan ekonomis. Namun karena kesulitan akan perumahan maka beberapa keluarga tinggal serumah, dimana anak-anak yang sudah besar dan menikah masih menumpang dan tinggal di rumah orang tua-nya. Keadaan ini biasanya bersifat sementara karena ada anggapan bahwa anak yang baru menikah dianggap belum mampu mandiri untuk membiayai kehidupannya.

Hasil survei biaya hidup tahun 1989 yang dilakukan oleh Biro Pusat Statistik menunjukkan bahwa rata-rata pendapatan keluarga di Kodya Medan sebesar Rp 302.392, setiap tahun. Hal ini memperlihatkan bahwa tingkat pendapatan dan kemakmuran warga masyarakat secara keseluruhan tergolong rendah.

Mengenai karakteristik dan perilaku dalam kehidupan sehari-hari, masyarakat Medan mempunyai karakter yang luwes, spontan dan fanatik, disertai dialek yang "kental" dalam berkomunikasi dan berinteraksi.

Masyarakat Medan dalam berkomunikasi dengan warga yang berbeda suku bangsa menggunakan Bahasa Indonesia dengan dialek Medan, sedangkan antara warga se-suku bangsa menggunakan bahasa daerah masing-masing. Sedangkan aktifitas-aktifitas sosial keagamaan tergolong baik dengan toleransi antar umat beragama yang harmonis.

## **2.2. Daerah Penelitian**

### **2.2.1 Kelurahan Tegalsari III Kecamatan Medan Area**

#### **2.2.1.1. Lokasi dan Luas**

Kecamatan Medan Area merupakan salah satu kecamatan yang ada di Kodya Medan, dibentuk tahun 1991 melalui PP. No. 50/1991 yang seluruh wilayahnya diambil dari Kecamatan Medan Kota. Usaha ini dilakukan untuk lebih mengoptimalkan pembangunan dan pemerintahan di Kodya Medan dalam rangka menuju kota metropolitan yang bersih, sehat dan mandiri.

Kelurahan Tegalsari III dikenal sebagai daerah pemukiman yang paling padat penduduknya bila dibandingkan dengan kelurahan lain yang ada di Kodya Medan. Kepadatan penduduk Kelurahan Tegalsari III adalah 56.345 jiwa/km, dengan luas daerah 35 ha (tabel II.6).

Kelurahan ini terbagi atas 8 lingkungan, dengan batas-batas ; sebelah Utara berbatasan dengan Tegalsari I, sebelah Selatan berbatasan

dengan Tegalsari II, sebelah Barat berbatasan dengan Sukarame I dan sebelah Timur berbatasan dengan Tegalsari Mandala (Kantor Kelurahan Tegalsari III, 1990)

### **2.2.1.2. Administrasi dan Pemerintahan**

Berdasarkan struktur pemerintahan, Kelurahan Tegalsari III secara administratif dikepalai oleh seorang Lurah. Dalam melaksanakan tugasnya Lurah dibantu oleh perangkat kelurahan, antara lain Sekretaris Lurah, Kepala Urusan dan staf. Sedangkan di setiap lingkungan pelaksanaan pemerintah dibantu oleh Kepala Lingkungan, RW dan RT.

Perangkat kelurahan bertugas membantu Lurah dalam menangani administrasi di kelurahan tersebut. Sekretaris Lurah merupakan orang kedua di kelurahan yang memimpin dan mengendalikan roda pemerintahan dan pembangunan di wilayahnya seperti mempersiapkan, mengkoordinasi dan menata kegiatan administrasi. Kepala Urusan membidangi urusan pendaftaran tanah dan kependudukan, pembangunan, pemerintahan, keuangan, umum dan urusan kesra dalam melayani masyarakat di kelurahan tersebut. Untuk lebih memantapkan pelaksanaan tugas pemerintahan dan pembangunan maka Lurah dan perangkat kelurahan yang ada di Kodya Medan sejak tahun 1992 telah berstatus Pegawai Negeri Sipil.

### **2.2.1.3 Kependudukan**

Berdasarkan monografi 1991, penduduk Kelurahan Tegalsari III berjumlah 10.483 jiwa, terdiri dari 5.117 jiwa laki-laki dan 5.366 jiwa perempuan (Tabel II.7). Menurut status kewarganegaraan, penduduk Kelurahan Tegalsari III terdiri dari 10.455 jiwa Warga Negara Indonesia asli dan 38 jiwa Warga Negara Indonesia keturunan asing.

Berdasarkan kelompok umur, pertumbuhan penduduk Tegalsari III cukup tinggi (Tabel II.8). Data yang diperoleh dari Kelurahan Tegalsari III

menunjukkan bahwa angka kematian tahun 1991 sebanyak 17 orang dan angka kelahiran sebanyak 7 orang. Menurut hemat Penulis bahwa angka kelahiran sebenarnya melebihi angka di atas, tetapi kebiasaan untuk melaporkan anak yang lahir pada kepala lingkungan atau kelurahan belum berjalan lancar sehingga angka yang akurat belum bisa diperoleh. Perubahan penduduk, terutama penduduk yang pindah keluar dari kelurahan Tegalsari III sebanyak 51 orang, sedangkan penduduk yang pindah masuk tahun 1991 sebanyak 12 orang. Adapun penduduk yang meninggal selama 1991 sebanyak 81 orang, serta angka perceraian 1 orang.

#### **2.2.1.4. Keadaan Fisik**

Kondisi fisik suatu lingkungan pemukiman umumnya dipengaruhi oleh perilaku dan sikap mental masyarakat di lingkungan tersebut. Hubungan timbal balik antara manusia dan lingkungannya akan menciptakan kondisi yang sehat atau sebaliknya, terutama kondisi tata ruang pemukiman penduduknya.

##### **1). Rumah dan Perkarangan**

Perumahan penduduk Kelurahan Tegal Sari III dapat diklasifikasikan ke dalam 3 tipe, yaitu bangunan permanen, semi permanen dan bangunan.. Pola perumahan umumnya berbanjar dan menghadap ke jalan atau gang dengan jarak umumnya rapat sekali. Di beberapa lingkungan terdapat rumah petak yang bersambung sampai empat pintu, dan dihuni oleh keluarga yang memiliki mata pencaharian sebagai buruh dan pedagang kecil.

Menurut klasifikasi di atas, bangunan permanen adalah rumah yang berdinding tembok, berlantai semen atau tegel dan atap seng atau genteng. Bangunan semi permanen adalah rumah yang memiliki dinding setengah batu dan separuh papan, berlantai semen dan mempunyai atap

seng. Sedangkan bangunan darurat adalah rumah yang dindingnya papan dan sebagian bambu yang dianyam, atap seng atau rumbia serta lantai semen atau sebagian tanah. Penggolongan di atas sebagian besar juga dipengaruhi oleh peralatan rumah tangga, fasilitas air minum dan sarana listrik.

Berdasarkan penggolongan dan tipe di atas, Kelurahan Tegal Sari III memiliki bangunan permanen sebanyak 469 rumah, bangunan semi permanen sebanyak 431 rumah dan bangunan darurat sebanyak 333 rumah. Pekarangan rumah di Kelurahan Tegal Sari III tergolong sempit dan kecil, karena letak perumahan yang padat dan rapat sehingga halaman pekarangannya boleh dikatakan sedikit sekali.

## 2) Selokan, pembuangan air limbah dan persampahan

Pembuangan air limbah yang berasal dari rumah tangga kondisinya kurang baik. Hal ini disebabkan parit-parit dan selokan kecil sekali dan airnya kurang mengalir, sehingga kalau musim hujan tidak dapat menampung air hujan, yang mengakibatkan tergenangnya jalan dan parit-parit tersebut. Di beberapa lingkungan air selokan menuju satu parit besar yang meliputi beberapa kawasan kota yang disebut Parit Busuk. Parit ini merupakan tempat penampungan limbah keluarga yang berasal dari lingkungan II dan III.

Tempat pembuangan sampah keluarga belum dapat disediakan sepenuhnya meskipun Dinas Kebersihan telah mengupayakan sarana pembuangan sampah yang diangkut dengan gerobak ke Tempat Pembuangan Akhir (TPA) di luar kota, seperti yang telah dijelaskan di muka. Masyarakat umumnya membuang sampah pada bak sampah atau pekarangan masing-masing dan membakarnya sendiri, Kalau musim hujan sampah-sampah keluarga yang dibuang ke bak sampah atau sekitar pekarangan ini menumpuk dan mengakibatkan bau kurang enak yang bisa mengganggu kesehatan masyarakat.

### 3) Sarana kesehatan, kegiatan sosial dan sarana olah raga.

Untuk menunjang peningkatan kesehatan masyarakat di Kelurahan Tegalsari III terdapat sarana dan fasilitas kesehatan seperti Rumah Sakit Bersalin 1 buah, Apotik, Posyandu pada masing-masing lingkungan yang merupakan Pos Pelayanan Terpadu untuk anak-anak Balita dilaksanakan setiap bulan yang berfungsi untuk meningkatkan pelayanan kesehatan terutama anak-anak di bawah 5 tahun . Untuk mengantisipasi pelayanan kesehatan masyarakat di kelurahan ini terdapat 4 orang dokter dan 2 orang bidan, sedangkan Puskesmas belum ada.

Untuk kegiatan sosial dan keagamaan tersedia cukup banyak rumah ibadah seperti mesjid, gereja, langgar. Bangunan mesjid sebanyak 5 buah terdapat di lingkungan II, lingkungan IV, lingkungan VI, lingkungan VII dan lingkungan VIII. Sedangkan langgar terdapat 2 buah. Panti Asuhan sebagai tempat penampungan anak-anak yatim dan yang cacat terdapat 2 buah. Sarana olah raga yang ada meliputi lapangan volly dan bulutangkis terdapat di lingkungan III, lingkungan IV dan lingkungan VIII.

### 4) Kondisi jalan dan bangunan pemerintah.

Kelurahan Tegalsari III mempunyai lebih kurang 2 km jalan kotamadya dan jalan desa. Jalan kotamadya ini adalah jalan Bromo yang kondisi jalannya sudah baik. Sedangkan jalan desa menghubungkan lingkungan yang satu dengan yang lain. Umumnya jalan desa tersebut berupa gang yang kondisinya sebagian besar telah di aspal dan dapat dilalui kendaraan roda 4 dan roda 2. Untuk sebagian jalan desa merupakan jalan keliling dapat tembus, namun sebagian lagi jalan/gang buntu. Bangunan pemerintah di kelurahan ini seperti Kantor Lurah Tegalsari III dan bangunan lain seperti Pos Kamling dan Posyandu.

#### **2.2.1.5 Keadaan Ekonomi**

Umumnya tingkat ekonomi masyarakat Kelurahan Tegalsari III

masih rendah. Sumber penghasilan masyarakatnya terutama pada sektor non agraris seperti tukang jahit, pedagang kecil dan buruh lepas. Sekarang ini mata pencaharian masyarakat lebih menonjol pada sektor informal yaitu sebagai pemulung dan pengumpul barang-barang bekas. Hal ini dapat dilihat dari tumpukan benda-benda/barang-barang bekas di halaman dan rumah penduduk. Di samping itu di daerah ini merupakan pusat penumpukan barang-barang bekas dari kelurahan atau daerah lain, berupa peralatan dapur, plastik dan barang rongsokan besi tua. Dilihat dari sistem mata pencaharian masyarakat umumnya adalah pekerja musiman, buruh lepas dan pengumpul barang-barang bekas/pemulung (Tabel II.9).

#### **2.2.1.6. Kehidupan Sosial Budaya**

Masyarakat Kelurahan Tegalsari III terdiri dari beberapa suku bangsa atau etnis. Dalam kehidupan sosial kemasyarakatan masing-masing anggota masyarakat saling bergaul dan berinteraksi tanpa membedakan suku bangsa, dan asal daerah. Beberapa aktivitas yang menyangkut kepentingan umum sering dilakukan seperti gotong royong membersihkan parit/jalan, pekarangan dan kegiatan sosial lainnya.

Dilihat dari komposisi suku bangsanya penduduk Kelurahan Tegalsari III berasal dari beberapa suku bangsa yaitu suku bangsa Minangkabau 3.177 orang, suku bangsa Jawa 1.716 orang, Melayu 32 orang, Karo 34 orang, Aceh 67 orang, Nias 123 orang, Angkola/Mandailing 3.008 orang. Batak Toba 2.288 orang dan suku bangsa lainnya sejumlah 38 orang.

Berdasarkan komposisi etnis tersebut rata-rata suku bangsa Minangkabau merupakan etnis terbesar, kemudian Angkola/Mandailing, Batak Toba dan suku bangsa Jawa. Sekalipun di beberapa lingkungan terdapat pengelompokan etnis, namun hubungan sosial dengan suku bangsa lain tetap baik dan rukun.

## 1) Hubungan sosial

Hubungan sosial umumnya mencakup hubungan antara sesama warga selorong, selingkungan dan sekelurahan menyangkut keamanan, kerukunan antara umat beragama. Hubungan sosial yang cukup erat diantara warga selorong kelihatan dari partisipasi warga masyarakat dalam melaksanakan ronda kampung. Oleh karena itu keamanan warga masyarakat di Kelurahan Tegalsari III cukup baik dan terkendali.

Dalam kegiatan sosial dan keagamaan, kelurahan ini memiliki perkumpulan atau Serikat Tolong Menolong (STM) sebanyak 15 buah yang umumnya berupa pengajian Yasin, yang diikuti oleh umat Islam, sedangkan persekutuan doa diikuti oleh penduduk yang beragama Kristen.

Kerukunan antar umat beragama di Kelurahan Tegalsari III cukup tinggi. Perbedaan agama tidak pernah menimbulkan perselisihan. Dan pergaulan sehari-hari antara warga satu suku bangsa menggunakan bahasa daerah masing-masing, sedangkan antara warga yang tidak satu suku bangsa menggunakan bahasa Indonesia.

## 2) Hubungan tolong menolong

Dalam kehidupan sehari-hari, hubungan tolong menolong terjadi apabila salah satu warga mengalami kesulitan, seperti kesulitan keuangan ataupun ditimpa musibah dan dalam pelaksanaan kegiatan penting dalam keluarga seperti pesta perkawinan dan khitanan anak.

Dalam hal kesulitan biaya atau uang pertama-tama meminta bantuan kerabat, kemudian barulah para tetangga. Akan tetapi dalam hal musibah, tetanggalah yang pertama diminta bantuannya.

Sekalipun berbeda suku bangsa dan agama, tetapi masyarakat Kelurahan Tegalsari III mempunyai tingkat solidaritas yang tinggi, ditunjukkan melalui tolong menolong dalam hal-hal tertentu yang tidak bertentangan dengan agama atau kepercayaan masing-masing.

## **2.2.2 Kelurahan Pusat Pasar Kecamatan Medan Kota**

### **2.2.2.1. Lokasi**

Kelurahan Pusat Pasar adalah salah satu wilayah/daerah integral dari Kecamatan Medan Kota. Sesuai dengan nama Kelurahan Pusat Pasar, merupakan pusat perbelanjaan Kotamadya Medan, karena di daerah ini terdapat berbagai tipikasi perdagangan mulai dari yang kecil/pedagang kaki lima hingga pedagang skala besar/pusat grosir.

Disamping sebagai pusat perbelanjaan yang oleh masyarakat Kotamadya Medan dinamakan Sentral, di wilayah Kelurahan Pusat Pasar juga terdapat pusat terminal angkutan kota, yang dinamakan "Terminal Sambu". Terminal ini merupakan sentral berbagai jenis angkutan kota yang menghubungkan pusat pasar dengan berbagai wilayah Kotamadya Medan umumnya.

Keseluruhan wilayah Kelurahan Pusat Pasar adalah seluas 0,40 km<sup>2</sup> dengan batas-batas administratif sebagai berikut :

- Sebelah Utara berbatasan dengan Kecamatan Medan timur.
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Kelurahan Pasar Baru (Kec. Medan Kota)
- Sebelah Timur berbatasan dengan Kelurahan Pandau Hulu (Kec. Medan Kota)
- Sebelah Barat berbatasan dengan Kecamatan Medan Barat.

Kelurahan Pusat Pasar selain sebagai tempat pemukiman juga berfungsi sebagai pusat perbelanjaan, terminal dan hiburan serta rumah-rumah toko (ruko), dimana sebagian berfungsi ganda, yakni sebagai tempat kegiatan usaha dan merangkap sebagai tempat tinggal. Bangunan pertokoan atau rumah toko, umumnya menghadap jalan raya dan hampir tidak memiliki pekarangan. Jalan raya yang merupakan halaman pertokoan berfungsi sebagai jalan umum yang dilalui berbagai angkutan kota dan pejalan kaki.

### **2.2.2.2 Kondisi Fisik**

#### **1) Jaringan Jalan**

Sebagian besar jalan yang terdapat di Kelurahan Pusat Pasar merupakan jalan arteri yang keadaannya cukup baik. Akan tetapi karena seringnya penggalian jalan untuk pemasangan pipa air dan kabel telepon mengakibatkan ruas badan jalan banyak yang tertimbun tanah dan pasir galian tersebut, sehingga sering terjadi kemacetan lalu lintas. Jalan di daerah ini umumnya jalan kotamadya dan jalan desa. Jalan Sutomo yang merupakan salah satu jalan protokol merupakan penghubung kota dengan jalur satu arah. Di samping itu batas Kelurahan Pusat Pasar dengan Kelurahan Pandau Hulu dihubungkan oleh jalan Pandu yang kondisinya cukup bagus, namun karena arus kendaraan yang melewati jalan tersebut cukup padat sering terjadi kemacetan, terutama pada pagi dan sore hari. Bus kota (sudaco) yang hendak memasuki terminal Sambu dari arah Padangbulan dan jalan S.M. Raja dan daerah Sukaramai melewati jalan ini sehingga menambah kesemrawutan arus lalu lintas.

Di samping terminal Sambu kondisi jalannya pada musim penghujan sering banjir dan tergenang yang mengakibatkan jalan-jalan banyak berlubang-lubang. Kondisi saluran limbah rumah tangga dan hujan yang relatif kecil tidak dapat menampung seluruhnya. Air hujan menggenangi wilayah ini terutama pada bulan September sampai Desember yang merupakan musim penghujan di daerah Kotamadya Medan.

Trotoar jalan yang seharusnya untuk pejalan kaki, umumnya telah berubah fungsi menjadi tempat berjualan, terutama oleh pedagang kaki lima dan pedagang asongan. Kesemrawutan dan kurang-teraturan mewarnai keadaan di Kelurahan Pusat Pasar.

#### **2) Terminal dan perparkiran.**

Kelurahan Pusat Pasar memiliki 2 terminal, yaitu Terminal Sambu dan Terminal Jalan Bulan. Terminal Sambu merupakan terminal yang

lebih besar dibandingkan dengan Terminal Jalan Bulan, merupakan terminal bus kota (sudaco) yang menghubungkan kota dengan wilayah di berbagai penjuru Kodya Medan. Setiap hari terminal ini dimasuki lebih dari 3000 buah kendaraan umum.

Sekilas terminal ini terlihat penuh dengan sudaco yang berjajar menunggu penumpang, yang panjangnya kurang lebih 200 meter dan lebar 30 meter. Sedangkan Terminal Jalan Bulan dikhususkan untuk jenis kendaraan besar dan angkutan jenis toyota kijang serta angkutan lain yang bukan sudaco. Untuk area perparkiran di Kelurahan Pusat Pasar dan sekitarnya telah disediakan lokasi di dekat pusat pasar dan sentral pasar yang letaknya bersebelahan.

### 3) Pasar dan pertokoan

Sesuai dengan namanya, sudah dapat dipastikan wilayah ini merupakan pusat perdagangan dan perbelanjaan. Pusat Pasar dapat diklasifikasikan sebagai pasar kelas I-A. Dengan tipe ini Pusat Pasar merupakan pasar yang paling besar dan aktifitas perdagangannya juga cukup tinggi.

Ditinjau dari bangunan fisiknya, pasar ini memiliki bangunan permanen yang berlantai tiga. Lantai pertama diperuntukkan bagi beberapa jenis dagangan, seperti keperluan dapur, barang pecah belah dan kain dengan kategori *stand*. Lantai dua merupakan kios untuk dagangan sayur dan ikan kering, sedangkan lantai tiga umumnya tempat penjualan kain dan penjahit pakaian.

Pertokoan umumnya memanjang menyusuri jalan di muka dan belakang pasar yang berbaris menyusuri jalan raya dan berfungsi ganda baik sebagai tempat pemukiman (biasanya di lantai dua dan bagian belakang toko), serta barang dagangan dipajang/diletakkan di ruang depan.

Umumnya pertokoan di Kelurahan Pusat Pasar ditempati oleh etnis Cina dan sedikit penduduk pribumi (etnis Batak). Pertokoan ini berbentuk rumah toko (*ruko*) berjumlah 3691 buah.

#### 4) Sarana hiburan

Kelurahan Pusat Pasar memiliki 2 gedung bioskop yang terletak di persimpangan Jalan Sutomo dengan Jalan Pandu, yang memutar film-film dalam dan luar negeri. Pemutaran film umumnya dilakukan pada sore dan malam hari serta pada siang hari (untuk film-film extra show).

Selain gedung bioskop, di kelurahan ini juga terdapat sarana hiburan lainnya berupa sebuah fitness, 3 gedung bilyard, hotel dan losmen serta plaza yang menyediakan sarana hiburan bagi anak-anak.

#### **2.2.2.3 Penduduk**

Kelurahan Pusat Pasar yang luasnya 0,40 km<sup>2</sup> didiami oleh 6290 jiwa yang terdiri dari 1318 kepala keluarga dengan komposisi 3142 jiwa laki-laki dan 3148 jiwa perempuan. Adapun suku bangsa yang berdomisili di kelurahan ini meliputi suku bangsa Jawa, Minangkabau, Aceh, Nias, Melayu, Batak dan Cina. Sedangkan berdasarkan status kewarganegaraan, penduduk kelurahan ini mayoritas WNI keturunan Cina, yakni sebanyak 5167 jiwa sedangkan penduduk pribumi sebanyak 972 jiwa dan warga negara asing sebanyak 151 jiwa.

Bi'a ditinjau dari struktur umur, penduduk di kelurahan ini terdiri dari kelompok umur yang produktif/pekerja yaitu antara 25-55 tahun sebanyak 2497 jiwa dan usia anak-anak antara 7-12 tahun sebanyak 1232 jiwa (tabel II.10)

Mobilitas penduduk Kelurahan Pusat Pasar termasuk tinggi. Data yang diperoleh dari kelurahan tahun 1991 menyebutkan penduduk yang pindah sebanyak 66 orang, penduduk yang masuk sebanyak 71 orang, penduduk yang lahir sebanyak 29 orang dan yang meninggal sebanyak 15 orang.

Menurut agama yang dianut, mayoritas penduduk Kelurahan Pusat Pasar beragama Budha, yakni sebanyak 4040 jiwa, pemeluk Agama Islam sebanyak 1254 orang, Agama Kristen Protestan sebanyak 198 orang,

Katolik sebanyak 624 orang dan Agama Hindu sebanyak 38 orang.

#### **2.2.2.4 Sosial Budaya**

Kehidupan sosial budaya di kelurahan ini sangat terbatas, ini dikarenakan daerah ini merupakan pusat perdagangan yang setiap hari sibuk dengan usahanya. Kegiatan sosial keagamaan lebih dominan dilaksanakan di rumah masing-masing, terutama WNI keturunan Cina. Adapun sarana peribadatan yang ada meliputi 2 buah mesjid, 2 buah musholla dan 3 buah gereja.

Sarana pendidikan yang ada di kelurahan ini meliputi sebuah SD negeri, sebuah SMP dan sebuah SMA. Selain itu juga terdapat sekolah swasta baik TK, SD, SMP, SMA, SLB maupun kursus keterampilan.

Untuk sarana kesehatan di kelurahan ini terdapat satu rumah sakit swasta, satu rumah sakit bersalin. Disamping itu juga terdapat poliklinik, laboratorium kesehatan, posyandu, panti pijat, Apotik serta 14 tempat praktek dokter.

### **2.3. Berbagai Permasalahan Kodya Medan**

Sebagaimana kota-kota besar lainnya di Indonesia, Kodya Medan memiliki berbagai permasalahan yang cukup dilematis. Sebagai pusat perdagangan, industri, pemerintahan maka Medan menjadi daerah tujuan penduduk dari pinggiran/desa. Dengan mengalirnya penduduk menuju daerah perkotaan menimbulkan banyak masalah baik dalam penyediaan lapangan kerja, daya dukung lingkungan dan permasalahan lainnya yang sukar dicari penyelesaiannya.

#### **2.3.1. Disiplin Terhadap Aturan Sosial**

Untuk dapat mengatur dan mengendalikan kehidupan masyarakat di daerah perkotaan dibutuhkan aturan-aturan yang jelas dan tegas agar

kepentingan dan kebutuhan orang lain dapat terjamin dengan baik. Kawajiban dan ketentuan yang ada harus dipatuhi setiap warga untuk menjaga ketertiban dan keharmonisan sosial.

Kodya Medan memiliki aturan-aturan berupa Peraturan Daerah (Perda), seperti peraturan tentang pengelolaan terminal dan perparkiran guna menghindari kesemrawutan lalu lintas dan angkutan penumpang. Sedangkan peraturan tentang pengelolaan pasar serta pengawasannya dibuat agar kebutuhan dan kepentingan pedagang dapat lebih terjamin sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku. Disamping itu juga ada peraturan tentang hiburan dan sarana pendukungnya yang bertujuan agar tidak mengganggu lingkungan sekitarnya.

Mengenai administrasi pemerintahan, terutama pelayanan administrasi kepada masyarakat seperti surat keterangan Kartu Tanda Penduduk dan pelayanan lainnya telah ditata sedemikian rupa agar lebih efektif dan efisien sesuai peraturan dan perundang-undangan yang berlaku. Menyangkut partisipasi masyarakat dalam kegiatan gotong-royong membersihkan lingkungan dan pekarangan di masing-masing kelurahan, telah dikeluarkan Instruksi Camat dan Lurah di wilayah masing-masing.

Untuk mengetahui tingkat disiplin dalam aturan-aturan tertulis maupun tidak tertulis umumnya dikenakan sanksi bagi masyarakat yang tidak mengindahkannya, seperti kewajiban membayar pajak, retribusi dan lain-lain.

### **2.3.2. Berbagai Permasalahan Yang Terdapat di Kodya Medan**

Permasalahan Kodya Medan yang cukup pelik dan dilematis meliputi berbagai faktor kehidupan masyarakat antara lain :

- 1) Kebersihan di tempat pemukiman dan lingkungan pasar.

Masalah kebersihan merupakan masalah yang sulit untuk ditangani

dan dikendalikan karena sikap mental yang belum mendukung budaya bersih sehingga di beberapa tempat sampah berserakan dan bertumpuk. Meskipun PD. Kebersihan telah berusaha mengangkut sampah di lingkungan pemukiman dan pasar-pasar, namun masalah kawasan bebas sampah belum sepenuhnya dapat diatasi.

## 2) Kesemrawutan lalu lintas.

Pihak MUDP dan MUTP saat ini sedang melaksanakan pembangunan jalan, drainage dan saluran yang mengakibatkan beberapa ruas jalan tidak dapat atau sulit dilalui. Kesemrawutan lalu lintas terutama terjadi di jalan protokol pada waktu sibuk, seperti jalan SM. Raja, Gatot Subroto, Prof. Moh. Yamin, dan lain-lain. Hal ini disebabkan kurangnya disiplin masyarakat dalam berlalu lintas masih rendah, disamping banyaknya jalan yang ditutup untuk pembangunan jalan dan drainage.

## 3) Pengelolaan terminal

Beberapa terminal besar di Kodya Medan meliputi Terminal Terpadu Amplas, Terminal Terpadu Pinang Baris, Terminal Sambu dan Terminal Taksi Teladan. Pengelolaan terminal-terminal ini menimbulkan kesan kurang baik, terutama berkaitan dengan kedisiplinan pengemudi bus antar kota maupun bus kota (sudaco) yang enggan memasuki terminal sesuai jalur yang disediakan.

## 4 Sarana air bersih, kondisi jalan dan prasarana lain.

Penyediaan air bersih di Kodya Medan belum dapat diatasi sepenuhnya, disebabkan kapasitas air yang sangat terbatas, disamping kurangnya kemampuan masyarakat untuk menjadi pelanggan. Sebagai gantinya masyarakat masih menggunakan sungai, sumur, mata air yang kurang layak menurut kesehatan sehingga dapat menimbulkan penyakit.

Mengenai kondisi jalan, dapat dikatakan bahwa sarana jalan-jalan yang ada tidak seimbang dengan kendaraan yang selalu mengalami penambahan yang pesat.

#### 5) Pemukiman kumuh

Penduduk Kota Medan tahun 1992 diperkirakan mencapai 2 juta jiwa. Jumlah penduduk yang cukup besar ini memerlukan tempat tinggal yang banyak pula, baik di pusat kota maupun daerah pinggiran kota. Mengingat daya dukung lingkungan telah melewati batas pemukiman, namun rumah-rumah penduduk terutama golongan bawah mengakibatkan semakin menyempitnya beberapa kawasan. Tahun 1992 Pemda Medan telah berupaya menangani perbaikan kampung/pemukiman yang dianggap kumuh melalui Kampung Improvement Project (KIP) di beberapa kelurahan untuk lebih meningkatkan lingkungan pemukiman dan perumahan penduduk.

#### 6) Terbatasnya lapangan kerja

Pertambahan angkatan kerja yang terus meningkat tidak seimbang dengan lapangan kerja yang tersedia. Data yang diperoleh dari Kantor Departemen Tenaga Kerja menyebutkan bahwa setiap tahunnya jumlah pencari kerja yang mendaftarkan diri di kantor ini lebih dari 2000 orang, berasal dari berbagai jenjang pendidikan.

Pengalaman menunjukkan bahwa setiap ada penerimaan pegawai di beberapa instansi pemerintah selalu dipenuhi pencari kerja, yang kadang-kadang menimbulkan hal-hal yang tidak diinginkan. Sekalipun lapangan kerja pada sektor swasta terbuka lebar, tetapi keinginan masyarakat untuk menjadi pegawai negeri masih tinggi

**TABEL 1****CURAH HUJAN DAN BANYAKNYA HARI HUJAN  
DI KODYA MEDAN TAHUN 1990**

STASIUN BULAN	SAMPALI		POLONIA		KETERANGAN
	CH (mm)	HH	CH (mm)	HH	
Januari	133,4	10	87,6	13	CH : Curah Hujan HH : Hari setiap bulan
Februari	91,5	10	166,0	17	
Maret	122,3	4	51,2	12	
April	28,1	3	99,1	12	
Mei	180	12	207,9	19	
Juni	72,9	13	76,2	18	
Juli	98,9	11	186,2	21	
Agustus	90,4	8	111,3	12	
September	325,3	19	398,8	24	
Oktober	287,2	23	382,9	28	
November	339,9	16	333,3	24	
Desember	166,3	12	135,9	22	
Jumlah	1936,2	141	2236,1	223	

Sumber : **Lembaga Meteorologi dan Geofisika Sampali Medan  
Tahun 1990**

**TABEL 2****JUMLAH PASAR MENURUT KECAMATAN  
DI KODYA MEDAN TAHUN 1990**

Kecamatan	Banyaknya Pasar	Luas Areal Pasar (m <sup>2</sup> )	Jumlah Pedagang	
			Pribumi	Non Pribumi
Medan Tuntungan	1	3.500	-	-
Medan Johor	2	9.000	30	-
Medan Denai	2	6.900	606	45
Medan Kota	21	101.029	5.070	3.271
Medan Baru	4	21.796	1.282	872
Medan Sunggal	4	14.695	931	28
Medan Barat	9	41.524	2.285	923
Medan Timur	3	7.110	653	373
Medan Deli	1	900	51	4
Medan Labuhan	3	6.440	207	42
Medan Belawan	3	7.398	793	98
Jumlah	53	220.288	11.913	5.656

Sumber : **Kantor Statistik Kodya Medan Tahun 1990**

**TABEL 3**

**LUAS, JUMLAH DESA DAN RUMAH TANGGA  
JUMLAH PENDUDUK DAN KEPADATAN  
PER-KECAMATAN DI KODYA MEDAN  
TAHUN 1990**

Kecamatan	Luas (Km <sup>2</sup> )	Banyak			
		Desa	Rumah Tangga	Penduduk	Kepadatan Penduduk (Jiwa/Km <sup>2</sup> )
Medan Tuntungan	30	11	11.260	59.555	1.985
Medan Johor	28	11	30.318	159.382	5.692
Medan Denai	18	14	42.584	232.775	12.932
Medan Kota	10	26	41.594	228.428	22.843
Medan Baru	18	18	30.809	159.565	8.865
Medan Sunggal	29	14	39.529	211.318	7.287
Medan Barat	11	13	31.443	167.154	7.287
Medan Timur	12	18	41.090	214.023	17.835
Medan Deli	21	6	20.394	108.082	5.147
Medan Labuhan	78	7	20.030	106.579	1.366
Medan Belawan	70	6	15.033	83.891	8.389
<b>Jumlah</b>	<b>265</b>	<b>144</b>	<b>324.084</b>	<b>1.730.752</b>	<b>96.531</b>

Sumber : Kantor Statistik Kodya Medan Tahun 1990.

**TABEL 4**

**JUMLAH PENDUDUK MENURUT JENIS KELAMIN  
PER-KECAMATAN DI KODYA MEDAN  
TAHUN 1990**

Kecamatan	Jenis Kelamin		Jumlah
	Laki-laki	Perempuan	Jiwa
Medan Tuntungan	29.798	29.557	59.555
Medan Johor	80.376	79.006	159.382
Medan Denai	118.068	114.707	232.775
Medan Kota	113.355	115.073	228.428
Medan Baru	78.499	81.066	159.565
Medan Sunggal	106.018	105.300	211.318
Medan Barat	81.956	85.193	167.154
Medan Timur	106.160	107.863	214.023
Medan Deli	53.251	54.831	108.082
Medan Labuhan	54.596	51.983	106.579
Medan Belawan	42.348	42.507	83.891
Jumlah	866.241	864.511	1.730.752

Sumber : Kodya Medan Dalam Angka Tahun 1990.

**TABEL 5**

**JUMLAH PENDUDUK MENURUT KELOMPOK UMUR  
PER-KECAMATAN DI KODYA MEDAN  
TAHUN 1990**

Kecamatan	Kelompok Umur				Jumlah	
	0 - 14		15 Ke atas		(Jiwa)	
	Lk - lk	Pr	Lk - lk	Pr	Lk - lk	Pr
Md. Tuntungan	15.878	15.187	14.120	14.370	29.998	29.557
Md. Johor	31.438	30.285	48.938	48.721	80.376	79.006
Md. Denai	45.175	44.690	72.893	70.017	118.068	114.707
Md. Kota	33.227	34.221	80.128	80.852	113.355	115.073
Md. Baru	36.110	40.887	42.398	40.189	78.499	81.066
Md. Sunggal	53.742	52.715	52.276	52.585	106.160	105.300
Md. Barat	39.918	42.272	42.038	42.128	81.956	85.198
Md. Timur	40.637	42.108	65.523	65.755	106.160	107.863
Md. Deli	19.910	19.105	34.921	34.146	53.251	54.831
Md. Labuhan	24.699	25.397	29.897	26.586	54.296	51.983
Md. Belawan	21.255	21.129	21.129	20.378	42.384	41.507
<b>Jumlah</b>	<b>361.989</b>	<b>367.986</b>	<b>504.252</b>	<b>496.525</b>	<b>866.241</b>	<b>864.511</b>

Sumber : **Kodya Medan Dalam Angka Tahun 1990.**

**TABEL 6**

**LUAS WILAYAH KELURAHAN TEGALSARI III  
BERDASARKAN LINGKUNGAN  
TAHUN 1991**

Nama Lingkungan	Luas Areal (Ha)	Status Pemilikan (Ha)		
		Desa	Perorangan	Pemerintah
Lingkungan I	2,85	-	2,85	-
Lingkungan II	2,63	-	2,63	-
Lingkungan III	3,60	-	3,60	-
Lingkungan IV	7,04	-	7,04	-
Lingkungan V	5	-	3,40	1,60
Lingkungan VI	3,10	-	3,10	-
Lingkungan VII	8,03	0,30	7,73	-
Lingkungan VIII	2,75	-	2,75	-
Jumlah	35	0,30	33,10	1,60

Sumber : Kantor Lurah Tegalsari III, Tahun 1991

**TABEL 7****JUMLAH PENDUDUK PER-LINGKUNGAN  
DI KELURAHAN TEGAL SARI III  
TAHUN 1991**

Nama Lingkungan	Jumlah KK	Penduduk (Jiwa)	
		Laki-laki	Perempuan
Lingkungan I	163	528	446
Lingkungan II	90	325	304
Lingkungan III	167	640	674
Lingkungan IV	308	737	689
Lingkungan V	326	1.023	1.049
Lingkungan VI	201	537	603
Lingkungan VII	297	919	1.130
Lingkungan VIII	165	358	401
Jumlah	1.712	5.117	5.366

Sumber : Kantor Lurah Tegalsari III, Tahun 1991

**TABEL 8****JUMLAH PENDUDUK MENURUT KELOMPOK UMUR  
PER-LINGKUNGAN DI KELURAHAN TEGALSARI III  
TAHUN 1991**

Nama Lingkungan	Kelompok Umur						
	0 - 4	5 - 9	10-14	15-19	20-24	25-49	50 ke atas
Lingkungan I	58	99	100	122	135	432	98
Lingkungan II	43	78	35	65	51	251	96
Lingkungan III	119	154	139	134	117	563	96
Lingkungan IV	179	188	152	166	193	469	104
Lingkungan V	263	186	137	182	177	1027	100
Lingkungan VI	96	145	149	123	117	470	100
Lingkungan VII	223	157	271	265	201	802	100
Lingkungan VIII	91	65	265	66	47	319	99
Jumlah	1.072	1.172	1.248	1.123	1.038	4.333	793

Sumber : **Monografi Kelurahan Tegalsari Tahun 1991**

**TABEL 9**

**KOMPOSISI MATA PENCAHARIAN PENDUDUK  
KELURAHAN TEGALSARI III  
TAHUN 1991**

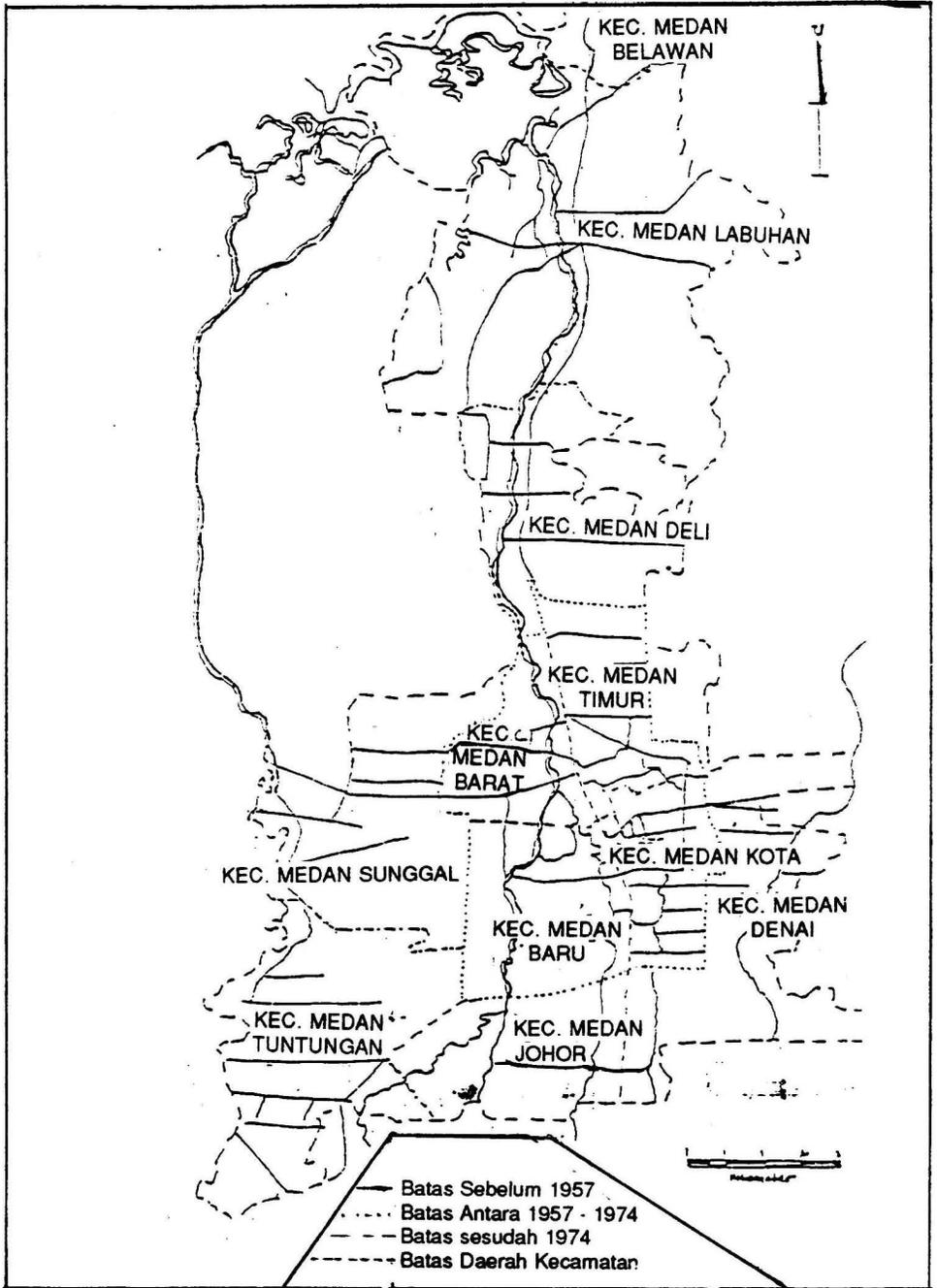
Nama Lingkungan	Mata Pencaharian						
	Peda gang (Org)	Buruh (Org)	Peg. Neg. (Org)	Peg. Swast. (Org)	ABRI (Org)	Pengu saha kecil (Org)	Lain- lain (Org)
Lingkungan I	26	82	17	57	2	227	181
Lingkungan II	19	53	21	42	7	278	62
Lingkungan III	29	87	32	67	8	212	102
Lingkungan IV	27	93	26	53	1	251	119
Lingkungan V	38	96	29	51	-	239	173
Lingkungan VI	21	84	24	51	9	262	127
Lingkungan VII	25	102	43	43	3	237	132
Lingkungan VIII	23	44	22	31	6	285	115
<b>Jumlah</b>	<b>208</b>	<b>641</b>	<b>214</b>	<b>435</b>	<b>36</b>	<b>1.991</b>	<b>1.050</b>

Sumber : **Monografi Kelurahan Tegalsari III, Tahun 1991**

**TABEL 10****KOMPOSISI PENDUDUK KELURAHAN PUSAT PASAR  
MENURUT KELOMPOK UMUR  
TAHUN 1991**

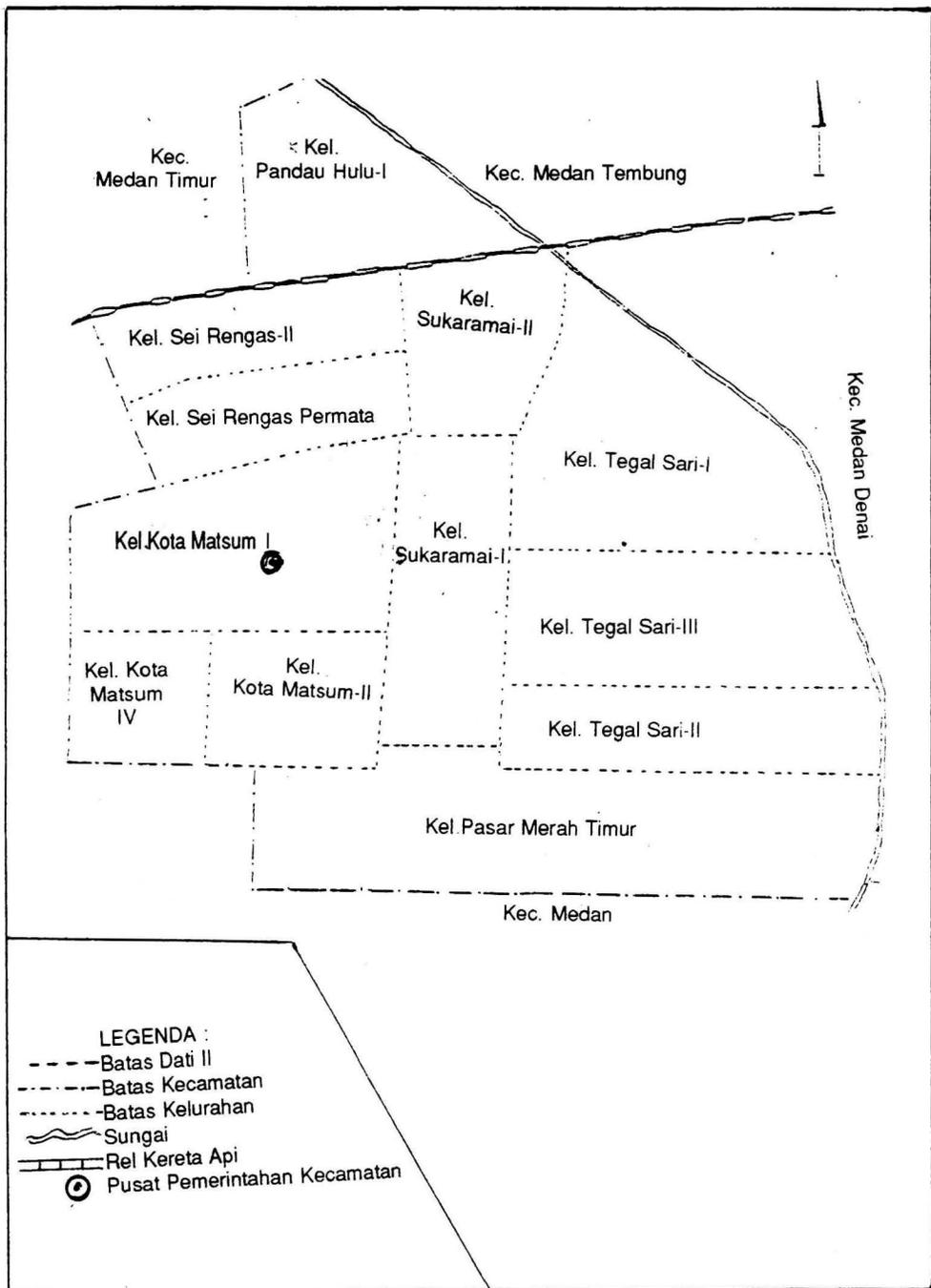
Kelompok Umur	Jumlah Penduduk (Jiwa)	Persentase
0 - 6	912	
7 - 12	1.232	
13 - 18	704	
19 - 24	521	
25 - 55	2.494	
55 - 79	398	
80 - ke atas	29	
Jumlah	6.290	100

Sumber : **Monografi Kelurahan Tegalsari III, Tahun 1991**



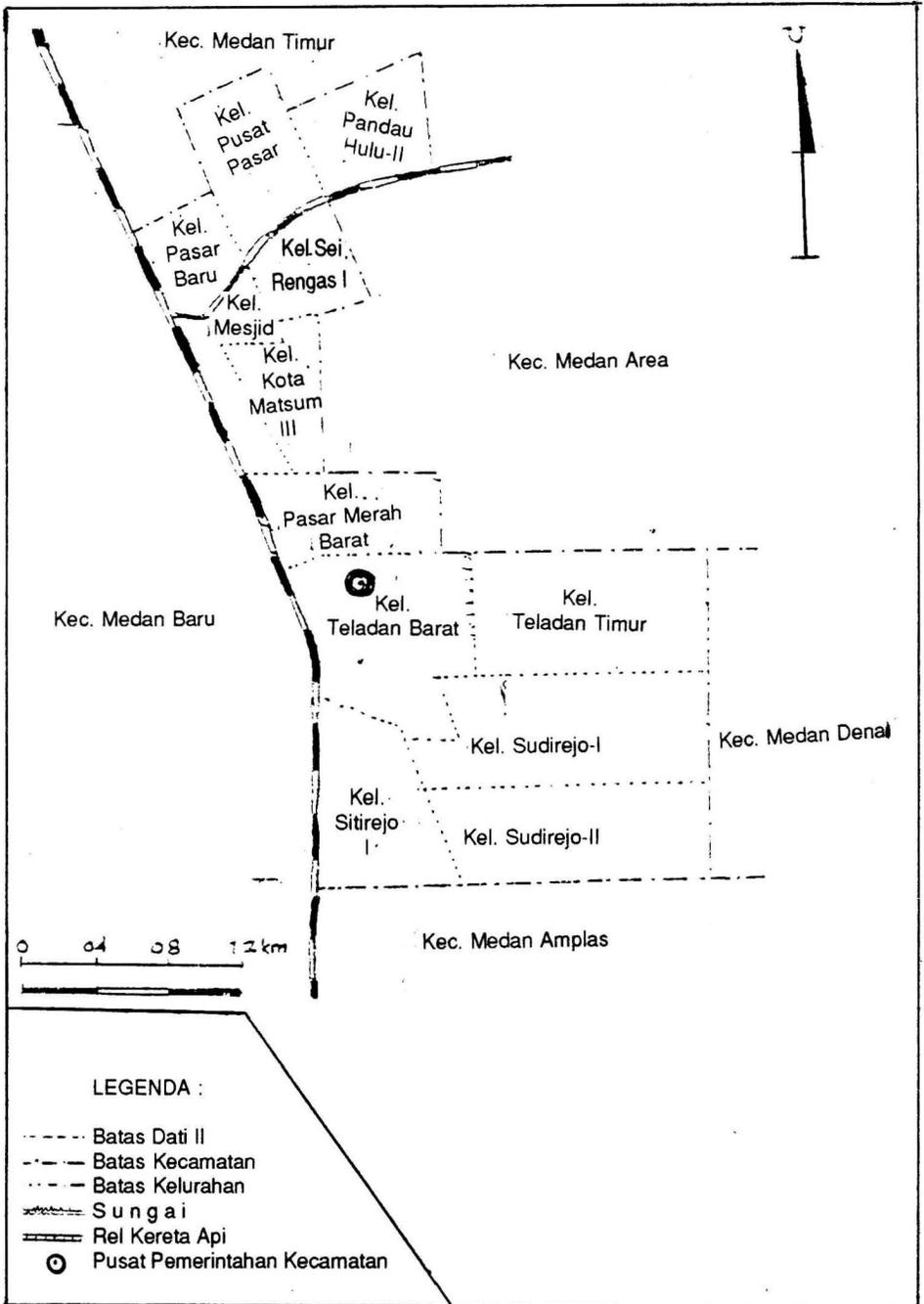
**PETA 1. KOTAMADYA MEDAN**

Sumber : Kantor Dinas Tata Kota Tk. II Kodya Medan 1990

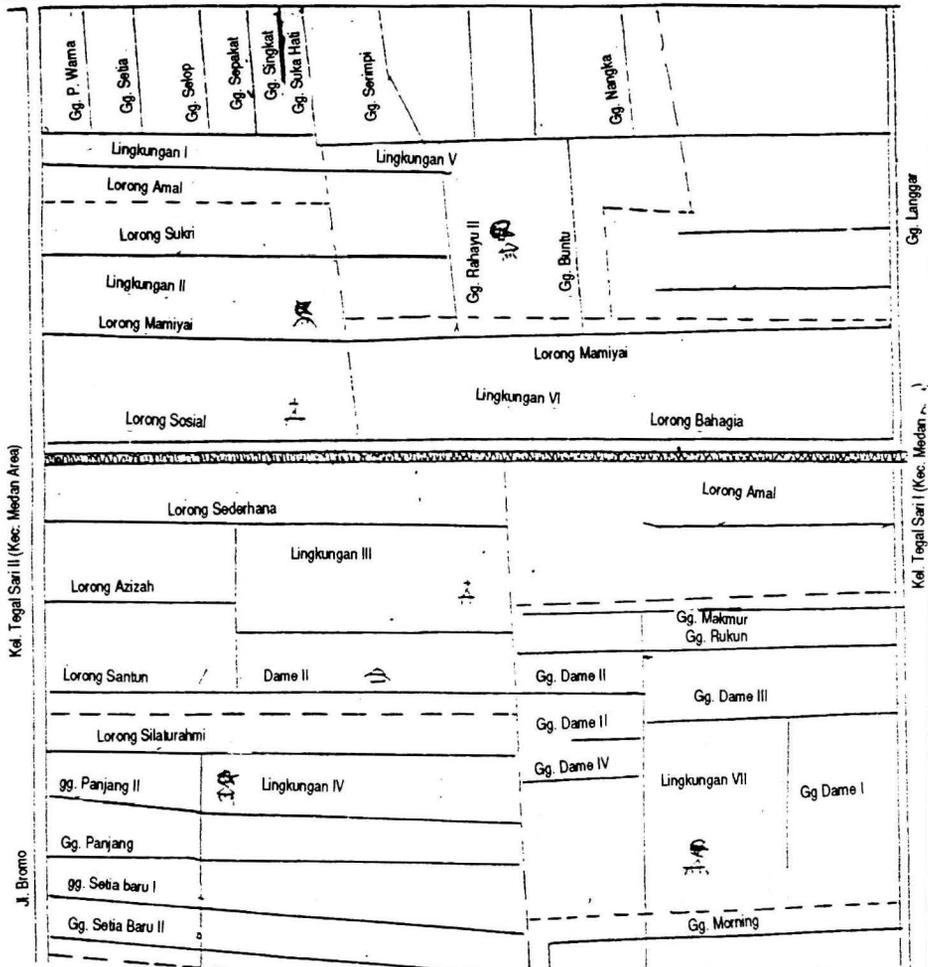


*Peta 2. Kecamatan Medan Area*

*Sumber : Kantor Dinas Tata Kota TK. II Kodya Medan, 1991*



*Peta 3. Kecamatan Medan Kota*  
*Sumber : Kantor Dinas Tata Kota Tk. II Kodya Medan, 1991*

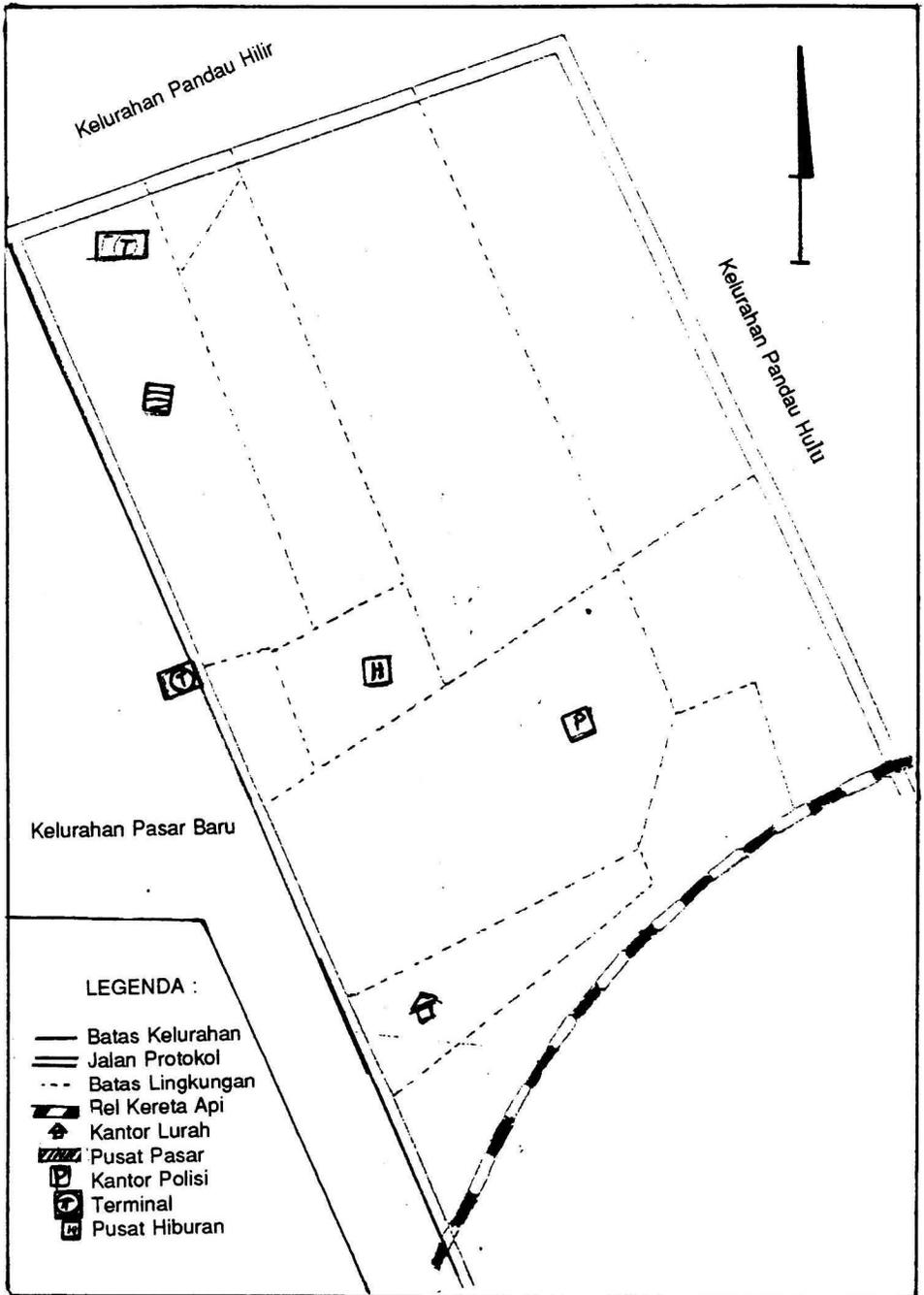


LEGENDA :

- == Jalan Raya
- Batas Lingkungan
- Gang/Lorong
- Kantor Lurah
- Mesjid
- Gereja
- Parit

Kel. Tegal Sari Mandala III  
Kec. Medan Denai

Peta 4. Kelurahan Tegal Sari III  
Sumber : Kantor Kelurahan Tegal Sari III, 1991



*Peta 5. Kelurahan Pusat Pasar.  
 Sumber : Kantor Kelurahan Pusat Pasar, 1991*

### **BAB III**

#### **DISIPLIN MASYARAKAT DI LINGKUNGAN PEMUKIMAN KELURAHAN TEGALSARI III**

Disiplin mengandung pengertian sebagai perkembangan dari pengendalian dan pengarahan diri sendiri (*self control and self direction*). Dalam hal ini individu dapat megarahkan diri sendiri tanpa pengaruh atau pengendalian dari luar. Pengendalian diri berarti menguasai tingkah laku diri sendiri dengan berpedoman pada norma-norma yang jelas, standard-standard dan aturan-aturan yang sudah menjadi milik sendiri. Dalam konteks penelitian ini disiplin yang dimaksudkan adalah disiplin yang dikembangkan dengan menumbuhkan pengertian dan pemahaman akan kesadaran untuk mematuhi segala peraturan dan nilai yang dianut. Walaupun tidak ada yang mengawasi atau yang mengancam dengan sanksi, individu yang bersangkutan akan tetap mematuhi peraturan dan nilai yang berlaku. Dengan pemahaman dan kesadaran untuk mematuhi nilai maupun peraturan yang ada, menunjukkan bahwa individu yang bersangkutan telah memiliki disiplin sendiri.

Disiplin yang diharapkan dapat mendidik masyarakat untuk berperilaku sesuai standard yang ditetapkan kelompoknya harus memiliki

empat unsur pokok, yaitu : (1) peraturan sebagai pedoman perilaku ; (2) konsistensi dalam peraturan tersebut dan cara yang digunakan untuk mengajarkan dan memaksakannya ; (3) hukuman untuk pelanggaran peraturan dan ; (4) penghargaan untuk perilaku yang baik yang sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Dalam penelitian, tingkat kedisiplinan warga masyarakat (patuh, kurang patuh dan tidak patuh) akan dilihat dari respon mereka terhadap peraturan-peraturan dan nilai-nilai yang berlaku, baik tertulis maupun lisan.

### **3.1. Disiplin Dalam Penanganan Limbah Keluarga/Sampah**

Pentingnya menjaga kebersihan merupakan suatu tema universal yang telah ditekankan baik dalam ajaran agama, kebudayaan etnik maupun dalam aturan-aturan formal. Semua agama mengajarkan umatnya untuk hidup bersih (lahir-bathin) dan senantiasa memelihara kebersihan (diri dan lingkungannya. ) Semua kebudayaan etnik juga mengajarkan hal yang sama kepada warganya. Begitu pula dalam kehidupan sosial yang ditata melalui aturan-aturan formal yang dibuat oleh pemerintah, masalah kebersihan tidak diabaikan.

Bagi Kodya Medan telah lama ada satu badan yang khusus menangani masalah kebersihan kota, yaitu Dinas Kebersihan. Untuk menciptakan kebersihan kota, Pemda telah membuat berbagai peraturan dan mengadakan perubahan dan penyesuaian peraturan yang ada agar sesuai dengan tuntutan perkembangan zaman dan tingkat kemajuan zamannya. Misalnya pada tanggal 28 Maret 1988 telah dihasilkan sebuah Peraturan Daerah (Perda) No. 9 tahun 1988 tentang perubahan kedua Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Medan No. 15 tahun 1981 tentang Pengelolaan Kebersihan dan Retribusi Sampah Kotamadya Daerah Tingkat II Medan. Perda tersebut antara lain mengatur dan menyesuaikan klasifikasi/objek wajib retribusi sampah dan tarifnya. Perda no. 9 tahun 1988 itu kemudian disusul dengan keputusan Walikotamadya Kepala

Daerah Tingkat II Medan No. 188.342/741/SK/88 tentang pelaksanaan Perda tersebut.

Kemudian melalui Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Medan No. 2 tahun 1988, status Dinas Kebersihan dirubah menjadi Perusahaan Daerah Kebersihan Kotamadya Daerah Tingkat II Medan, yang selanjutnya disusul dengan keluarnya Keputusan Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II Medan No. 188.342/745/SK/88 yang mengatur pelaksanaannya. Tujuan peningkatan status menjadi Perusahaan Daerah Kebersihan (PD Kebersihan) tersebut, sesuai Pasal 5 Perda tersebut, adalah (1) mewujudkan dan meningkatkan pelayanan umum dalam kebutuhan jasa sarana dan fasilitas di bidang kebersihan, serta (2) sebagai salah satu sumber pendapatan asli daerah.

Bagi warga masyarakat yang berdomisili di lokasi penelitian, pengetahuan tentang berbagai Peraturan Daerah yang mengatur masalah pengelolaan kebersihan tidak dianggap penting. Yang mereka ketahui secara pasti adalah kewajiban yang dibebankan kepada mereka untuk secara rutin membayar biaya retribusi sampah.

Keberadaan PD. Kebersihan mereka ketahui lewat kehadiran petugas berseragam kuning yang sehari-hari mengangkut dan menarik gerobak sampah dari tempat tinggal mereka ke tempat pembuangan sementara yang letaknya bersebelahan dengan pasar Sukaramai. Dari sini sampah diangkut ke tempat pembuangan akhir di luar kota. Kehadiran petugas pengangkut sampah itupun seolah tenggelam dalam keramaian penduduk dan keriuhan aktifitas mereka sehari-hari.

Kelurahan Tegalsari III memiliki 3 gerobak sampah yang dijalankan oleh 6 orang petugas secara bergantian. Fasilitas yang ada ini termasuk minim untuk melayani pembuangan sampah di kelurahan tersebut yang terdiri dari 8 lingkungan. Pada tahun 1991, PD Kebersihan pernah mendistribusikan tong sampah kepada penduduk kelurahan ini. Tempat sampah yang terbuat dari plastik tersebut tidak bertahan lama. Ketika penelitian ini dilakukan sebagian besar rumah tangga tidak lagi memilikinya. Masih tampak beberapa tong sampah masih berfungsi walau

kondisinya sudah rusak dan segera akan menjadi sampah pula. Selebihnya, fasilitas pembuangan sampah yang ada milik keluarga yang dibuat sendiri. Dan di dua lingkungan dari delapan lingkungan yang ada masih terlihat adanya bak-bak sampah terbuat dari bangunan semen yang juga masih dimanfaatkan warga sebagai tempat membuang sampah. Namun demikian, tata letaknya cukup berjauhan satu sama lain, sehingga warga tidak selalu memanfaatkannya secara maksimal.

Kelurahan Tegalsari II dilalui oleh sebuah parit besar, yang oleh penduduk sering disebut "Parit Busuk". Parit besar ini membentang dari arah selatan yang memisahkan Lingkungan II dan VI dengan lingkungan III dan VII. Lebar parit kurang lebih dua meter dengan ketinggiannya 1,5 meter. Parit Busuk ini berfungsi sebagai penampung limbah dari rumah-rumah penduduk, khususnya yang ada di ke-empat lingkungan tadi. Sementara itu rumah-rumah penduduk yang ada di sisi timur kelurahan ini menyalurkan air limbah rumah tangga ke parit besar yang bersisian dengan jalan Bromo. Air buangan dari parit di Jalan Bromo ini kemudian masuk ke jalur Parit Busuk tadi untuk selanjutnya mengalir ke arah utara sambil menampung limbah-limbah dari kelurahan lain.

Parit besar yang bersisian dengan Jalan Bromo merupakan bagian dari Proyek MUDP (Medan Urban Development Project) dan cukup bermanfaat dalam menyalurkan air limbah dan air genangan pada musim hujan. Di sebelah utara, tepatnya di Gang Langgar, bangunan yang sama tidak ditemukan. Yang ada hanya parit kecil berupa selokan yang sering tersumbat, selokan ini juga bermuara ke Parit Busuk di tengah-tengah kelurahan.

Satu kondisi objektif lain yang terdapat di kelurahan ini ialah kenyataan topografis tanahnya yang tergolong datar. Bahkan di beberapa bagian terlihat bahwa jalur Parit Busuk yang seharusnya berfungsi untuk menampung saluran pembuangan limbah dari rumah-rumah penduduk justru lebih tinggi dari pada bagian lainnya. Hal ini mengakibatkan air tergenang di halaman-halaman rumah penduduk yang berada di tempat terendah. Selama musim hujan pemandangan ini sangat jelas terlihat

terutama di Lingkungan VIII dan sebagian di Lingkungan VII yang bersisian dengan Gang Langgar, khususnya antara bulan September-November. Ketika penelitian ini berlangsung kebetulah sedang musim hujan, sehingga pengamatan mengenai kondisi tadi jelas terlihat.

Sisi Parit Busuk yang merupakan tanah kosong dan ditumbuhi semak difungsikan oleh warga sebagai tempat menumpuk sampah. Dan sampah yang terdapat di sini tidak menjadi "urusan" petugas kebersihan dari PD. Kebersihan, sehingga pada akhirnya sampah-sampah tersebut membusuk dan sebagiannya hanyut oleh aliran air parit. Di musim kemarau, ketika volume air parit menurun, sampah-sampah yang dibuang di aliran air parit ini menambah persoalan lagi, akibatnya air parit menggenang dan tidak mengalir dengan lancar. Akibatnya akan mengeluarkan aroma yang tidak sedap, yaitu bau busuk. Dan penamaan parit besar tersebut dengan Parit Busuk sesuai dengan kondisi yang disandangnya.

Suatu pemandangan yang juga banyak ditemukan di lingkungan lokasi penelitian ini ialah pemanfaatan tanah-tanah kosong sebagai tempat pembuangan sampah. Contoh yang cukup jelas terlihat di Gang Santun (Lingkungan III) yang memiliki tanah kosong sekitar dua puluh meter dari kantor kelurahan tanahnya lembab dan sering tergenang air. Di sini penduduk membuang sampah rumah tangganya.

Hal serupa juga ditemukan di lingkungan lainnya. Di lingkungan II, tepatnya di Lorong Mamiyai, sampah bahkan ditumpukkan di pinggir jalan (tanpa bak sampah). Tempat membuang sampah ini tepat berada di depan halaman sebuah perguruan yang memiliki murid cukup banyak. Murid-murid ini ikut memberikan kontribusi bagi penumpukan sampah di depan gedung sekolahnya. Hanya bedanya dengan sampah-sampah di tanah kosong yang lain, sampah di tempat ini dipungut oleh petugas kebersihan dengan gerobak sampah.

Penggunaan tanah kosong sebagai tempat pembuangan sampah, meskipun banyak dijumpai, tetapi tidak seluruhnya mendapat izin. Hal ini terlihat dari sebuah plakat yang dipancangkan di sebuah lokasi pembuangan sampah yang memanfaatkan pekarangan kosong di kawasan

lingkungan II. Di sana tercantum kalimat "Dilarang membuang sampah di sini". Setelah diberikan himbauan maka tempat tersebut kemudian bebas dari sampah, padahal tidak ada ancaman berupa sanksi dan tidak ada seorangpun yang mengontrol.

Adapun jenis sampah yang paling banyak diproduksi warga adalah sampah dapur berupa sisa makanan, kertas/plastik bekas pembungkus, benda-benda rusak dan sampah pekarangan berupa rerumputan.

Rumah tangga yang memiliki tong sampah berlabel PD. Kebersihan merupakan tempat pertama dalam meletakkan sampah, Bagi rumah tangga yang mampu, biasanya membuang sampah di bak sampah yang mereka buat sendiri di depan rumah. Sebagian warga yang tidak memiliki fasilitas pembuangan sampah dalam bentuk apapun, biasanya menumpang bak sampah tetangga merupakan alternatif yang disukai disamping membuang sampah di gerobak sampah ketika petugas kebersihan lewat. Selain itu, pekarangan kosong atau parit menjadi pilihan yang lazim, terutama bagi warga yang di lingkungannya, dan tetangganya, tidak terdapat bak sampah.

Tidak semua perilaku membuang sampah yang tidak pada tempatnya merupakan gambaran ketidak-disiplinan warga terhadap "aturan" yang ada. Karena diantara mereka yang membuang sampah di pekarangan kosong itu umpamanya, pada waktu-waktu tertentu melakukan pembakaran sampah. Namun demikian, ada pula warga yang cukup dan merasa pantas hanya dengan menumpang membuang sampah ke bak sampah tetangga tanpa pernah sekalipun membakarnya. Ada kesan yang kuat di kalangan warga bahwa setelah sampah sampai di tempatnya (di bak sampah) yang tersedia, selesailah urusannya, sedangkan urusan selanjutnya menjadi tanggung jawab petugas kebersihan yang memang digaji untuk itu, karena setiap bulan warga dikenakan biaya sampah.

Adanya perilaku warga yang membuang sampah di luar tempat-tempat resmi, juga belum bisa diartikan bahwa mereka tidak mematuhi aturan pembuangan sampah yang berlaku karena menurut pengakuan warga, dan ini juga diperkuat oleh penjelasan petugas di kelurahan,

sebenarnya tidak ada aturan formal berikut sanksi pelanggaran yang diberlakukan terhadap warga dalam hal pembuangan sampah. Yang ada ialah aturan atau ketentuan yang mewajibkan warga ikut melaksanakan gotong-royong membersihkan lingkungan yang ada setiap hari Minggu. Kegiatan gotong-royong tiap minggu ini merupakan instruksi dari kantor kecamatan (Kecamatan Medan Area) yang pelaksanaannya dipantau secara rutin melalui laporan para lurah dan staf kantor kecamatan yang ditugaskan mengkoordinir pelaksanaan gotong-royong di setiap kelurahan. Gerakan massal ini dimulai pada awal tahun 1992. Di kelurahan Tegalsari III, kegiatan gotong royong dalam rangka menjaga kebersihan tersebut sudah menjadi agenda rutin, yang dibicarakan pada pertemuan (rapat dinas) para Kepling (Kepala Lingkungan) setiap hari Sabtu.

Secara teoritis warga yang tidak mengikuti kegiatan gotong-royong tersebut dikenakan sanksi, sebagai berikut : pertama, diberikan peringatan secara lisan (oleh Kepling dimana warga yang bersangkutan tinggal). Kedua, diberikan peringatan tertulis sebanyak tiga kali (peringatan I, II dan III), apabila warga yang bersangkutan tidak juga mengikuti kegiatan yang dilaksanakan tanpa alasan yang jelas. Ketiga, jika warga yang bersangkutan tidak mengindahkan juga peringatan yang diberikan, maka dia dilaporkan ke instansi terkait yang lebih tinggi (termasuk kepada polisi). Runtunan sanksi yang dijadikan ancaman untuk setiap pelanggaran terhadap aturan itu terlihat cukup longgar dan kompromistis. Namun menurut catatan kantor kelurahan, belum pernah terjadi seorang warga harus diberikan peringatan tertulis atas pembangkangannya terhadap aturan gotong royong kebersihan tadi.

Kegiatan gotong royong kebersihan lingkungan masih menjadi alternatif yang prospektif untuk memelihara kebersihan lingkungan pemukiman. Dan kegiatan ini menyerap segenap lapisan warga yang potensial untuk berpartisipasi. Dari jawaban kuesioner tergambar bahwa kegiatan gotong royong ini diikuti oleh pemuda (22, pemuda dan orang tua (41 %), maupun warga yang potensial (37 %). Frekuensi pelaksanaan gotong royong di Kelurahan Tegalsari tergambar dari jawaban responden : 3 % responden

mengatakan bahwa kegiatan gotong royong dilakukan 4 kali dalam sebulan; 19 % mengatakan 2 kali sebulan; 34 % menjawab 1 kali sebulan dan 44 % mengatakan tidak tentu.

Selain kegiatan yang dikordinir langsung oleh staf kantor kelurahan, gotong royong kebersihan lingkungan kadang kala digerakan oleh organisasi pemuda (Pemuda Pancasila) yang ada di kelurahan. Mereka menggerakkan massa pemuda dan warga lainnya untuk membersihkan selokan dan atau parit buangan air limbah dan membersihkan lingkungan pekarangan dan tempat-tempat umum lainnya. Sementara itu, kegiatan gotong royong yang dikordinir oleh Staf Kantor Kelurahan yang dibantu oleh para Kepling, biasanya diutamakan untuk membersihkan lingkungannya sendiri. Dan para pesertanya juga terbatas dari penduduk lingkungan itu sendiri. Mereka membersihkan pekarangannya sendiri dan tempat-tempat umum (seperti jalan) yang terdapat di depan rumahnya masing-masing. Pada kenyataannya, kegiatan demikian adalah gerakan masal membersihkan pekarangannya sendiri yang dilakukan pada waktu bersamaan.

Dari uraian di atas, terlihat bahwa warga berperilaku responsif secara positif terhadap kegiatan pemeliharaan kebersihan apabila diiringi dengan gerakan yang bersifat massal, atau yang melibatkan sebagian besar warga. Situasi kebersamaan yang diciptakan dengan adanya semacam *moral enforcement*, yaitu kekuatan memaksa yang mendorong orang merasa segan bila tidak ikut berpartisipasi, masih dominan sebagai alasan mengapa mereka terlibat dan berpartisipasi dalam gerakan kebersihan lingkungan. Dengan kata lain, kebutuhan dan kemauan memelihara kebersihan lingkungan pemukiman belum muncul dari kesadaran warganya akan peran dan tanggungjawabnya dalam memelihara kebersihan tadi. Ada warga yang aktif mengikuti kegiatan gotong royong yang dikordinir oleh Kepling atau organisasi pemuda, misalnya lebih merupakan usahanya memelihara jarak sosial dengan warga yang lain. Dengan perilaku yang demikian, warga ini memiliki pamrih untuk tidak dikucilkan dari pergaulan di lingkungannya. Jika demikian, dengan

mengendurnya gerakan yang bersifat *moral enforcement* tadi, upaya pemeliharaan kebersihan lingkungan pemukiman terpulang kepada tingkat kesadaran warga secara individual.

Hak yang disebut terakhir ini dapat digambarkan pada kasus yang pernah terjadi di Lingkungan I menjelang Pemilu lalu. Menurut penuturan Kepala Lingkungannya, Lingkungan I mendapat penghargaan sebagai Lingkungan Terbersih pada waktu menjelang Pemilu itu. Suasana yang kompetitif untuk mencapai status terhormat Lingkungan Terbersih secara tidak sengaja tercipta di Lingkungan I sendiri, yaitu manakala dua poros kekuatan sosial politik yang menanamkan pengaruhnya untuk merebut simpati warga di kelurahan ini. Melalui isu kebersihan lingkungan pemukiman, kedua kekuatan sosial politik itu berhasil menggerakkan massa dalam kegiatan-kegiatan kebersihan lingkungan (meskipun dalam suasana kompetitif). Dan secara ril kegiatan itu membawa dampak positif terhadap keadaan kebersihan di lingkungan I tadi, yang kemudian mengantarkannya memperoleh penghargaan sebagaimana disebutkan di atas.

Namun ternyata, masih menurut penuturan Kepling, gerakan tersebut sangat *artificial* sifatnya dan bukan tumbuh dari kesadaran warga sehingga setelah isu politik (yang dimanfaatkan) menjelang Pemilu tadi berakhir dan kehilangan momentum, kondisi kebersihan lingkungan pemukiman kembali ke formatnya semula. Sejauh ini, kecuali melalui gerakan nyata dengan melaksanakan gotong royong massal, upaya-upaya lain yang dilakukan untuk menggugah kesadaran dan kemauan warga dalam memelihara kebersihan lingkungan pemukiman pada umumnya hanya bersifat himbuan dan anjuran, baik dilakukan oleh aparat kelurahan, para mubaligh melalui kegiatan-kegiatan pengajian, maupun para ibu-ibu PKK melalui kegiatan-kegiatan mereka. Jika kesadaran dari dalam diri yang diharapkan tumbuh dengan mengejawantahkan pesan moral agama dan atau adat istiadat belum mampu mendorong perilaku warga untuk memelihara kebersihan lingkungannya, kiranya pembakuan aturan formal berikut sanksi atas pelanggarannya dibutuhkan sebagai "alat pemaksa".

Dalam konteks ini, penelitian lapangan memperlihatkan bahwa aturan informal yang dibutuhkan itu belum ada (kecuali yang berkenaan dengan kegiatan gotong royong sebagaimana dikemukakan di atas) secara memadai yang bisa dijadikan patokan atau standar untuk berperilaku.

Dalam komunitas yang cukup heterogen seperti Kelurahan Tegalsari III ini, ajaran moral tentang kebersihan yang baik yang terkandung dalam ajaran agama maupun adat istiadat tampaknya belum cukup kuat untuk dapat berfungsi menggerakkan perilaku warga dalam memelihara kebersihan. Pesan-pesan dan ajaran tentang pentingnya memelihara kebersihan yang dikandung oleh kedua sumber tata nilai tadi masih harus dijabarkan dalam aturan-aturan yang lebih konkrit sebagai pedoman untuk berperilaku. Dan konsistensi terhadap penerapan dan pengaktualisasian aturan itu dalam kehidupan sehari-hari, juga mekanisme penerapan sanksi bagi pelanggarannya harus dipegang oleh suatu kekuasaan yang memiliki otoritas yang diakui oleh masyarakat. Selain itu, dibutuhkan pula penghargaan untuk perilaku yang sesuai dengan aturan.

Kesadaran warga yang masih rendah tentang pentingnya pemeliharaan kebersihan lingkungan pemukiman, bila dihubungkan dengan kenyataan belum terpenuhinya empat unsur pokok disiplin, adalah sesuatu yang wajar terjadi, karena mekanisme formal yang diperlukan untuk tumbuhnya sikap penuh disiplin tidak ada.

### **3.2. Disiplin Dalam Partisipasi Masyarakat Terhadap Kegiatan Sosial**

Kegiatan-kegiatan sosial yang terdapat di Kelurahan Tegalsari III, dapat dibedakan berdasarkan bidang kegiatan dan kelompok sosial yang menjadi anggotanya. Berdasarkan bidang kegiatannya dapat dibedakan atas kegiatan sosial yang berhubungan dengan kehidupan keagamaan, dan kegiatan sosial yang berhubungan dengan kesejahteraan keluarga. Berdasarkan kelompok sosial yang menjadi anggotanya, kegiatan sosial yang terdapat di kelurahan ini dapat dibedakan atas kegiatan sosial yang khusus untuk laki-laki, khusus untuk perempuan, khusus untuk kalangan-

an pemuda, khusus untuk orang-orang dari kelompok etnik tertentu, dan kegiatan sosial yang khusus untuk pemeluk agama tertentu.

Dalam kenyataan kehidupan sehari-hari, berbagai kegiatan sosial tersebut selalu tumpang-tindih, dan anggota-anggotanya juga bisa berpartisipasi dalam berbagai kegiatan sosial yang ada. Perbedaan atau klasifikasi tersebut di atas dibuat hanya untuk memudahkan pemahaman dalam rangka melihat kedisiplinan warga terhadap kegiatan sosial. Dalam prakteknya, kegiatan-kegiatan sosial yang ada tidak terlepas dari keberadaan perkumpulan-perkumpulan atau organisasi sosial yang menjadi wadahnya.

Kegiatan sosial di bidang kehidupan keagamaan misalnya dilakukan dalam bentuk perwiridan-perwiridan dan mengadakan ceramah-ceramah keagamaan. Khusus untuk warga yang menganut agama Islam, ada kelompok-kelompok perwiridan yang biasanya mengadakan kegiatan pada malam Jum'at (untuk kaum bapak) dan hari Jum'at siang (untuk kaum ibu). Kelompok-kelompok perwiridan ini terdapat di semua lingkungan yang ada di Kelurahan Tegalsari III. Seorang warga biasanya menjadi anggota dalam kelompok perwiridan di lingkungannya. Ada juga kelompok perwiridan yang khusus untuk para remaja (putra dan putri).

Pelaksanaan kegiatan perwiridan dilakukan secara bergiliran dari rumah ke rumah para anggota. Pada prinsipnya semua anggota berkewajiban mengikuti acara perwiridan yang dilakukan kelompoknya di manapun kegiatan diadakan, baik di rumah seorang warga yang kaya maupun di rumah seorang anggota yang kehidupan ekonominya sederhana. Tetapi dalam kenyataannya, sesuai dengan pengakuan seorang Kepling, apabila kegiatan perwiridan dilakukan di rumah seorang yang berekonomi kurang mampu, maka anggota yang hadir biasanya lebih sedikit. Sebaliknya, bila yang mengadakan kegiatan perwiridan dan kebetulan anggota yang berekonomi baik, maka anggota yang hadir juga biasanya lebih banyak. Tidak diketahui dengan jelas mengapa hal demikian bisa terjadi yang jelas dalam kegiatan perwiridan itu tidak hanya dilakukan pembacaan *Yaasiin - Tahliil - Tahtim* tetapi sesudahnya biasanya tuan rumah juga menghi-

dangkan makanan ringan.

Meskipun ada peraturan dalam perkumpulan perwiridan itu yang mengharuskan seseorang anggota mengikuti secara rutin kegiatan pengajian yang diadakan, dan bagi yang tidak datang tiga kali berturut-turut tanpa memberikan alasan yang jelas diancam dengan sanksi akan dihentikan sebagai anggota, namun peraturan demikian tidak selalu dipatuhi warga. Penerapan sanksi demikian merupakan hal yang masih berat untuk dilakukan oleh pengurus perkumpulan, karena dasar dari kegiatan itu sendiri adalah bersifat sosial, dan lebih bertujuan untuk merangsang dan menggugah kesadaran warga untuk meningkatkan volume kegiatan-kegiatan keagamaan. Mengikuti kegiatan perwiridan yang diadakan sekali sepekan hanyalah merupakan salah satu wujud partisipasi anggota dalam kelompoknya. Selain itu, seorang anggota biasanya diwajibkan membayar iuran rutin bulanan. Dalam hal ini kepatuhan warga terhadap aturan dalam kegiatan sosial yang cukup baik, Artinya, meskipun seorang anggota perkumpulan perwiridan tidak hadir mengikuti pengajian secara rutin, namun dalam membayar iuran anggota ia akan patuh. Uang yang dikumpulkan melalui kelompok atau perkumpulan demikian biasanya digunakan untuk membeli peralatan yang diperlukan dalam pelaksanaan kegiatan-kegiatan sosialnya, seperti : buku-buku, tenda atau "teratak", dan mikrofon. Di samping itu, karena kelompok perwiridan itu sekaligus juga sebagai organisasi sejenis Syarikat Tolong Menolong (STM), uang iuran anggota juga dibelanjakan untuk menyediakan alat-alat yang diperlukan dalam pelaksanaan penguburan (bila anggota atau kerabatnya ada yang meninggal dunia).

Keikutsertaan dalam sebuah kelompok perwiridan atau Syarikat Tolong Menolong pada gilirannya merupakan semacam "jaminan sosial" bagi anggotanya, karena dia akan memperoleh bantuan dalam bentuk moral, material dan jasa apabila mendapat musibah. Keikutsertaan sebagai anggota perkumpulan merupakan jaminan akan mendapat bantuan dalam pengurusan pemakaman mayat dari anggota keluarganya yang meninggal di rumahnya. Bahkan, ada perkumpulan yang akan

memberikan bantuan keuangan untuk anggota apabila anggota yang bersangkutan harus melayat keluarganya yang meninggal dunia di tempat lain (misalnya di kampung).

Sebenarnya "sanksi sosial" akan diperoleh seorang warga dengan sendirinya apabila dia tidak aktif dalam kegiatan-kegiatan sosial yang diadakan di lingkungannya. Bagi seorang anggota perkumpulan perwiridan yang jarang mengikuti kegiatan rutin mingguan umpamanya, biasanya akan mendapatkan kenyataan bahwa orang yang hadir juga akan lebih sedikit jumlahnya apabila kegiatan perwiridan dilakukan di rumahnya. Demikian juga apabila salah seorang anggota tidak datang pada peristiwa kemalangan yang terjadi di lingkungannya, maka apabila dia mendapat kemalangan yang sama orang lainpun tidak banyak yang datang ke rumahnya.

Selain sebagai anggota perkumpulan Wirid Yaasin dan Syarikat Tolong Menolong, khusus untuk kaum ibu juga ada kegiatan pengajian yang dilakukan pada hari Jum'at. Keanggotaannya juga biasanya perlingkungan. Sedangkan kegiatan dilakukan secara bergiliran dari rumah ke rumah. Aturan permainan dalam kegiatan perwiridan kaum ibu juga hampir sama dengan yang berlaku pada pewiridan kaum bapak. Partisipasi anggotanya juga demikian.

Di samping mengikuti kegiatan-kegiatan sosial yang diadakan oleh perkumpulan-perkumpulan yang berkedudukan di kelurahan sebagian warga penduduk kelurahan ini juga mengikuti perkumpulan-perkumpulan lain yang sifatnya kedaerahan atau berdasarkan kesukuan. Perkumpulan jenis ini antara lain dimiliki oleh mereka yang berasal dari Minangkabau dan Mandailing. Warga masyarakat yang berasal dari etnis Mandailing, misalnya menghimpun diri dalam organisasi yang bernama HIKMA (Himpunan Keluarga Besar Mandailing) dan di Kelurahan Tegalsari III dibentuk satu komisariat. Kegiatan anggotanya juga termasuk dalam bidang keagamaan, sosial dan budaya. Karena kedudukan komisariat ini merupakan bagian dari organisasi yang lebih besar, maka kegiatan yang dilakukan juga banyak yang berorientasi ke luar, dalam arti kegiatannya

dilakukan di luar lingkup kelurahan. Aturan-aturan yang berlaku bagi para anggotanya juga merupakan bagian dari aturan-aturan yang berlaku bagi para anggotanya juga merupakan bagian dari aturan-aturan organisasi keseluruhan. (Organisasi Kemasyarakatan yang bernama HIKMA ini menjangkau seluruh daerah Propinsi Sumatera Utara dan berpusat di Medan.

Kegiatan-kegiatan sosial lain juga dilakukan oleh para pemuda yang berhimpun dalam organisasi Pemuda Pancasila. Mereka kadangkala melakukan kegiatan gotong royong massal untuk membersihkan lingkungan pemukiman kelurahan. Dalam kegiatan sejenis ini, PP merupakan inisiator dan kordinator yang menggerakkan partisipasi warga kelurahan untuk ikut serta bersama-sama melakukan kegiatan gotong-royong. Tidak ada sanksi yang dikenakan kepada warga yang tidak ikut bergotong-royong, namun dalam kenyataannya tidak pernah terjadi warga masyarakat tidak mau mengikuti kegiatan yang dilakukan. Sejauh yang terjadi selama ini, setiap kegiatan gotong-royong yang dilaksanakan di kelurahan atau per-lingkungan, selalu diikuti oleh partisipasi aktif warganya.

Pelaksanaan pesta perkawinan juga merupakan salah satu ajang kegiatan sosial yang lazim terjadi di kelurahan. Namun partisipasi warga terhadap kegiatan seperti ini tidak seaktif pada kegiatan sosial untuk peristiwa kemalangan. Seperti halnya pada peristiwa kemalangan yang terjadi di lingkungan tempat tinggal ada semacam aturan tak tertulis bahwa kita harus menghadirinya tanpa diundang, maka pada peristiwa sukacita (semisal pesta perkawinan ini) juga ada aturan tak tertulis yang menentukan kita akan menghadirinya apabila diundang. Mengenai hal ini warga masyarakat sudah sama memaklumi.

Selain kegiatan pengajian, perwiridan, peristiwa kemalangan, dan pesta perkawinan, di lingkungan kelurahan secara berkala juga ada kegiatan sosial dalam memperingati hari-hari besar keagamaan. Hal seperti ini biasanya dilakukan oleh warga yang beragama Islam. Kegiatan memperingati hari-hari besar keagamaan biasanya juga dilakukan per-

lingkungan atau bersifat menyeluruh untuk kelurahan. Partisipasi warga dalam hal seperti ini biasanya diwujudkan dalam bentuk memberikan bantuan uang (kepada panitia yang ditunjuk), dan keikutsertaan dalam kepanitiaan. Tidak ada sanksi yang dikenakan kepada warga yang tidak mengikuti kegiatan demikian.

Berpartisipasi atau tidak dalam suatu kegiatan sosial di lingkungan tempat tinggal memiliki banyak motif atau alasan yang mendasarinya. Misalnya saja, seorang warga tidak mau ikut berpartisipasi aktif dalam kegiatan perwiridan yang diadakan pada setiap malam Jum'at karena alasan perbedaan paham keagamaan. Atau ada seorang warga tidak mengikuti kegiatan demikian karena tidak pandai membaca Al-Qur'an sehingga merasa malu. Ada yang rajin menghadiri kegiatan perwiridan apabila tuan rumah yang mengadakan orang yang ia kenal dekat, akrab, famili atau orang yang ia segani. Ada anggota yang tidak mau menghadiri kegiatan perwiridan di suatu tempat karena tuan rumah yang mengadakan tidak pernah atau jarang menghadiri kegiatan yang sama. Dan lain-lain.

Berdasarkan uraian di atas, akan muncul prasangka kita untuk berkesimpulan bahwa warga yang mengikuti suatu kegiatan sosial di lingkungannya tidak pernah terlepas dari rasa pamrih, meskipun itu suatu kegiatan yang bersifat keagamaan. Dalam lingkungan masyarakat yang heterogen (dari sudut etnik, agama, tingkat sosial ekonomi, sejarah asal usul, bidang pekerjaan dan lain-lain), seperti di Kelurahan Tegalsari III, memilih lingkungan pergaulan melalui partisipasi dalam berbagai kegiatan sosial yang ada tidak senantiasa mudah dilakukan. Hal ini mudah dipahami mengingat warga yang bertempat tinggal di sini, di samping sangat heterogen, rasa keterikatan terhadap komunitasnya juga belum melembaga.

Dari sampel 100 orang responden yang memberikan jawaban terhadap pertanyaan "sudah berapa lama menetap di kelurahan (Tegalsari III)", 55% mengaku lebih dari 5 tahun, sedangkan 23% antara 3 - 5 tahun, dan antara 1 - 2 tahun ada 14 %, sedangkan kurang dari setahun ada 8 %.

Gambaran di atas bersesuaian dengan “status rumah tempat tinggal” responden, dimana 56% mengaku rumah yang ditempatinya adalah milik sendiri, 33% mengatakan rumah yang ditempatinya disewa/dikontrak dan 11% berstatus menumpang di rumah kerabat.

Menumpang di rumah kerabat, menurut informasi dari seorang Kepling, banyak terdapat di Lingkungan IV yang mayoritas penduduknya adalah etnis Minangkabau. Mereka adalah perantau yang memilih pekerjaan sebagai tukang jahit, tukang sepatu dan kegiatan berdagang kecil-kecilan.

Meskipun penduduk di lingkungan kelurahan ini cukup heterogen, kalau dilihat per-lingkungan penyebaran penduduknya masih mengelompok berdasarkan mayoritas etnik yang menempati. Pengelompokan berdasarkan klasifikasi atau perbedaan status sosial ekonomi memang tidak ada, begitu pula pengelompokan berdasarkan penganut agama. Yang boleh dikatakan menonjol ialah pengelompokan berdasarkan etnik. Misalnya di Lingkungan IV mayoritas penduduk Minang, Lingkungan III suku Mandailing, Lingkungan VI Batak Toba, Lingkungan I suku Jawa dan Lingkungan II heterogen (seperti Minang, Mandailing, Batak Toba, Aceh dan Melayu).

### **3.3. Disiplin Terhadap Administrasi Pemerintah**

Bila kita memasuki gedung kantor kelurahan di Gang Santun, mata kita akan tertumpuk pada pamflet yang menempel di dinding sisi kiri dan kanan pintu masuk, yang berbunyi antara lain “Lunasilah PBB Anda”. Di dinding dalam juga tertempel beberapa pamflet sejenis, dan satu yang cukup menarik tertempel di dinding sebelah kanan ruang tengah kantor itu. Di sana tertulis adanya empat syarat untuk mengurus surat di Kelurahan Tegalsari III, yang harus dipenuhi oleh warga kelurahan, yaitu : (1) Surat Pengantar dari Kepala Lingkungan, (2) Membawa Kartu Rumah Tangga (KRT)/Kartu Tanda Penduduk, (3) Melunasi Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), dan (4) Melunasi Iuran LKMD.

Tanpa dipenuhinya keempat syarat tersebut maka urusan surat menyurat yang diperlukan warga tidak dilayani, sampai sejauh ini, aturan tersebut cukup berwibawa dan selalu dipatuhi oleh warga. Karena warga menyadari bahwa kewenangan berada di pihak pejabat kelurahan, sehingga sikap atau tindakan menyepelekan peraturan tersebut sama artinya dengan mempersulit diri sendiri. Konsekuensinya, surat yang diperlukan tidak akan pernah selesai.

Berkenaan dengan kematian, ada tata-tertib yang harus diikuti oleh setiap warga yang mendapat musibah kematian (misalnya salah seorang anggota keluarganya meninggal dunia) diharuskan melaporkan ke kelurahan atau Kepala Lingkungan untuk mendapatkan surat keterangan tentang kematian tersebut. Menurut pengakuan para Kepala Lingkungan di kelurahan ini, kedisiplinan warga terhadap peraturan ini cukup tinggi, dalam arti kata setiap peristiwa kematian yang terjadi di lingkungan mereka selalu dilaporkan segera ke kelurahan. Namun menurut penuturan mereka juga, sikap disiplin terhadap aturan yang berlaku tersebut bukan murni lahir dari kesadaran dan ketaatan warga terhadap prosedur administratif yang ada. Warga segera melapor kemalangan (kematian) yang terjadi di rumahnya dan meminta surat keterangan dari kantor kelurahan terutama karena surat keterangan tersebut diperlukan dalam proses penguburan. Petugas atau nazir tanah wakaf tempat dimana akan dilakukan penguburan tidak akan melayani warga yang meminta lokasi tempat penguburan apabila kerabat dari orang yang meninggal tidak membawa surat keterangan resmi dari kantor kelurahan. Dan petugas atau nazir tanah wakaf sangat konsiten terhadap aturan ini. Oleh karena itu, mengurus surat keterangan mati menjadi salah satu urusan yang sangat penting diselesaikan oleh kerabat yang meninggal, karena tanpa itu pemakaman mayat di tempat pemakaman umum belum bisa dilaksanakan (kecuali apabila mayat akan dimakamkan di tanah milik keluarga).

Aturan yang sama, yaitu harus melaporkan ke kelurahan, bukan hanya diberlakukan untuk kasus kelahiran. Apabila seorang anak lahir, orang tuanya juga dikenakan ketentuan harus melaporkan hal tersebut

kepada Kepling atau pejabat kelurahan. Namun dalam pelaksanaannya, aturan ini tidak dipatuhi oleh warga sebagaimana mereka mematuhi aturan melaporkan pada peristiwa kematian. Mereka hanya melaporkan itu apabila ada keperluan mengurus surat ke kelurahan yang menyertakan KRT (Kartu Rumah Tangga). Tidak ada sanksi yang dikenakan kepada warga yang tidak mematuhi aturan wajib lapor ini. Dari pihak warga sendiri, sepotong surat keterangan dari bidan, dokter atau rumah sakit dimana anaknya dilahirkan sudah cukup dianggap sebagai keterangan resmi tentang kelahiran anak yang bersangkutan. Hal itulah salah satu alasan yang membuat mereka tidak lagi merasa perlu melaporkan ke kelurahan.

Dalam hal perpindahan tempat tinggal juga berlaku aturan bahwa setiap orang yang akan bertempat tinggal di Kelurahan Tegalsari III harus membawa surat mandah atau surat pindah dari tempat tinggal sebelumnya. Bagi orang yang mau masuk, dan berasal dari kelurahan lain pada kecamatan yang sama, pihak kelurahan cukup meminta surat keterangan dari lurah tempat tinggal asal. Sementara itu bagi orang yang masuk dari luar Kotamadya Medan diperlukan surat pindah yang disahkan oleh Camat di tempat asal. Itulah ketentuan formalnya.

Dalam pelaksanaan, ketentuan tadi tidak diterapkan secara kaku. Seseorang yang bermaksud akan menetap di lingkungan kelurahan (Tegalsari III) biasanya terlebih dahulu bernegosiasi dengan orang yang memiliki rumah (bila ia bermaksud menyewa rumah) baru melaporkan kemudian ke Kepala Lingkungan. Surat-surat formal lainnya diselesaikan kemudian. Hal ini sudah biasa dilakukan, karena biasanya seseorang yang pindah ke suatu kelurahan sudah mempunyai kenalan atau kerabat di sana, sehingga warga baru ini tidak sulit untuk menyakinkan pejabat kelurahan akan kredibilitasnya. Terlebih lagi karena pejabat kelurahan sendiri tidak akan mencurigai calon warganya sebagai orang yang tidak baik.

Mengenai warga yang pindah ke luar, melaporkan ke kelurahan tidak selalu dilakukan, kecuali apabila dia membutuhkan surat keterangan

yang diperlukan di tempat tinggalnya yang baru. Apabila warga yang akan pindah hanya tinggal di kelurahan ini dalam jangka waktu yang pendek, sehingga KTP pun belum dimiliki, melapor tentang kepindahan ke kelurahan dipandang sebagai sesuatu yang tidak penting. Dari 100 orang responden, berkaitan dengan kedisiplinan terhadap administrasi pemerintah, yang selalu melapor hanya 22%, kadang-kadang melapor 7% dan yang menganggap tidak penting 39%.

Tata tertib yang berlaku bagi tamu, tuan rumah diharuskan melaporkan tamunya apabila menginap di rumahnya lebih dari 2 x 24 jam. Tetapi dalam kenyataannya ketentuan ini tidak pernah dilaksanakan secara ketat. Pihak Kepling sendiri tidak menegur warganya yang menerima tamu tanpa melapor. Kecuali apabila tamu yang bersangkutan adalah orang yang tidak baik-baik, atau apabila seorang warga yang tinggal sendiri menerima tamu (menginap) lawan jenisnya yang bukan suami/istrinya atau bukan orang yang terlarang dikawininya. Dalam keadaan demikian, di kelurahan ini belum pernah terjadi (sepanjang pengakuan para Kepling), Kepala Lingkungan menegur warganya dan mengusir tamu tersebut. Dengan perkataan lain, sejauh kehadiran tamu itu tidak mengganggu warga lain, dan tidak bertentangan dengan norma-norma kesusilaan seorang warga tidak akan dipersalahkan menerima tamu di rumahnya tanpa melaporkan hal itu ke pejabat kelurahan.

Dari pengamatan yang dilakukan selama mengadakan penelitian warga yang membutuhkan surat dari kantor kelurahan cukup mengurusnya lewat Kepala Lingkungannya. Dan Kepala Lingkungan inilah yang seterusnya menyelesaikannya di kantor kelurahan. Hal seperti ini bisa terlaksana karena para Kepala Lingkungan di Kelurahan Tegalsari III memiliki waktu yang cukup lapang untuk menyelesaikan pekerjaan atau tugas sehari-hari di kantor kelurahan. (Selama kunjungan ke kelurahan dalam rangka penelitian ini, kami selalu menjumpai paling sedikit 4-5 Kepling selalu berada di kantor lurah setiap hari).

Mengurus surat lewat Kepala Lingkungan ini bukan tak menjadi masalah bagi seorang Kepala Lingkungan. Karena biasa terjadi warganya

sendiri curiga bahwa Kepling mempersulit urusan warganya . Hal seperti ini pernah dialami oleh Kepala Lingkungan I, yang mengaku sudah 20 tahun menjabat sebagai Kepala Lingkungan dan memimpin warga yang mayoritas suku Jawa. Seorang warganya meminta Surat Jalan yang diperlukan oleh yang bersangkutan untuk sesuatu keperluan. Tetapi sang Kepala Lingkungan menolak permintaan warga tersebut dengan alasan persyaratan administratif yang diperlukan untuk dapat diberikannya surat itu belum terpenuhi. Kesalah pahaman terjadi dan warga yang membutuhkan surat keterangan tadi menuduh Kepala Lingkungannya mempersulit urusan. Hal tersebut dilanjutkannya dengan mengerahkan beberapa orang pemuda untuk mengancam Kepling. Masalah ini kemudian diteruskan ke kelurahan dan diselesaikan di sana.

### **3.4. Disiplin Dalam Hubungan Ketetanggaan**

Seperti telah dikemukakan di atas, penduduk Kelurahan Tegalsari III secara umum konsentrasi tempat tinggalnya berdasarkan pengelompokan etnis. Ada Lingkungan yang mayoritas penduduknya adalah orang Minang, ada pula yang mayoritas orang Mandailing, ada yang mayoritas orang Batak Toba, dan ada yang mayoritas orang Jawa. Dalam pergaulan sehari-hari, eksistensi mayoritas tidak selalu menampakkan diri. Meskipun mereka mengelompok berdasarkan kesamaan suku, tradisi etnik masing-masing tidak hidup dan tidak dihidupkan lagi dalam pergaulan antar warga.

Bahasa pergaulan yang digunakan dalam interaksi sosial adalah bahasa Indonesia. Bahasa daerah hanya digunakan dalam lingkungan terbatas, misalnya di rumah dan dalam forum-forum eksklusif. Di kalangan generasi tua, masih selalu terdengar penggunaan bahasa daerah, misalnya bahasa Minang. Hal ini dapat dijumpai dalam wilayah tempat tinggal yang mayoritas penduduknya berasal dari Minang. Sementara di kalangan generasi muda dan anak-anak, penggunaan bahasa Indonesia sebagai alat berkomunikasi dengan orang lain sudah sangat mantap

Salah satu masalah yang muncul dalam kehidupan bertetangga ialah dalam hal pengelolaan sampah/limbah rumah tangga. Minimnya fasilitas pembuangan sampah dan air limbah yang ada di lingkungan kelurahan menyebabkan masalah sampah ini menjadi persoalan bersama yang sulit ditanggulangi. Ditambah masih rendahnya kesadaran warga untuk memelihara kebersihan lingkungan tempat tinggalnya sendiri, kadangkala membawa pertengkaran antar tetangga. Saluran air di depan rumah yang selalu tersumbat, bukan saja mengganggu yang punya rumah, tetapi juga berpengaruh ke rumah-rumah lainnya, sehingga lingkungan menjadi tergenang air buangan yang kotor. Kegiatan gotong-royong kebersihan lingkungan yang secara rutin dilaksanakan selama tahun 1992 memberikan sedikit terapi terhadap persoalan kebersihan ini, sehingga konflik antar tetangga akibat sampah/saluran air limbah menjadi berkurang.

Dalam hubungan antar tetangga, jawaban 100 orang responden terhadap pertanyaan "siapa tetangga yang paling disenangi?", sebanyak 53 % responden menjawab orang yang beragama Islam paling disenangi; 26 % menjawab tetangga yang beragama Kristen juga disenangi; dan 21 % tidak memberikan jawaban. Menjawab pertanyaan "tetangga dari suku apakah yang paling disenangi?" diperoleh gambaran : 22 % menjawab suku Minang paling disenangi; 19 % memilih Jawa; 17 % Mandailing; 13 % Melayu; 1 % Nias dan 13 % tidak memberikan jawaban. Secara metodologis, gambaran ini tidak memuaskan karena sebaran responden yang memberikan jawaban tidak tergambar dengan jelas.

Bila ada permasalahan yang timbul antar-tetangga, biasanya diselesaikan secara kekeluargaan. Hanya dalam hal-hal yang berat persoalan konflik antar-tetangga harus sampai ke kelurahan. Dan menurut keterangan dari kantor kelurahan, kasus seperti itu tidak pernah terjadi.



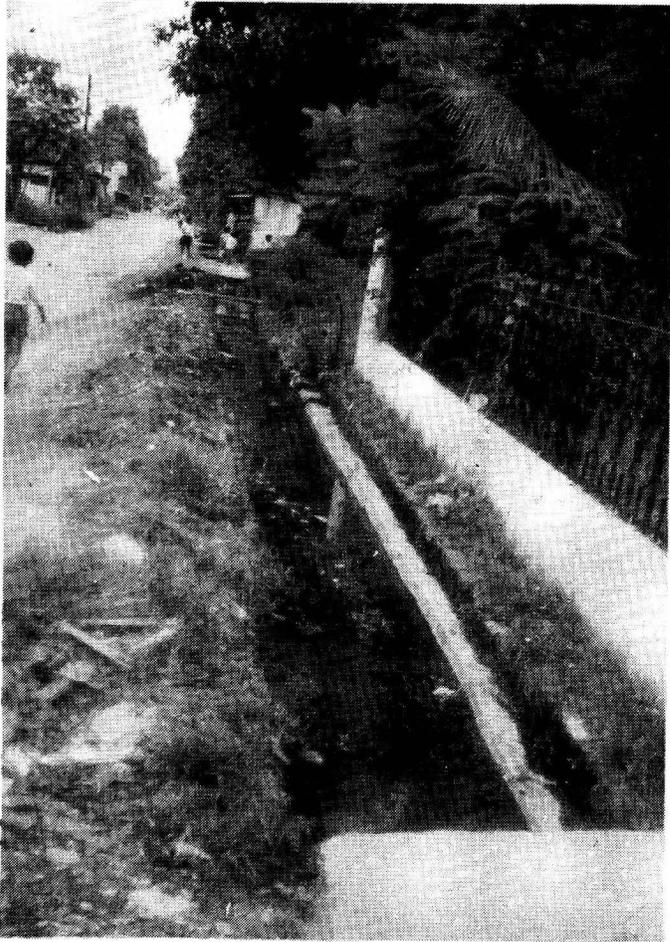
*Gambar 1*

*Pembuangan Sampah yang sembarangan di sekitar pekarangan yang kosong*



*Gambar 2*

*Suasana jalan yang berlumpur serta bak sampah yang berubah fungsi menjadi tempat jemuran*



*Gambar 3*

*Selokan yang sering menjadi tempat Pembuangan sampah sehingga pada musim hujan sering tumpat.*



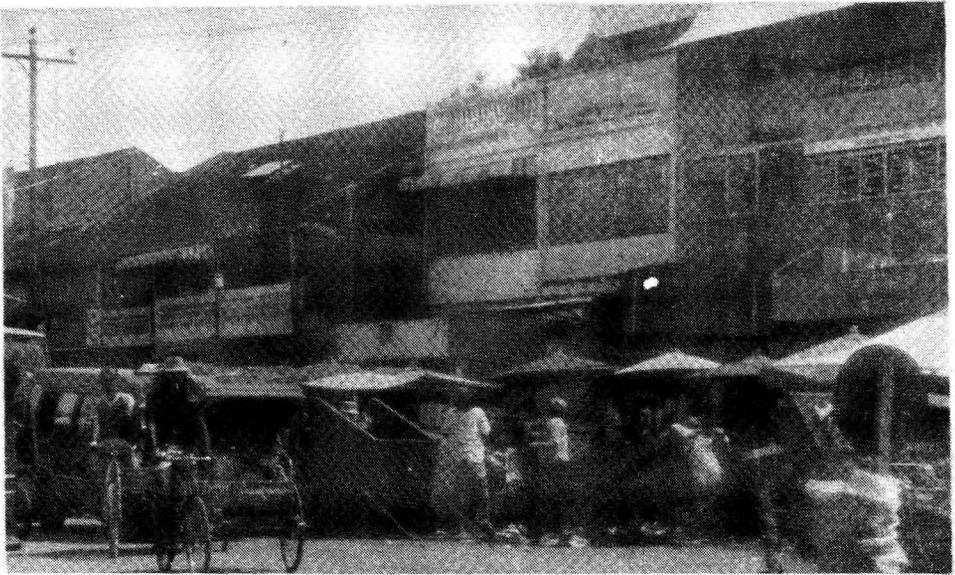
**Gambar 4**

**Tempat pembuangan sampah yang sembarangan di Kelurahan Tegalsari III**



**Gambar 5.**

**Sisi jalan yang dimanfaatkan tempat pembuangan sampah diLingkungan II**



*Gambar 6.*

*Tempat Pembuangan Sampah sementara (TPS) di sudut jalan yang sering mengganggu arus lalu lintas.*



*Gambar 7.*

*Petugas Kebersihan menarik gerobak sampah ke TPS di Lingkungan II*



*Gambar 8.  
Ruas jalan yang menjadi lokasi TPS dan pedagang kaki lima*



*Gambar 9.*  
*Aliran parit busuk yang membelah kawasan Kelurahan Tegals Sari III*



**Gambar 10.**

*Plakat dan Organisasi Kemasyarakatan yang terdapat di Kelurahan Tegal Sari III*



**Gambar 11.**

*Salah satu Organisasi Kemasyarakatan yang terdapat di Kelurahan Tegal Sari III*

## **BAB IV**

### **DISIPLIN MASYARAKAT DI TEMPAT UMUM**

#### **4.1 Disiplin di Lingkungan Pasar/Pertokoan**

Kotamadya Medan sebagai ibukota Propinsi Sumatera Utara dari waktu ke waktu terus mengalami perkembangan, sejalan dinamika masyarakat dan pembangunan daerahnya. Kotamadya Medan selain berfungsi sebagai pusat pemerintahan Daerah Tingkat I Propinsi Sumatera Utara, juga berperan sebagai pusat kegiatan ekonomi. Ini terlihat dari banyaknya pasar yang berada di wilayah Kotamadya Medan dengan berbagai tipe atau kelas. Di daerah ini terdapat 39 pasar dengan berbagai tipe atau kelas yang dikelola Dinas Pasar Kotamadya Tingkat II Medan (Tabel IV.1). Dewasa ini di Kodya Medan juga terdapat delapan buah pasar swalayan (plaza) besar dan puluhan mini market (pasar swalayan kecil) yang bertebar di seluruh wilayah Kotamadya Medan. Pertokoan yang menghiasi jalan-jalan protokol juga merupakan arena jual-beli yang berfungsi sama dengan pasar.

Dari keseluruhan tipe dan jenis pasar yang ada di Kodya Medan, Pusat Pasar adalah pasar yang paling besar dan paling ramai dikunjungi

penduduk Kotamadya Medan. Pusat Pasar ini merupakan sasaran penelitian, karena mobilitas serta aktivitas penduduk di lokasi tersebut cukup tinggi. Pusat Pasar ini berada di Kelurahan Pusat Pasar Kecamatan Medan Kota.

Untuk menjangkau lokasi ini relatif mudah karena berdekatan dengan tiga buah terminal umum angkutan kota, yakni Terminal Sambu, Terminal Bulan dan Terminal Olympia. Hampir keseluruhan mobil angkutan kota yang menghubungkan Pusat Pasar dengan satuan-satuan wilayah kotamadya Medan lainnya, melalui terminal tersebut.

Pusat Pasar sebagai pusat perbelanjaan bagi masyarakat Kotamadya Medan, dikelilingi oleh bangunan-bangunan pertokoan, pasar swalayan dan juga sebuah sentral pasar grosir yang terbesar di Sumatera Utara. Sarana pendukung lainnya seperti Bank, sarana hiburan seperti bioskop, bilyard dan juga sarana penginapan berupa hotel dan losmen terdapat di sekitar Pusat Pasar.

Pada pagi atau dini hari sekitar pukul 04.00 sampai pukul 06.30 Wib, jalan raya sekitar pusat pasar dimanfaatkan sebagai tempat berjualan sayur-sayuran dan buah-buahan. Sayur mayur dan buah-buahan yang berasal dari luar Kotamadya Medan diperdagangkan pada pagi hari dan oleh pedagang dari berbagai belahan Kotamadya Medan, kesempatan tersebut dimanfaatkan untuk berbelanja. Jadi pada pagi hari, orang yang berbelanja adalah para pedagang perantara, di mana mereka membeli sayur dan buah-buahan di pusat pasar dengan tujuan untuk dijual kembali di lingkungan sekitar tempat tinggalnya atau para pedagang yang berasal dari pasar lainnya, dengan tujuan untuk dijual kembali di pasar-pasar lainnya yang tersebar di wilayah Kotamadya Medan.

Kegiatan pasar pagi di sekitar Pusat Pasar hanya berlangsung sekitar 2 atau 3 jam, dan setelah itu akan bersih kembali karena telah disapu dan dibersihkan oleh petugas kebersihan. Setelah pukul 6.30 Wib di Pusat Pasar seolah-olah tidak pernah dimanfaatkan sebagai arena kegiatan pasar. Setelah pukul 07.30 Wib kegiatan perekonomian atau pasar kembali biasa, yakni di Pusat Pasar.

Dilihat dari struktur bangunannya, Pusat Pasar adalah bangunan permanen dengan luas 36.464 m<sup>2</sup> dan terdiri dari tiga lantai. Lantai pertama atau lantai bawah terdiri dari sejumlah stand, sedangkan lantai dua dan tiga terdiri dari sejumlah kios. Kapasitas Pusat Pasar terdiri dari 1.231 stand di lantai pertama dan 2.048 kios di lantai dua dan tiga. Ini berarti bahwa Pusat Pasar dapat menampung orang berjualan sejumlah 3.279 orang, dengan ketentuan satu kios atau stand dimiliki oleh satu orang.

Selain bangunan induk berlantai tiga pada salah satu sisinya juga terdapat bangunan berlantai satu yang masih merupakan bagian dari Pusat Pasar, yakni bangunan yang diperuntukkan khusus bagi pedagang ikan basah atau ikan laut. Bangunan ini sering dinamakan orang pasar ikan basah.

Lantai pertama, selain diperuntukkan bagi pedagang dengan kategori stand, sebagian juga dimanfaatkan untuk perkantoran khususnya kantor Dinas Pasar unit Pusat Pasar dan juga kantor atau pos komando Perusahaan Daerah Kebersihan unit Pusat Pasar serta Kantor Koperasi Pedagang Pusat Pasar Medan. Bangunan-bangunan lain yang didirikan kemudian adalah bangunan-bangunan darurat yang ditempatkan pada sisi bangunan induk yang dijadikan tempat khusus untuk menjual makanan dan minuman. Di atas telah disinggung bahwa jenis tempat berjualan di Pusat Pasar adalah kios dan stand. Kios adalah bangunan yang sekelilingnya memiliki dinding dan pintu yang dapat ditutup dan dibuka. Adapun stand adalah tempat berjualan yang tidak memiliki dinding di sekelilingnya.

Dalam kenyataannya, perbedaan antara kios dan stand hampir tidak ada, karena oleh mereka yang berjualan atau yang memiliki hak sewa, bangunan stand telah dirubah sedemikian rupa dengan cara membuat sekat, dinding atau pintu, sehingga menyerupai kios. Bahkan bangunan stand kelihatannya lebih praktis, karena sekat atau dindingnya terbuat dari aluminium yang dapat dibuka atau ditutup dengan cara melipat, menggulung atau mendorong. Dengan demikian, bila pedagang selesai berjualan, mereka dapat meninggalkan atau menyimpan barang dagangannya.

Adanya perubahan bentuk stand sehingga menyerupai bangunan kios, berdasarkan Perda Kotamadya Daerah Tingkat II Medan Nomor 14 tahun 1991 Pasal 9 ayat 9 dibenarkan, dengan ketentuan penambahan dan perlengkapan stand yang dilakukan oleh pedagang atau pemegang hak sewa menjadi milik dan asset Pemda dan hanya dilakukan setelah mendapat izin tertulis dari kepala Dinas Pasar Kotamadya Medan.

Sebagaimana telah digambarkan sebelumnya bahwa Pusat Pasar yang dijadikan lokasi penelitian ini terdiri dari tiga lantai, dengan kapasitas 2.048 kios, 1.231 stand dan satu *loods* ikan basah yang terdiri dari 173 meja. Dalam kenyataannya, tidak semua sarana berjualan tersebut digunakan oleh pedagang. Lantai tiga Pusat Pasar praktis tidak digunakan dan sebagian besar kios di sana kosong atau ditutup. Hasil pengamatan menunjukkan di lantai tiga, jumlah kios yang dimanfaatkan hanya 20 buah, selebihnya ditutup. Alasan penutupan karena para pedagang atau pemilik hak sewa tidak mampu membayar sewa kios, barang dagangan di lantai tiga tidak laku dan sering bocor apabila hujan turun.

Pengamatan di lokasi penelitian menunjukkan bahwa di lantai tiga digenangi oleh tetesan-tetesan air yang merembes dari celah-celah sambungan pengecoran bangunan lantai empat (atap). Hal ini membuat kondisi lantai tiga menjadi becek dan berair, sehingga orang berbelanja dan berjualan merasakan ketidaknyamanan. Itulah sebabnya lantai tiga hanya dihuni kira-kira 20 pedagang, terutama Tukang Jahit, sedangkan selebihnya sudah tutup.

Lantai I yang terdiri dari 1.203 stand, yang berfungsi dan digunakan hanya 851 buah, sedangkan sisanya 352 stand telah ditutup dan dicabut izinnya. Penutupan dan pencabutan izin menyewa atau menggunakan stand, erat kaitannya dengan pelanggaran terhadap tata tertib yang dilakukan oleh pedagang. Umumnya stand ditutup tersebut disebabkan ketidakmampuan pedagang membayar sewa, retribusi dan pungutan-pungutan lainnya. Alasan lainnya adalah karena pedagang menjual barang dagangannya tidak sesuai dengan izin yang diberikan atau disetujui oleh pihak pengelola pasar, yakni Pemda Tk II Medan atau Dinas Pasar.

Lantai II yang berupa kios, juga tidak luput dari permasalahan yang sama. Di antara 1.032 kios yang ada, yang dimanfaatkan pedagang hanya 789 kios, sedangkan selebihnya (243 kios) telah ditutup dan dicabut izinnya.

Permasalahan penutupan kios dan stand ini, belakangan ini merupakan permasalahan yang menggejala di kalangan pedagang dan menurut pihak petugas pengelola pasar, hal ini masih berlangsung hingga sekarang ini. Pedagang di Pusat Pasar Medan, umumnya mengeluh tentang kondisi perdagangan yang mereka kelola. Persaingan dengan pedagang kaki lima dan pedagang asongan serta pertokoan yang ada di sekeliling Pusat Pasar, menjadi salah satu faktor penyebab kondisi yang tidak kondusif yang dialami pedagang Pusat Pasar.

Di Pusat Pasar Medan, yang mendapatkan izin berjualan secara resmi adalah mereka yang memiliki hak sewa atas kios dan stand dengan persyaratan yang dibuat oleh pengelola pasar. Akan tetapi kenyataannya, yang berjualan di Pusat Pasar dan sekitarnya juga terdapat pedagang kaki lima dan pedagang-pedagang asongan. Bila kita memasuki setiap pintu masuk Pusat Pasar Medan, yang pertama diketemukan adalah sejumlah pedagang asongan dan pedagang kaki lima. Pedagang asongan yang menjual berbagai jenis dagangannya seperti: gantungan pakaian, gantungan gorden, sandal, kaos kaki, sapu tangan, makanan ringan atau kemasan, rokok dan lain-lain, akan berlomba-lomba menawarkan dan mempromosikan barang dagangannya. Di sisi lain, pintu masuk semakin menyempit karena setiap tempat kosong dimanfaatkan oleh pedagang kaki lima. Jenis barang dagangannya juga bervariasi, seperti pakaian dalam wanita, sandal, tas sekolah dan buah-buahan.

Kenyataan di atas merupakan saingan bagi pedagang pemilik hak sewa dan stand. Tentu saja volume penjualan mereka menjadi berkurang, karena biasanya jualan pedagang asongan dan kaki lima relatif lebih murah dibandingkan dengan pedagang yang menyewa kios dan stand. Selain itu, para pedagang kaki lima dan asongan bertebar di luar atau sekitar pusat pasar hingga terminal angkutan umum. Hal ini mengakibatkan sebagian pembeli yang ingin mendapatkan barang

kepeluannya tidak perlu lagi masuk ke Pusat Pasar, cukup di luar saja.

Banyaknya pertokoan yang berada di sekitar Pusat Pasar dan juga beroperasinya sentral pasar grosir terbesar di Sumatera Utara yang dikelola oleh swasta, yang letaknya berdampingan dengan Pusat Pasar, ditambah lagi dengan adanya pasar swalayan Olympia Plaza yang relatif dekat, semakin menambah alternatif untuk berbelanja. Hal ini tentunya mengurangi minat pembeli untuk berbelanja ke Pusat Pasar. Belum lagi karena kenyamanan dan kondisi Pusat Pasar yang kurang menyenangkan bagi para pembeli.

Belakangan ini yang menjadi pusat permasalahan adalah perbandingan antara pedagang pemilik hak sewa kios dan stand dengan para pedagang kaki lima serta pedagang asongan. Sebenarnya, izin berjualan yang sah hanya dimiliki oleh pedagang pemilik hak sewa kios dan stand, sementara pedagang kaki lima dan asongan adalah pedagang tak resmi atau istilah yang sering digunakan adalah "pedagang liar" atau "pedagang tak patuh". Keberadaan pedagang kaki lima dan pedagang asongan sangat meresahkan pedagang Pusat Pasar dan dianggap sebagai gangguan yang mengancam eksistensi mereka sebagai pedagang. Namun demikian, hingga sekarang ini masalahnya tetap ada.

Petugas Penertiban Pemda Tingkat II Medan,seringkali mengejar pedagang kaki lima ini. Mereka mengusirnya dan kadang-kadang menangkap dan menyita barang dagangannya. Akan tetapi pedagang kaki lima dan asongan ini tidak jera. Permainan "kucing-kucingan" pun berlangsung. Para pedagang kaki lima dan pedagang asongan sengaja mengemas barang dagangannya secara praktis, sehingga mudah dibawa dan diangkat. Dengan demikian apabila datang petugas penertiban, mereka dengan segera dapat "menyelamatkan" barang dagangannya dan menyembunyikan diri ke tempat yang aman dari jangkauan petugas penertiban.

Sewaktu-waktu petugas penertiban melakukan razia terhadap pedagang kaki lima dan asongan, akan tetapi ketika petugas berlalu, kembali mereka menggelar dagangannya. Kerjasama tersembunyi antara

oknum petugas keamanan Pusat Pasar dengan pedagang kaki lima dituduh oleh para pedagang Pusat Pasar sebagai salah satu faktor penyebab sulitnya pedagang kaki lima tertangkap. Pedagang kaki lima dan asongan memberikan sejumlah uang tertentu (sesuai dengan kesepakatan) kepada para petugas keamanan, supaya keberadaan mereka tidak diganggu dan juga mendapat informasi, kapan petugas penertiban muncul di lapangan, sehingga mereka dapat membuat tindakan penyelamatan.

Jumlah pedagang kaki lima atau asongan di sekitar Pusat Pasar yang relatif besar, juga menimbulkan kesulitan dalam menertibkannya. Umumnya mereka kompak dan memiliki solidaritas dalam menghadapi petugas penertiban. Dialog yang “keras” menjadi ciri pertentangan antara pedagang kaki lima dengan petugas penertiban. Petugas penertiban sering kewalahan menghadapinya. Para pedagang dalam menghadapi petugas penertiban kadang-kadang menggunakan “bahasa wanita” seperti menjerit, menangis, memaki bahkan kadang-kadang menunjukkan bokongnya, semuanya bertujuan supaya barang dagangan mereka tidak disita.

Pengaturan dan pengelompokan barang dagangan di Pusat Pasar Medan diatur sedemikian rupa dengan mempertimbangkan persentase atau jumlah setiap jenis dagangan dalam satu-satuan tempat atau lokasi. Kelompok pedagang yang menjual barang dagangan yang sama atau hampir sama, ditempatkan dalam satuan lokasi yang dinamakan *loods* sehingga di Pusat Pasar terdapat sejumlah *loods* seperti *loods* ikan basah, *loods* ikan kering, *loods* rempah-rempah, dan *loods* kain. Pedagang yang menjual barang dagangan yang relatif besar dan berat untuk diangkut serta intensitas pertukarannya tinggi, berjualan di lantai pertama atau stand, seperti : sembilan bahan pokok, sedangkan yang menjual sandang dan pelengkap lainnya berjualan di lantai dua dan tiga.

Dalam menata barang jualannya, para pedagang berusaha menempatkan sedemikain rupa sehingga mudah terlihat pembeli dan menarik perhatian. Lorong-lorong tempat berjalan para pembeli, cenderung

semakin menyempit karena para pedagang menggelarkan dagangannya hingga ke luar stand atau kios yang mereka sewa. Hal ini bertujuan supaya mudah dilihat oleh pembeli, walaupun akibatnya jalan menjadi sempit dan menimbulkan ketidaknyamanan bagi para pembeli. Mereka kadang-kadang mendapat teguran dari petugas Penertiban Dinas Pasar, bahkan diancam akan dinaikan retribusinya atau dengan peringatan pencabutan izin berjualan.

Walaupun para pedagang mendapat teguran dari para petugas pengelola pasar, tetapi mereka hanya membenahi dan memperbaikinya pada saat petugas datang, setelah petugas berlalu mereka kembali mengulangnya. Tindakan ini dilakukan pedagang karena petugas hanya datang secara temporer, tidak berkala dan akibatnya pedagang menjadi berani melakukan tindakan yang menyalahi aturan tersebut.

Para pedagang yang menjual jenis sandang dan kelengkapan rumah tangga lainnya, menawarkan barang dagangannya secara demonstratif. Setiap orang yang lewat dan mereka yakini hendak berbelanja, mereka akan berlomba menawarkan, menanyakan dan memberi tahu barang dagangannya. Contohnya kalau seseorang lewat, para pedagang secara demonstratif dan kompetitif mengatakan : "cari apa bu", "beli sepatu bu", "ini ada tas baru bu" dan sebagainya bahkan kadang-kadang si pedagang menarik tangan calon pembeli supaya melihat dan menawar barang dagangannya. Karena ramainya pedagang yang menawarkan dan mempromosikan dagangannya, membuat pembeli kadang-kadang menjadi bingung, tetapi demikianlah ciri khas Pusat Pasar Medan.

Supaya ada yang memanggil dan mempromosikan barang dagangannya, setiap pedagang biasanya memiliki pembantu "anak buah" yang juga bertugas mengangkat, menyusun dan menyimpan barang-barang dagangannya. Tidak jarang terjadi konflik antara pembeli dan penjual, karena seolah-olah penjual memaksakan kehendaknya, supaya barang dagangannya dibeli. Dalam hal ini menarik-narik tangan calon pembeli, dan menghalang-halangi jalan calon pembeli sambil menyodor-nyodorkan barang dagangannya seperti tas, sepatu dan kain.

Para pedagang Pusat Pasar umumnya tidak membuat label harga

pada barang dagangannya, sehingga proses tawar-menawar akan menjadi kunci berlangsungnya atau terjadinya suatu transaksi. Dalam proses inilah si pedagang berusaha “mengambil hati” dan meyakinkan pembeli. Kalau harga pertama yang ditawarkan penjual terlalu tinggi, biasanya calon pembeli segera berlalu dan hal ini tidak akan dibiarkan oleh pedagang. Dengan caranya, mereka berusaha mendesak calon pembeli supaya menawar terlebih dahulu sebelum berlalu. Bagi calon pembeli yang kurang menguasai harga barang, tentu saja akan merasa kesulitan, karena biasanya pedagang menawarkan barang dagangannya dengan harga dua atau tiga kali lipat dari harga modalnya. Dalam hal ini, keterampilan pedagang untuk meyakinkan pembeli dan keterampilan pembeli menawar barang yang hendak dibeli, menjadi penentu terjadinya transaksi.

Pusat Pasar sebagai pasar terbesar di Kotamadya Medan, juga merupakan pasar penghasil sampah terbesar. Dari 51 pasar yang ada di Kotamadya Medan yang dikelola Perusahaan Daerah Kebersihan menghasilkan 180 ton sampah dan 30 ton diantaranya berasal dari Pusat Pasar. Jenis-jenis sampah yang umum ditemukan di Pusat Pasar adalah sampah-sampah kemasan, yakni berupa plastik, karton atau kardus dan kertas pembungkus dan juga jenis-jenis daunan yang digunakan sebagai pembungkus makanan. Jenis sampah lain berupa keranjang-keranjang bambu yang merupakan sampah atau sisa pedagang-pedagang ikan, dan juga ampas rempah-rempah seperti kulit bawang, pala dan lain-lain. Berbagai bahan makanan yang telah membusuk seperti tomat, cabe dan buah-buahan juga merupakan sampah yang umum dijumpai di Pusat Pasar.

Masalah kebersihan sampah merupakan masalah spesifik yang mewarnai pasar-pasar di Kodya Medan, sehingga tidak ada pasar yang dikelola PD. Kebersihan yang dapat dikategorikan sebagai pasar bebas sampah. Hampir di setiap sudut dan tempat terlihat adanya tumpukan-tumpukan sampah dan kertas-kertas serta plastik berserakan. Hal ini disebabkan kurangnya kesadaran para pedagang dan juga tidak tersedianya

tempat-tempat pembuangan sampah yang memadai.

Dari hasil pengamatan, terlihat bahwa kotak atau tong penampungan sampah jumlahnya relatif kecil dan hanya terdapat di sekitar tangga yang menghubungkan satu lantai dengan lantai lainnya. Para pedagang umumnya hanya menumpukkan sampahnya di sudut atau di sisi kiosnya, sehingga mengurangi kenyamanan dan sering terpijak orang yang hendak berbelanja.

Sampah juga berserakan di sekitar taman yang ada di Pusat Pasar. Sekalipun di sudut taman telah ditempatkan keranjang sampah, tetapi hal ini kurang memadai, karena apabila sampah dalam keranjang sudah penuh, tidak segera diangkat sehingga sekitar keranjang sampah dan selokan taman tersebut berserakan sampah-sampah.

Selokan yang ada di Pusat Pasar Medan sebagai saluran pembuangan air limbah juga merupakan hal yang dilematis. Saluran ini selalu tersumbat sehingga tidak berfungsi mengalirkan air, melainkan sebagai tempat lumpur dan sampah-sampah yang membusuk. Pada bahagian depan pintu masuk yang memisahkan bangunan pajak (pasar) ikan basah dengan bangunan Induk Pusat Pasar, terdapat lumpur yang tergenang pada selokan, seolah-olah merupakan kolam. Hal ini mengakibatkan orang berbelanja harus berhati-hati berjalan dan seringkali terlihat orang terperosok lumpur, karena kurang memperhatikan genangan lumpur tersebut.

Dalam pengelolaan sampah di Pusat Pasar Medan, terdapat sebuah pos pengelolaan sampah yang dikelola Perusahaan Daerah Kebersihan dan juga dua buah container sebagai tempat penampungan sampah. Untuk membersihkan Pusat Pasar, Perusahaan Daerah Kebersihan menugaskan karyawan-karyawan dan mereka inilah yang mengangkut dan mengumpulkan sampah dari Pusat Pasar dan menempatkannya pada container yang selalu tersedia di salah satu sudut bangunan Pusat Pasar.

Pada sore hari menjelang malam, ketika para pedagang mulai meninggalkan usahanya, petugas-petugas kebersihan memulai membesihkan setiap lantai. Untuk memudahkan pengumpulan sampah

dari lantai dua dan tiga, disediakan empat buah terowongan, sehingga sampah dapat dijatuhkan dari lantai dua dan tiga ke lantai dasar. Di lantai dasar tempat pengumpulan sampah sementara ini (sebelum dimasukkan ke container) juga tidak luput dari polusi bau atau aroma. Apalagi kalau musim hujan, sampah-sampah yang membusuk karena tidak segera diambil dan dikumpulkan ke container, berbau dengan lumpur dan menimbulkan bau yang menyesakkan hidung.

Setelah sampah dikumpulkan di container kemudian ditarik oleh truk pengangkut sampah, selanjutnya dibawa ke tempat pembuangan. Setelah dikosongkan container ditempatkan kembali ke tempat posisinya semula.

Dalam kenyataannya di lapangan, container yang berfungsi sebagai tempat pembuangan dan pengumpulan sampah sementara, tidak mampu menampung kapasitas sampah produk Pusat Pasar sehingga apabila container penuh maka sampah berserakan di sekitar container. Pengangkutan container yang hanya dilakukan sekali sehari tidak seimbang dengan jumlah sampah, sehingga sampah yang berserakan di sekitar container merupakan pemandangan yang lazim ditemukan setiap hari.

Permasalahan lainnya adalah menyangkut kesadaran warga pembuangan sampah. Di sekitar container terdapat sampah yang berserakan, sementara containernya belum penuh. Hal ini disebabkan warga yang membuang sampah tersebut tidak membuang sampahnya ke dalam container, melainkan di sekitar container, belum lagi kalau ada pemulung yang mengais-ngais (mencari-cari sesuatu barang yang dibutuhkan) sehingga sampah semakin berserakan.

#### **4.2. Disiplin di Lingkungan Terminal**

Sebelumnya telah dikatakan bahwa di sekitar Pusat Pasar Medan terdapat dua buah terminal angkutan umum, yakni Terminal Sambu dan Terminal Jalan Bulan. Di antara kedua terminal ini, yang terbesar adalah Terminal Jalan Sambu (terminal Sambu), yang jaraknya hanya dipisahkan sebuah jalan protokol (Jalan Sutomo) dengan Pusat Pasar.

Terminal Sambu disinggahi angkutan umum yang dinamakan "sudaco" yakni jenis angkutan umum khusus Medan yang berwarna kuning dan dapat mengangkut penumpang 10 - 12 orang. Sudaco adalah angkutan umum yang melayani masyarakat dan menghubungkan Terminal Sambu dengan satuan-satuan wilayah atau pemukiman Kodya Medan. Jumlah keseluruhan angkutan sudaco yang mangkal dan wajib masuk ke Terminal Sambu sebanyak 3.300 kendaraan (sesuai dengan izin trayek) yang diberikan oleh Dinas Angkutan Jalan Raya Kotamadya Tingkat II Medan. Sedangkan Terminal Jalan Bulan (terminal Bulan) adalah terminal umum yang khusus untuk jenis kendaraan bus (besar) dan juga jenis angkutan non bis (kecil) dari jenis kendaraan Toyota Kijang dan armada kecil lainnya yang non sudaco.

Terminal Sambu dan Terminal Bulan yang lokasinya di sekitar Pusat Pasar Medan, pada dasarnya tidak menunjukkan cirinya sebagai terminal. Dikatakan demikian karena kedua terminal tersebut hanya berupa jalan protokol biasa, tanpa ada fasilitas pendukung lainnya sebagaimana layaknya terminal. Terminal Sambu hanya berupa jalan raya biasa (jalan Sambu) yang panjangnya kira-kira 200 meter dan lebarnya sekitar 30 meter. Jalan ini namanya Jalan Sambu, sehingga terminalnya pun dinamakan Terminal Sambu. Pintu masuk atau jalan yang bersimpangan dengan Jalan Sambu ada 7 buah jalan, sehingga memudahkan kendaraan untuk masuk dan keluar dari terminal tersebut. Jalan-jalan tersebut antara lain adalah Jalan Sutomo sebagai pintu masuk utama. Jalan Rupert, Bengkalis I, dan II, Jalan Pandu, Jalan Irian.

Di kiri-kanan Jalan Sambu, merupakan rumah pertokoan dan penginapan, juga terdapat sebuah pasar yang bernama Pasar Sambu. Jalan Sambu tersebut diatur sedemikian rupa sehingga dapat dijadikan sebagai tempat mangkal kendaraan. Pada bahagian tengahnya, sengaja dibiarkan kosong, supaya dapat dilalui oleh kendaraan yang hendak keluar dan masuk.

Setiap kendaraan sudaco, memiliki hak dan kewajiban untuk masuk ke Terminal Sambu. Kendaraan tersebut masuk ke Terminal Sambu

dengan membawa penumpang dari berbagai belahan wilayah Kotamadya Medan dan diturunkan di Terminal Sambu. Kemudian kendaraan tersebut antri di terminal untuk mendapatkan penumpang, atau terus melanjutkan perjalanan (tanpa antri) dengan harapan mendapatkan penumpang di jalan.

Bagi kendaraan yang antri diatur dan dikordinasi oleh mandor Lin (seorang mandor yang bertugas mengatur antrian dari setiap arah tujuan perjalanan kendaraan). Mandor inilah yang mengatur antrian kendaraan dan memberitahukan kepada penumpang dengan cara meneriakan arah yang dituju setiap kendaraan. Kendaraan tersebut disusun dan diatur sedemikian rupa dan pada atap atau bagian atas kendaraan yang antri dibuat plang yang memberitahukan arah dan tujuan perjalanan setiap kendaraan. Apabila suatu kendaraan sudah penuh, supir membayar uang antrian sebesar Rp. 200,- kemudian antrian dilanjutkan oleh kendaraan berikutnya. Urutan antrian didasarkan pada kendaraan yang lebih dahulu sampai. Kendaraan yang menunggu giliran antrian berjajar di belakang (satu berisan setiap lin) dan kalau tidak muat (karena terlalu banyak dan panjang) untuk sementara, kendaraan diparkirkan di dekat pertokoan pintu masuk ke terminal.

Terminal Sambu sebagai terminal angkutan umum non bis di Kotamadya Medan, relatif padat setiap waktu dan terkesan semrawut. Hal ini dikarenakan luas terminal yang relatif sempit dibandingkan dengan jumlah kendaraan yang mangkal di sana setiap harinya. Kesemrawutan lalu lintas di terminal ini juga diakibatkan oleh tingkat kedisiplinan pengemudi yang masih rendah dimana supir seringkali menurunkan penumpang sesuka hatinya. Jalur bebas (persis pada bahagian tengah) terminal hanya dapat dilalui dua kendaraan sudaco secara berjajar. Para pengemudi yang masuk ke terminal umumnya menghentikan kendaraannya pada jalur ini, sehingga kendaraan yang di belakangnya tidak bisa lewat. Akibatnya timbullah kemacetan, karena arus lalu lintas terhenti sementara dan suasana yang demikian akan diikuti dengan "Festival" klakson kendaraan dan berbagai umpatan yang keras seperti

“hei cepat, hei ini bukan milik moyangmu dan sebagainya.

Kejadian di atas, sering terjadi di terminal Sambu terutama pada jam-jam tertentu, seperti pagi hari saat jam berangkat kerja atau sekolah, siang hari pada jam pulang sekolah dan sore menjelang malam hari pulang kerja atau sekolah.

Kesemrawutan lalu lintas di terminal juga disebabkan oleh para pedagang kaki lima yang berada di emperan atau trotoar pertokoan. mereka menggelar barang dagangannya, memasang payung-payung pelindung tempat berjualan hingga ke badan jalan, sehingga lokasi terminal yang sudah sempit, semakin dipersempit lagi oleh pedagang kaki lima. Pada siang hari atau pada saat lalu lintas dan kepadatan kendaraan di terminal relatif kecil, para pedagang kaki lima “menyerbu” daerah terminal dan dengan seenaknya menggelar jualannya di tengah jalan atau di sisi kendaraan yang antri.

Pada sore hari, terutama setelah lewat pukul 14.00 Wib, kesibukan manusia dan kesemrawutan lalu lintas akan makin nyata, karena pada saat itu para pedagang pakaian bekas memanfaatkan terminal ini sebagai tempat berjualan atau transaksi antar pedagang. Mereka ini terdiri dari kaum ibu yang tidak memikirkan bahwa lokasinya adalah tempat kendaraan dan mereka dengan seenaknya menggelarkan pakaian-pakaian bekas.

Terminal Sambu akan terlihat kesemrawutannya apabila musim hujan tiba. Lokasi terminal akan banjir dan dipenuhi sampah serta lumpur dan juga karena permukaan jalan tidak rata (terdapat lubang-lubang), setelah hujan reda akan muncul kubangan-kubangan yang berisikan lumpur air dan sampah. Hal seperti ini mengakibatkan para penumpang tidak mau ke tempat antrian dan mereka menunggu di jalur bebas atau menunggu di pintu luar. Hal ini mengakibatkan kemacetan, ditambah lagi kesadaran pengemudi yang rendah yang dengan seenaknya memberhentikan kendaraan di jalur luar untuk mencari dan menaikkan penumpang.

Ketidakmauan penumpang masuk ke terminal diwujudkan dengan tindakan menunggu di tempat-tempat tertentu yang dilalui kendaraan

yang mereka inginkan. Kondisi terminal yang kurang baik juga mengakibatkan sebahagian pengemudi tidak mau memasukkan kendaraannya ke terminal. Alasan mereka karena di luar terminal mereka bisa mendapatkan penumpang disamping kondisi terminal yang berlubang-lubang cenderung membuat kendaraan mereka cepat rusak, sehingga biaya operasional kendaraan semakin tinggi.

Kenyataan ini mengakibatkan munculnya terminal-terminal “liar” di sekitar Terminal Sambu. Jadi pengemudi tidak lagi masuk ke terminal melainkan mengarahkannya ke terminal-terminal liar. Di terminal liar ini mereka mendapatkan penumpang secara cepat tanpa harus antri dan juga mendapat dukungan dari orang-orang tertentu yang istilah setempat disebut “preman”, yang fungsinya sama dengan calo penumpang. Para preman ini bekerja sama dengan pengemudi untuk menaikkan dan mendapatkan penumpang dan juga memberi kode atau tanda kepada pengemudi apabila datang aparat penertiban lalu lintas atau Polisi Lalu Lintas. Sebagai konsekuensi tidak masuknya kendaraan ke terminal adalah berkurangnya pendapatan Pemda setempat dari Hasil Retribusi Terminal, karena kendaraan yang tidak mau masuk terminal tentu saja tidak dapat ditagih retribusinya. Padahal peraturan Pemda setempat menyatakan bahwa setiap kendaraan non bus (sudaco) yang keluar dari terminal wajib membayar retribusi terminal sebesar Rp. 100.-

Penertiban terhadap terminal liar sering dilakukan Pemerintah melalui Bakortiblantasi (Badan Koordinasi Ketertiban Lalu Lintas) yang terdiri dari unsur DLLAJR (Dinas Lalu Lintas Angkutan Jalan Raya), Dinas Penertiban, Polisi Lalu Lintas dan POM ABRI, akan tetapi terminal liar tetap berjalan.

Apabila petugas tidak ada para pengemudi memanfaatkan terminal liar dan bila ada petugas barulah mereka masuk ke terminal umum. Kode atau tanda dari preman, biasanya merupakan pedoman bagi pengemudi apakah masuk ke terminal liar atau tidak, dan diantara pengemudi terdapat kerja sama dalam bentuk saling memberitahu apabila petugas Bakortiblantasi muncul. Bila pengemudi diketahui memanfaatkan terminal

liar akan diberi hukuman Tilang (Bukti Pelanggaran) dan kadang-kadang juga mobil beserta pengemudinya dibawa ke kantor untuk dinasehati dan diberi peringatan.

Kedisiplinan penumpang di lingkungan terminal juga relatif masih rendah yang pada gilirannya dapat menimbulkan kemacetan lalu lintas. Sementara itu, kadang-kadang penumpang yang ingin cepat sampai di tujuan biasanya menunggu sudaco yang hendak keluar persis di persimpangan pintu keluar terminal. Karena pengemudi memberhentikan kendaraannya di jalur pintu ke luar, maka kendaraan yang di belakangnya tidak bisa lewat, sehingga terjadilah kemacetan. Demikian juga halnya dengan penumpang yang hendak turun, seolah-olah tidak sabar menunggu sampai kendaraan tiba di tempat pemberhentian. Para penumpang lebih senang menghentikan kendaraan kendaraan pada jalur bebas, dimana seharusnya kendaraan tidak boleh berhenti. Tindakan penumpang ini dilatar belakangi keinginan supaya cepat mendapatkan kendaraan pengganti.

Budaya antri yang seharusnya dimiliki setiap individu pada tempat-tempat umum dan keramaian, hampir tidak dimiliki oleh penumpang Kodya Medan. Pada jam-jam tertentu, terutama pada pagi hari saat berangkat kerja dan juga sore hari saat pulang sekolah atau pulang kerja, perebutan antara penumpang terlihat jelas. Kendaraan yang masuk terminal kadang belum berhenti sudah diserobot penumpang. Perebutan antar penumpang ini dapat menimbulkan kegaduhan karena ada yang terjepit di pintu, terinjak kakinya, dan sebagainya.

### **4.3 Disiplin di Tempat Hiburan**

Tempat hiburan yang menjadi sasaran dalam penelitian ini adalah gedung-gedung bioskop yang menayangkan hiburan berupa film. Gedung bioskop sebagai tempat hiburan yang bersifat umum, akan terlihat berbagai perilaku individu sebagai warga atau bagian masyarakat. Pola perilaku warga masyarakat inilah yang akan disoroti pada kesempatan

ini, untuk mengetahui apakah pola perilaku yang ditampilkan warga masyarakat sesuai dengan aturan atau norma. Kepatuhan dan kepedulian terhadap norma yang berlaku di lokasi tersebut, dijadikan patokan untuk melihat tingkat kedisiplinan warga masyarakat.

Peminat hiburan (penonton) sebelum menyaksikan suatu pertunjukan hiburan (film), terlebih dahulu harus membeli karcis atau tiket pada loket-loket yang telah disediakan oleh pengusaha hiburan. Loket-loket tempat pembelian karcis, sengaja dibentuk sedemikian rupa sehingga orang yang hendak membeli karcis harus bergiliran (satu per satu). Kalau peminat hiburan tersebut jumlahnya relatif besar, dorong mendorong dalam suatu antrian menuju loket tempat pembelian karcis, merupakan hal yang umum terjadi. Menyerobot atau mendahului orang yang ada di depannya, juga merupakan perilaku yang sering ditampilkan oleh peminat hiburan film.

Peminat hiburan akan terlihat dalam jumlah besar apabila panggung hiburan (gedung Bioskop) tersebut memutar film "extra show" (film yang diputar di luar jadwal yang umum), yang biasanya dilakukan pada pukul 13.30 Wib. Extra show sangat diminati oleh penonton, karena harga tiket relatif murah dibandingkan dengan pemutaran film biasa.

Di Kotamadya Medan, sebagian besar gedung bioskop memutar film extra show waktunya hampir bersamaan, yakni sekitar pukul 13.30 Wib. Khusus untuk extra show ini harga tiket jauh berbeda dengan harga tiket biasa. Bioskop-bioskop yang memiliki satu panggung, biasanya menjual harga tiket berkisar antara Rp. 1.000, sampai Rp. 3.500,-. Bioskop-bioskop yang memiliki panggung lebih dari satu yang biasanya disebut studio 1, 2, 3 dan seterusnya, untuk pemutaran film extra show menjual harga tiket berkisar Rp. 1.000, sampai Rp 1.500,-, sedangkan untuk pemutara film biasa harga tiket berkisar Rp. 2.500,- sampai Rp. 7.500,-. Harga tiket yang relatif murah pada saat pemutaran film extra show ini penonton peminatnya banyak dan pada saat seperti ini penonton akan saling mendorong dan menyerobot dalam membeli karcis.

Untuk pemutaran film biasa, perilaku menyerobot dan saling mendorong jarang terlihat, karena biasanya jumlah penonton relatif kecil.

Kelesuan hiburan bioskop akhir-akhir ini semakin dirasakan di kota Medan, ini terlihat dari jumlah penonton yang sedikit. Kenyataan ini tidak terlepas dari beredarnya kaset video sewaan dengan harga yang relatif murah dibandingkan dengan harga tiket bioskop, menyebabkan animo penonton ke bioskop semakin berkurang. Seseorang yang memiliki video dapat menyewa kaset film dengan harga Rp. 1.000,- sampai Rp 2.000,- agar seluruh keluarga dapat menikmatinya, sementara kalau ke bioskop harus mengeluarkan biaya yang relatif besar.

Tingkat kesadaran penonton di gedung bioskop masih tergolong rendah. Ini terlihat dari gedung-gedung bioskop yang hanya menggunakan kipas angin akan dipenuhi asap rokok, karena umumnya penonton adalah perokok. Perokok belum menyadari bahaya merokok, sehingga seenaknya merokok dalam gedung bioskop yang sempit tanpa memikirkan kesehatan bagi perokok dan bagi orang lain yang tidak perokok.

Kebiasaan merokok di gedung bioskop ini juga diikuti dengan tindakan yang kadang-kadang yang menjurus kasar dan mengundang timbulnya konflik serta bahaya kebakaran. Sebagai contoh, seorang perokok dengan seenaknya melemparkan puntungan rokoknya yang masih menyala ke depan dan hal ini bisa membahayakan orang lain. Perilaku yang hampir sama dengan tindakan di atas adalah membuang sampah makanan (bungkus atau kemasan makanan atau minuman, kacang, permen dan sebagainya) di sembarang tempat, bahkan kadang-kadang melemparkannya, sehingga mengenai orang lain. Karena film sedang diputar dan suasana gelap, maka tindakan si pelempar tidak terlihat dan keadaan ini membuat orang tersebut semakin berani untuk mengulangi tindakannya. Demikian juga bagi orang yang terkena lemparan, tentu saja berusaha membalasnya dengan menduga-duga arah dan sumber pelempar.

Merokok di gedung bioskop merupakan hal yang biasa dilakukan penonton. Anak-anak remaja (usia sekolah) juga sering memanfaatkan gedung bioskop sebagai tempat yang aman untuk merokok. Maksudnya adalah anak yang belum berani merokok secara bebas di sembarang tempat, di gedung bioskop mereka lebih leluasa, dengan merokok di gedung bioskop kecil kemungkinannya diketahui orang lain atau mendapat

larangan dari orang lain.

Ada kebiasaan bagi remaja-remaja di Kotamadya Medan, khususnya remaja pria, untuk menonton secara berkelompok (3 hingga 7 orang). Di gedung bioskop mereka bertingkah laku secara bebas seperti merokok, membawa makan dan minuman ringan, dan melemparkan sampah secara sembarangan. Tingkah laku mereka menjadikan suasana bioskop menjadi kurang nyaman bagi penonton lainnya.

Pada gedung-gedung bioskop yang memiliki fasilitas *air condition* (AC), terdapat aturan keras yang melarang penonton merokok, namun demikian, kadang-kadang ada saja penonton yang masih belum mematuhi, dan tetap merokok. Untuk mengatasi hal yang demikian, pihak pengelola bioskop lebih dahulu menanyakan peringatan atau pelarangan seperti "Dilarang Merokok". "Sebelum anda mematikan rokok, film tidak akan diputar, dan lain-lain. Kalau sudah ada tayangan peringatan demikian, perokok biasanya mematikan rokoknya dan jika tidak akan mendapat sorakan dari penonton lainnya.

Pola perilaku penonton di gedung bioskop juga masih menampilkan tingkah laku yang tidak sesuai dengan aturan. Duduk seenaknya, mengangkat kaki ke sandaran tempat duduk di depannya, merupakan contoh perilaku yang sering ditampilkan penonton. Kalau film yang diputar tersendat (mengalami gangguan), penontonnya langsung ribut dan berteriak-teriak bahkan ada yang memukul-mukul atau menghentak-hentakkan tempat duduk, melainkan juga melontar berbagai makian atau kata-kata kasar dan juga melempar benda-benda tertentu ke layar film.

Pembatasan umur sebagai syarat bagi penonton nampaknya bukan hal yang dipermasalahkan. Para pengusaha bioskop umumnya kurang memperhatikan segi umur sebagai syarat bagi penonton untuk film-film tertentu. Film-film yang dikhususkan untuk 17 tahun ke atas, apabila kalau badannya reatif besar dan tidak menggunakan pakaian seragam sekolah. Pengawasan terhadap penonton yang "belum pantas" hampir tidak ada, kecuali pada penonton yang mencolok sebagai pelanggar aturan, barulah mendapat larangan. Misalnya bagi anak yang belum

berusia 17 tahun dan badannya relatif kecil, oleh petugas pengawas pintu masuk, disuruh pulang (tidak diizinkan masuk). Hal ini hanya berlangsung pada siang hari atau sore hari sedangkan pada malam hari larangan atau batasan umur ini seolah-olah tidak berlaku.

Keberanian pengusaha bioskop mengizinkan penonton yang belum pantas menikmati film tertentu, erat kaitannya dengan kurangnya pengawasan terhadap gedung-gedung bioskop. Motif-motif ekonomi menjadi prioritas utama dalam berbuat dan bertindak menjalankan usahanya, menyebabkan aturan-aturan atau norma-norma cenderung diabaikan. Di sisi lain, tidak adanya tindakan atau sanksi dari pihak yang berwenang, menyebabkan perilaku di atas berjalan atau berlangsung.

#### **4.4. Disiplin di Jalan Raya**

Disiplin masyarakat di jalan raya merupakan indikasi kepedulian masyarakat terhadap lingkungannya dan reaksi terhadap sejumlah aturan-aturan hidup. Masyarakat dan pemerintahan telah menciptakan aturan-aturan hidup, sanksi-sanksi dan ganjaran-ganjaran yang sifatnya mengikat setiap warga sehingga proses kehidupan berjalan dengan teratur.

Jalan raya merupakan bagian dari kehidupan manusia di mana pola tindakan atau tingkah laku manusia dituntut untuk mematuhi aturan, sehingga kehidupan manusia itu dapat berlangsung tertib (tidak kacau). Pengemudi, penumpang dan pejalan kaki sebagai warga masyarakat dituntut kepedulian dan kepatuhannya terhadap sejumlah aturan yang berhubungan dengan penggunaan jalan raya.

Kotamadya Medan sebagai suatu kota besar di Indonesia sangat akrab dengan permasalahan lalu lintas di jalan raya, merupakan salah satu faktor penyebab keruwetan lalu lintas di jalan raya. Di sisi lain, disiplin pengemudi yang relatif rendah menjadi permasalahan lalu lintas semakin rumit dan sulit dibenahi. Aturan-aturan di jalan raya dan berbagai tanda atau rambu-rambu lalu lintas seolah-olah tidak punya kekuatan mengikat dan memaksa bagi para pengemudi.

Para pengemudi di Kotamadya Medan umumnya kurang disiplin dalam mengemudi kendaraannya. Aturan-aturan dan rambu-rambu lalu lintas hanya dipatuhi kalau ada petugas yang mengawasinya. Sebaliknya, pengemudi cenderung melanggar aturan-aturan lalu lintas, bila tidak ada petugas yang mengawasinya. Jadi, pengemudi hanya merasa takut melakukan pelanggaran, bukan kesadaran akan aturan-aturan lalu lintas.

Pengemudi-pengemudi kendaraan, khususnya pengemudi kendaraan angkutan umum cenderung mengabaikan tanda-tanda larangan parkir dalam menaikkan dan menurunkan penumpang. Bahkan di lampu merah-pun, tidak jarang terlihat adanya aktivitas tersebut. Selain itu peristiwa pengebutan di jalan raya dalam upaya mengejar penumpang merupakan gambaran kehidupan mengemudi angkutan umum. Dalam hal ini keselamatan penumpang cenderung diabaikan dan yang diutamakan adalah bagaimana mendapatkan penumpang yang banyak, sehingga uang setoran (sejumlah uang yang harus dibayarkan pengemudi kepada pemilik kendaraan) dapat dipenuhi.

Adanya pola pikir pengemudi yang demikian mengakibatkan peraturan/tata tertib cenderung diabaikan. Motif-motif ekonomi menjadi prioritas utama yang mendasari tindakan pengemudi di jalan raya. Umumnya para pengemudi atau supir angkutan umum di Kotamadya Medan bukanlah pemilik kendaraan. Mereka hanya berkedudukan sebagai karyawan yang diharuskan menyeter sejumlah uang kepada pemilik kendaraan. Besar jumlah uang tersebut berdasarkan kesepakatan dengan pertimbangan adalah keramaian penumpang di jalur yang dilalui dan kondisi kendaraan itu sendiri apakah masih baru dan dalam keadaan baik atau sudah mulai tua. Pendapatan atau upah yang diperoleh pengemudi adalah semua perolehan setiap hari setelah dikurangi dengan setoran dan biaya operasional seperti minyak. Kerusakan-kerusakan kecil juga menjadi tanggung jawab pengemudi.

Sistem yang demikian ini menjadi pendapatan pengemudi tidak tetap dan kalau pengemudi malas atau tidak cekatan mencari penumpang,

adakalanya jumlah uang setorannya tidak terpenuhi dan ini merupakan utang yang harus dibayar pengemudi di kemudian hari. Apalagi kalau sekolah libur, tentu saja pendapatan pengemudi menjadi berkurang, karena jumlah penumpang juga berkurang. Sebagian *toke* atau pemilik kendaraan dapat memakluminya dan pada saat tersebut jumlah uang setoran dikurangi. Di sisi lain ada juga pemilik kendaraan tidak mau tahu apakah jumlah penumpang berkurang atau tidak. Yang penting baginya setoran harian harus penuh dan kalau berkurang merupakan utang yang harus dibayar kemudian. Kalau pengemudi tidak sanggup memenuhinya, maka ia akan diganti.

Kenyataan di atas menjadikan para pengemudi berorientasi pada tindakan-tindakan ekonomi. Aturan-aturan lalu lintas, seolah-olah dianggap sebagai penghalang bagi mereka untuk mendapatkan banyak uang. Itulah sebabnya para pengemudi cenderung kurang disiplin.

Lebar jalan yang relatif sempit, prasarana pemberhentian (*halte*) yang kurang memadai, juga sebagai faktor penyebab bagi pengemudi untuk seenaknya saja menaikkan dan menurunkan penumpangnya di sembarang tempat. Sudah umum terjadi seorang pengemudi memberhentikan kendaraannya (menaikkan dan menurunkan penumpang) pada bagian tengah jalan. Akibatnya, kendaraan yang di belakangnya tidak bisa lewat. Hal ini dilakukan apabila tidak ada petugas lalu lintas yang mengawasi jalan raya

Tindakan pengemudi sebagaimana dicontohkan di atas, erat kaitannya dengan motif ekonomi, karena dengan cara menaikkan dan menurunkan penumpang di bagian tengah jalan, kendaraan saingannya yang mungkin ada di belakangnya tidak dapat mendahuluinya, sehingga penumpang yang ada di depan kemungkinan besar akan naik kendaraannya.

Pengemudi angkutan umum di Kotamadya Medan juga memiliki kebiasaan menaikkan dan menurunkan penumpang di persimpangan jalan (*simpang tiga dan empat*), sehingga lalu lintas di persimpangan jalan sering macet. Pada persimpangan jalan jelas dilarang sebagai tempat pemberhentian kendaraan, tetapi pengemudi sering melakukannya, karena

di tempat tersebut ia dapat melihat dan mendapatkan calon penumpang.

Trotoar sebagai bagian dari jalan raya yang diperuntukkan bagi pejalan kaki, juga mengalami perubahan fungsi. Banyak trotoar yang dimanfaatkan sebagai tempat berjualan, terutama oleh pedagang kaki lima dan pedagang-pedagang yang menggunakan kendaraan beroda (sepeda, becak, gerobak sepeda). Khusus trotoar di sekitar daerah-daerah pertokoan, sering dimanfaatkan sebagai tempat parkir kendaraan. Begitu juga dengan trotoar di sekitar kantor (terutama kantor yang banyak dikunjungi masyarakat), hampir seluruhnya dijadikan tempat berjualan oleh pedagang kaki lima.

Masalah perparkiran juga menjadi salah satu faktor pendukung terjadinya kemacetan lalu lintas. Hampir keseluruhan jalan-jalan utama atau jalan protokol di Kotamadya Medan merupakan daerah parkir yang dikelola oleh Badan Perparkiran Kotamadya Medan. Para petugas parkir, kadang-kadang dengan seenaknya menyuruh mundur kendaraan yang parkir, tanpa memikirkan arus kendaraan sedang padat di jalur tersebut. Bagi mereka yang penting mendapatkan pemasukan dari hasil parkir. Kalau kendaraan meninggalkan tempat parkir, berarti kesempatan bagi mereka untuk memarkirkan kendaraan lainnya, dengan demikian pendapatan pun bertambah.

Badan Pengelola Perparkiran seolah-olah kurang bijaksana dalam menetapkan lokasi parkir. Dikatakan demikian, karena jalan-jalan tertentu yang arus lalu lintasnya cukup padat dan lebar jalannya relatif sempit, masih dimanfaatkan sebagai lokasi parkir. Akibatnya, bila kendaraan keluar dari jalur parkir akan terjadi kemacetan lalu lintas, karena mereka harus memundurkan kendaraan ke jalur jalan yang sedang ramai dilalui kendaraan.

**TABEL 11**  
**JUMLAH PASAR DAN KLASIFIKASINYA**  
**DI KOTAMADYA MEDAN**  
**TAHUN 1991**

No.	Nama Pasar	Kelas	Daya Tampung				Luas (M <sup>2</sup> )
			Toko	Kios	Stand	Jualan	
1.	Pusat Pasar	I-A	-	2.048	1.231	3.279	36.464
2.	Peringgán	I	-	-	660	660	11.400
3.	Bakti	II	-	228	265	493	2.431
4.	Halat	II	-	110	337	447	5.910
5.	Titi Kuning	II	-	27	25	52	5.000
6.	Tanjung Sari	II	-	20	72	92	3.500
7.	Kuala Bekala	II	-	20	72	92	4.000
8.	Desa Lalang	II	-	103	226	329	5.175
9.	Sei Sikaming	II	-	256	370	626	4.500
10.	Helvetia	II	-	48	384	432	-
11.	Nusa Indah	II	-	27	160	187	4.120
12.	Pendidikan	II	-	177	359	536	2.623
13.	Paus Belawan	II	-	57	185	242	2.890
14.	Jawa Belawan	II	-	116	241	357	3.068
15.	Pekan Labunan	II	-	164	283	447	2.760
16.	Aksara	I-A	-	477	289	766	6.000
17.	Petisah	I	-	793	1.124	1.917	20.000
18.	Sambu	I	-	214	413	627	3.410
19.	Sambas	I	-	197	291	488	2.757
20.	Pandu Baru	II	9	96	-	105	1.332
21.	Medan Deli	II	-	212	160	372	8.500
22.	Muara Takus	II	-	115	61	176	7.508
23.	Sukaramai	III	-	275	92	367	6.300
24.	Glugur Kota	II	-	98	124	222	2.931
25.	Jalan Timah	III	-	231	33	264	4.000
26.	Sunggal	III	-	50	13	63	900
27.	Hongkong	I	-	*	*	*	3.698
28.	Kapuas Belawan	II	-	120	-	120	1.440
29.	Pasar Sore	II	21	52	159	232	2.500
30.	Pasar Ramai	I	-	482	50	478	3.066
31.	Super Market	II	-	725	269	994	20.000
32.	Kampung Baru	III	-	27	25	52	388
33.	Meranti	III	-	23	201	224	2.650
34.	Titi Papan	III	-	20	29	49	900
35.	Martubung	III	-	25	24	49	480
36.	Ikan Lama	IV	-	34	-	34	-
37.	Mahkamah	IV	-	145	-	145	-
38.	Jalan Salak	IV	-	113	-	113	-
39.	Martinus Lubis	IV	-	2.000	-	2.000	4.375
<b>Total</b>			<b>30</b>	<b>9.871</b>	<b>10.227</b>	<b>18.128</b>	

Keterangan : \* Sedang diperbaiki/Renovasi

Sumber : Kantor Dinas Pasar Kotamadya Medan, 1992



*Gambar 12.  
Kubangan Lumpur di Salah Satu pintu masuk Pusat Pasar Medan*



*Gambar 13.*  
*Tempat atau Lubang Corong Pembuangan Sampah di Pusat Pasar Medan*



**Gambar 14.**  
*Kedaaan Lokasi Pembuangan Sampah Sementara di Kecamatan Medan Kota*



**Gambar 15.**  
*Keranjang yang Menumpuk Sebagai Sampah Pedagang di Pusat Pasar Medan.*



**Gambar 16.**

*Terminal Sambu yang dimanfaatkan Pedagang Kaki Lima Sebagai Tempat Berjualan*



**Gambar 17.**

*Container Sebagai Tempat Pembuangan Sampah Sementara di Pusat Pasar Medan*



**Gambar 18.**  
***Sampah yang Berserakan di Sekitar Pintu Masuk Terminal Sambu***



**Gambar 19**  
***Keadaan Taman Pusat Pasar Medan yang di Jadikan Tempat Pembuangan Sampah***



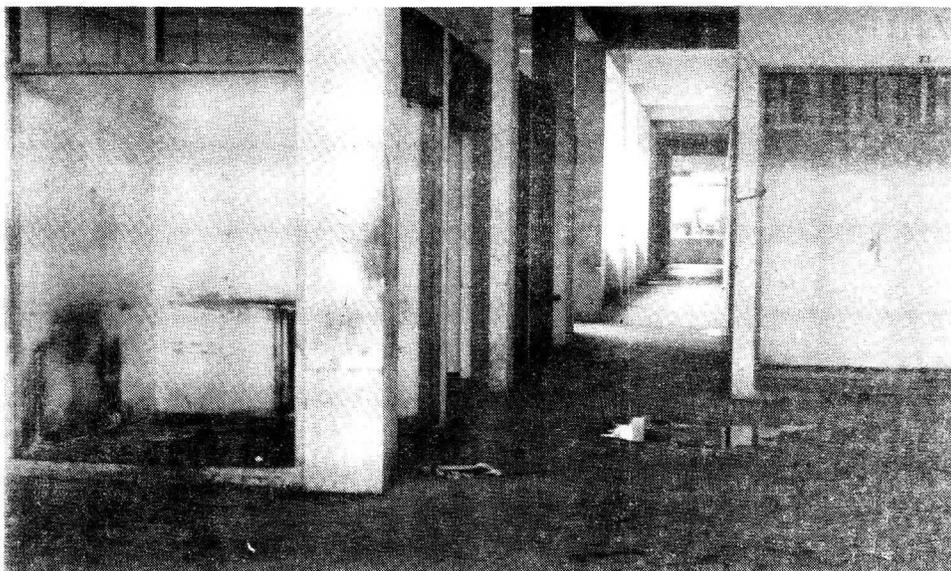
*Gambar 20.*

*Keadaan Terminal Sambu pada Musim Hujan yang Tergenang dan Berlumpur*



*Gambar 21*

*Pedagang Kaki Lima yang Menggelar dagangannya di Pintu Masuk Pusat Pasar*



*Gambar 22*

*Kios Banyak yang Terbengkalai dan kosong yang Telah di Tinggalkan Pedagang*



*Gambar 23*

*Pajak Ikan di Pusat Pasar yang Setiap Hari Tergenang dan Berlumpur.*



**Gambar 24**

**Trotoar yang Digunakan Pedagang Kaki Lima Sebagai Tempat Berjualan**



**Gambar 25**

**Terminal Sambu yang Setiap Harinya di Padati Bus Angkutan Kota.**

## **BAB V**

### **UPAYA PEMBINAAN DISIPLIN PADA MASYARAKAT KOTAMADYA MEDAN**

#### **5.1. Pembinaan Oleh Pemerintah**

Untuk meningkatkan pembinaan disiplin pada masyarakat kota, dalam hal ini Pemerintah Daerah Tingkat II Kotamadya Medan telah melakukan berbagai upaya meliputi :

##### **5.1.1 *Pembinaan Kepada Pengemudi Kendaraan***

Dalam meningkatkan tertib berlalu lintas, terutama kepada pemilik kendaraan bermotor di Kodya Medan telah dilakukan berbagai upaya, terutama dari aparat Kepolisian Kota Besar Medan. Upaya-upaya tersebut meliputi : pemasangan rambu-rambu lalu lintas pada berbagai tempat di pinggir jalan, seperti larangan berhenti pada kawasan tertentu, dilarang parkir, lampu pengatur lalu lintas pada perempatan atau tempat yang banyak dilalui kendaraan. Hal ini dilakukan agar kesemrawutan lalu

lintas terutama di Kodya Medan dapat diperkecil, serta kecelakaan lalu lintas dapat ditekan serendah mungkin.

Upaya-upaya lain yang dilakukan Pemerintah Kodya Medan untuk mengatur dan mengendalikan ketertiban di jalan raya adalah dengan mendirikan patung-patung polisi di beberapa persimpangan jalan dengan harapan agar pemakai kendaraan antri dan tertib serta tidak kebut-kebutan di jalan raya.

Yang tidak kalah pentingnya dalam pembinaan disiplin di jalan raya adalah Bimbingan dan Penyuluhan yang dilakukan oleh petugas kepolisian berupa patroli keliling dengan pengeras suara dalam rangka memberi penerangan dan menghimbau agar masyarakat pemakai jalan raya berla-ku tertib serta melengkapi surat kendaraan, menggunakan helm penga-man (bagi pengendara sepeda motor) dan memperhatikan kelengkapan peralatan kendaraan, yang tujuannya tidak lain untuk kepentingan dan keselamatan pemilik kendaraan sendiri. Frekuensi Penyuluhan dan Penerangan ini termasuk tinggi dilakukan petugas Kepolisian Kota Besar Medan dan Polda Sumatera Utara, baik pada pagi, siang dan sore hari ketika lalu lintas cukup padat.

### **5.1.2 Pembinaan Masalah Kebersihan Kepada Masyarakat**

Untuk meningkatkan kesadaran masyarakat tentang hidup bersih merupakan kegiatan yang cukup baik. Tingkat kesadaran masyarakat yang rendah akan mempengaruhi kebersihan di berbagai tempat, baik di lingkungan pemukiman maupun di tempat-tempat umum di kota Medan.

### **5.1.3. Pembinaan Disiplin Di Tempat Umum**

Untuk meningkatkan disiplin para pedagang di beberapa pasar yang terdapat di Kodya Medan telah dilakukan berbagai upaya untuk lebih teraturnya usaha dagang dan kegiatannya sehari-hari meliputi pengatur-an tempat/lokasi berjualan sesuai dengan jenis dagangannya agar tidak

terjadi keributan ataupun kecemburuan di antara sesama pedagang, serta telah dibuat dan ditetapkan batas waktu berjualan sesuai dengan tipe pasar dan pemanfaatan tempat parkir serta pembuangan sampah di tempat yang telah ditentukan dengan menggunakan papan plakat atau pengumuman yang ditempel di dinding.

Hal ini merupakan usaha pemerintah melalui Dinas Pasar yang setiap harinya memonitor dan menghimbau pedagang agar mematuhi aturan-aturan yang ditetapkan serta membayar retribusi kios, sampah dan kewajiban lainnya. Di beberapa kawasan yang menjadi tempat mangkal pedagang musiman atau padang kaki lima dibuat pamflet untuk tidak berjualan di lokasi tersebut terutama di pinggir jalan Sutomo, Terminal Sambu dan kawasan di sekitar pasar lainnya yang termasuk besar di Kodya Medan. Pamflet ini umumnya berupa anjuran yang berisi "Dilarang berjualan di sepanjang jalan ini" dan kalimat lain yang hampir sama maksudnya agar pedagang kaki lima mengindahkan anjuran tersebut.

Di terminal Sambu juga dibuat lintasan atau jalur-jalur tempat parkir oplet untuk menaikkan penumpang sesuai dengan jurusan dan tujuan, sebagai upaya untuk lebih menertibkan kendaraan yang keluar dan masuk terminal, sehingga kesemrawutan yang merupakan pemandangan umum setiap harinya dapat berubah menjadi tertib. Keamanan dan kelancaran yang dicapai pada akhirnya akan menciptakan suasana yang tertib baik pada pagi atau pun sore hari di mana arus penumpang yang menggunakan jasa kendaraan umum cukup banyak.

## **5.2. Pembinaan Oleh Tokoh Masyarakat.**

### **5.2.1. Upaya-upaya Yang Dilakukan Tokoh Masyarakat**

Untuk membina disiplin di lingkungan pemukiman, peranan tokoh-tokoh masyarakat mempunyai arti dan kedudukan yang cukup menentukan. Hal ini tercermin dalam aktivitas dan perilaku dari orang-orang yang menjadi panutan masyarakat sehingga secara spontan timbul

usaha untuk menyesuaikan diri sesuai dengan aturan dan pranata yang berlaku dalam masyarakat.

Sesuai dengan lokasi dan tujuan penelitian, sasaran yang dilakukan tokoh masyarakat dalam pembinaan disiplin meliputi penyuluhan dan pengarahan kepada anggota masyarakat agar menjaga kebersihan, membuang sampah pada tempatnya dan aktivitas lain yang berupaya menggugah kesadaran anggota masyarakat, sesuai dengan situasi dan kondisi di masing-masing kelurahan.

Dalam prakteknya upaya-upaya yang dilakukan tokoh masyarakat diwujudkan dalam kegiatan gotong-royong atau kerja bakti setiap hari minggu, dengan bersama-sama membersihkan pekarangan dan parit di sekitar lingkungan atau kelurahan masing-masing.

Upaya-upaya yang dilakukan tokoh masyarakat umumnya melalui pendekatan yang persuasif-edukatif dan sifatnya informal, namun pendekatan seperti ini dirasakan lebih fleksibel dan tidak kaku, terutama dengan mengandalkan kesadaran dan berpartisipasi warga sehingga timbul suatu *Sense of belonging* dari setiap warga akan kebersihan di tempat tinggalnya.

### **5.2.2. Waktu Pelaksanaan Pembinaan**

Pembinaan disiplin yang dilakukan tokoh-tokoh masyarakat dengan dibantu organisasi Kemasyarakatan Pemuda sebagai ujung tombak pelaksanaan gotong-royong di kelurahan/lingkungan tempat tinggal, secara informal biasanya dilakukan sewaktu melaksanakan kegiatan-kegiatan sosial dan keagamaan ataupun pada rapat LKMD di kelurahan tersebut. Sebagai contoh, sewaktu pengajian dan wirid-wirid yasin diumumkan agar hidup bersih dan menjaga kebersihan, melalui rapat-rapat LKMD dianjurkan agar masing-masing warga mematuhi aturan dan menjaga kebersihan di lingkungannya masing-masing agar terhindar dari wabah penyakit, dan terciptanya keserasian dan kenyamanan di kelurahan dengan sapta pesona dan slogan-slogan yang sering di lontarkan baik di media massa maupun radio/tv.

## **BAB VI**

### **KESIMPULAN DAN SARAN**

#### **61. Kesimpulan**

Dari uraian tentang Pembinaan Disiplin di Lingkungan Masyarakat Kotamadya Medan dapat disimpulkan :

1. Masyarakat Kodya Medan terdiri dari berbagai etnis dan masing-masing etnis memiliki karakteristik tersendiri, yang membedakannya dari suku bangsa lainnya.
2. Dalam berinteraksi antara masing-masing etnis yang berbeda budayanya memperlihatkan suatu keadaan yang cukup baik, meskipun rasa primordialisme, baik kelompok marga maupun sub etnis kadang-kadang munculkan tetapi tidak sampai menjurus kepada pertentangan atau konflik.
3. Disiplin masyarakat di Kelurahan Tegalsari III, sebagai lokasi tempat pemukiman dalam penelitian ini mencerminkan ciri masyarakat kota yang kompleks, dengan tingkat disiplin yang tergolong masih rendah.
4. Dalam hal kebersihan lingkungan, warga masyarakat belum sepenuhnya membuang sampah pada tempat yang ditentukan karena

masih ada yang membuangnya di sekitar pekarangan sehingga sampah bertumpuk dan mengeluarkan bau busuk yang dapat mengganggu kesehatan.

5. Kondisi tata ruang di Kelurahan Tegalsari III, juga kurang baik dan sempit mengakibatkan pemukiman penduduk terkesan padat dan kurang teratur, ditambah lagi saluran pembuangan air limbah atau parit yang kecil mengakibatkan air seringnya tergenang pada musim hujan.
6. Dalam hubungan sosial dan ketetanggaan di kelurahan ini tergolong baik dan cukup kuat, terutama dalam hal kematian dan acara-acara lainnya. Warga masyarakat secara spontan akan membantu dan memberi pertolongan kepada warga yang ditimpa musibah atau pada acara pesta perkawinan.
7. Budaya melapor jika ada tamu yang masuk di Kelurahan Tegalsari III lebih dari 2 x 24 jam belum sepenuhnya dilaksanakan, disamping itu melaporkan anak yang lahir belum membudaya bagi warga masyarakat, sehingga angka mobilitas penduduk secara akurat kurang diperoleh datanya.
8. Di tempat-tempat umum seperti di pasar, terminal, bioskop dan di jalan raya tingkat disiplin masyarakat sesuai keadaan lokasinya.
9. Disiplin warga masyarakat di pasar/pertokoan dalam membuang sampah belum memanfaatkan sarana yang ada berupa tong sampah, container sehingga banyak sampah berserakan di lantai. Selain itu pemanfaatan ruang/tempat berjualan kadang-kadang tumpang tindih terutama dilakukan pedagang kaki lima yang dapat mengganggu pedagang yang berjualan di lantai atas karena kurang didatangi pembeli.
10. Penggunaan lin terminal belum sepenuhnya dimanfaatkan pengemudi yang mengakibatkan terjadinya kesemrawutan dalam menaikan dan menurunkan penumpang. Penumpang sendiri lebih senang menunggu di pinggir jalan pada ujung terminal dari pada menunggu di lin yang telah ditetapkan karena lebih cepat memperoleh bus.

11. Di tempat hiburan, seperti bioskop, penonton kurang sabar antri dalam memperoleh karcis dan lebih senang menyerobot dan berdesak-desakan. Pembatasan usia penonton juga masih belum ditaati serta pemutaran film-film yang berbau porno masih banyak diputar di beberapa gedung bioskop.
12. Disiplin berlalu lintas di jalan raya oleh para pengemudi belum mencerminkan dan memperlihatkan sopan santun. Masih ada pengemudi yang menerobos lampu kuning yang seharusnya sudah harus berhenti. Pengemudi bus angkutan kota sering menaikkan dan menurunkan penumpang di sembarangan tempat, dan kebut-kebutan dalam mengejar penumpang yang sering mengabaikan aturan dan rambu-rambu lalu lintas di jalan raya.

## **6.2 Saran-saran**

Dalam rangka pembinaan disiplin masyarakat kota diperlukan adanya kebersamaan dan koordinasi yang baik antara berbagai pihak, seperti warga masyarakat, pemerintah dan lembaga masyarakat. Hal ini disebabkan kompleksnya permasalahan yang terdapat di perkotaan. Di satu sisi kesadaran dan partisipasi warga masyarakat untuk berperan aktif dalam pembudayaan disiplin sangat penting dan menentukan sekali. Di pihak lain dibutuhkan langkah-langkah dan terobosan yang dapat mendorong warga masyarakat untuk mendisiplinkan diri melalui pembinaan yang dilakukan pemerintah sehingga tercipta suatu saling pengertian dan kesamaan pandangan dan langkah.

Karenanya pada akhir tulisan ini dicoba untuk memberi saran-saran yang mungkin dapat berguna bagi Policy Maker dalam menentukan dan menjalankan kebijaksanaan, yang meliputi :

1. Diperlukan suatu upaya konkrit untuk memasyarakatkan kedisiplinan bagi setiap warga untuk mencapai ketertiban dan keserasian di daerah ini
2. Langkah-langkah tersebut sangat bermanfaat untuk membudayakan

hidup sehat, bersih dari sampah dan keindahan di lingkungan tempat tinggal di Kodya Medan umumnya.

3. Pembinaan yang dilakukan pemerintah dan tokoh masyarakat hendaknya dengan cara yang baik yaitu secara persuasif sehingga dapat menumbuhkan kesadaran warga sesuai dengan sasaran yang diharapkan.
4. Diharapkan dengan tumbuhnya kedisiplinan yang tinggi dari warga masyarakat akan dapat mendorong iklim dan suasana yang lebih serasi, melalui pendekatan yang positif, baik di lingkungan pemukiman maupun di tempat-tempat umum.
5. Hendaknya pihak pemerintah sebagai aparat di daerah ini lebih memperhatikan berbagai sarana dan fasilitas untuk mendorong tumbuhnya dan terciptanya kedisiplinan tersebut seperti sarana kebersihan, fasilitas pasar, rambu-rambu lalu lintas dan fasilitas lain sesuai dengan maksud dan sasaran yang akan dicapai.
6. Pembinaan disiplin melalui penyuluhan-penyuluhan hendaknya lebih diintegrasikan lagi baik secara langsung melalui tatap muka maupun dengan menggunakan media massa agar warga masyarakat secara perorangan maupun kelompok berusaha mengubah perilaku yang mungkin belum disiplin.

## DAFTAR PUSTAKA

- Bintarto, R. *Interaksi Desa-Kota dan Permasalahan*. Jakarta : Ghalia 1983
- Blalock, Hubert M. *Pengantar Penelitian Sosial*. Jakarta : Rajawali Press. 1987
- Budhisantoso, S. *Organisasi Sosial*. makalah. 1990 dan Fasilitas Tempat Tinggal dan Distribusi Pendapatan di Ibukota Propinsi. 1989.
- Daldjoeni. *Pusparagam Aspirasi Manusia*. Bandung : Alumni. 1977.
- Depdikbud. *Perkampungan di Kota Sebagai Wujud Adaptasi Sosial (Kehidupan di Perkampungan Miskin di Kodya Medan)*. IDKD Sumatera Utara. 1982.
- Dieters Ever, Hans. *Sosiologi Perkotaan, Urbanisasi dan Sengketa Tanah di Indonesia dan Malaysia*. Jakarta. LP3ES. 1982.
- Harian Analisa. Tanggal 3 Nopember, hal. 3. 1992
- Harian Mimbar Umum. Tanggal 7 Februari. Hal 3. 1993.
- Harian Sinar Indonesia Baru. Tanggal 3 Nopember, Hal. 2.1992.
- Harian Sinar Indonesia Baru. Tanggal 11 Nopember, Hal. 2. 1992.
- Harian Waspada. Tanggal 16 Januari, Hal. 3. 1993.
- Havilanda, W.A. *Antropologi I dan II*. Edisi Indonesia. Jakarta : Erlangga. 1985.
- Kantor Statistik Kodya Medan. *Kotamadya Medan Dalam Angka Tahun 1990*. 1990.
- Keesing, Roger M. *Antropologi Budaya, Suatu Perspektif Kontemporer Edisi Indonesia*. Jakarta : Erlangga. 1989.
- Koentjaraningrat. *Kebudayaan Mentalitet dan Pembangunan*. Jakarta : PT Gramedia. 1980.
- \_\_\_\_\_, *Metode-metode Penelitian Masyarakat*. Jakarta : PT Gramedia. 1981.
- \_\_\_\_\_, *Pengantar Ilmu Antropologi*. Jakarta : Aksara Baru. 1985.
- Mar'at. *Sikap Manusia Perubahan Serta Pengukurannya*. Jakarta : Ghalia Indonesia. 1984.

- Pelly, Usman. *Menciptakan Pra Kondisi Keserasian Dalam Masyarakat Majemuk Kasus Kotamadya Medan*. 1985.
- \_\_\_\_\_. *Konflik dan Persesuaian Antar Etnis Proyek Pola Pengembangan Kependudukan dan Lingkungan Hidup*. Jakarta : Kantor Menteri KLH RI. 1985.
- Pemda Kotamadya Medan. *Peraturan Daerah Kotamadya Tk II Medan Tahun 1990*. 1991.
- Prasadja, Suddy. *Pembangunan Desa Dan Masalah Kepemimpinannya*. Jakarta : Yayasan Ilmu-ilmu Sosial. 1980.
- Soejatmoko. *Dimensi Manusia Dalam Pembangunan, Pilihan Karang*. Jakarta : LP3ES. 1986.
- Suparlan, Parsudi (ed). *Kemiskinan di Perkotaan*. Jakarta : Sinar Harapan. 1989.
- Vredenbergt, J. *Metode dan Teknis Penelitian Masyarakat*. Jakarta : PT Gramedia. 1983.
- Zamroni. *Pengantar Pengembangan Teori Sosial*. Yogyakarta : PT. Tiara Wacana. 1992.

## DAFTAR INFORMAN

1. Nama : Drs. Syaiful Helmi Nasution  
Umur : 40 Tahun  
Pekerjaan : Lurah Tegalsari III  
Alamat : Kelurahan Tegalsari III Kecamatan  
Medan Area Medan
  
2. Nama : Pangihutan Dalimunthe  
Umur : 29 tahun  
Pekerjaan : Sekretaris Lurah  
Alamat : Kelurahan Tegalsari III Kecamatan  
Medan Area Medan
  
3. Nama : Senen Sadiman  
Umur : 50 tahun  
Pekerjaan : Wiraswasta  
Alamat : Kelurahan Tegalsari III Kecamatan  
Medan Area Medan.
  
4. Nama : Suria Koto  
Umur : 50 tahun  
Pekerjaan : Kepala Lingkungan  
Alamat : Kelurahan Tegalsari III Kecamatan  
Medan Area Medan
  
5. Nama : Syamsuddin Siregar  
Umur : 53 tahun  
Pekerjaan : Wiraswasta  
Alamat : Kelurahan Tegalsari III Kecamatan  
Medan Area Medan

6. Nama : Herma  
Umur : 28 tahun  
Pekerjaan : Kepala Lingkungan  
Alamat : Kelurahan Tegalsari III Kecamatan  
Medan Area Medan
7. Nama : Paruhum Rambe  
Umur : 50 tahun  
Pekerjaan : Dagang  
Alamat : Kelurahan Tegalsari III Kecamatan  
Medan Area Medan
8. Nama : Emil  
Umur : 30 tahun  
Pekerjaan : Pegawai Negeri  
Alamat : Kelurahan Tegalsari III Kecamatan  
Medan Area Medan
9. Nama : S. Situmeang  
Umur : 40 tahun  
Pekerjaan : Supir  
Alamat : Perumnas Mandala Medan
10. Nama : Mahyudin  
Umur : 45 tahun  
Pekerjaan : Pegawai Kelurahan Pusat Pasar  
Alamat : Kelurahan Pusat Pasar
11. Nama : Drs. Hamonangan  
Umur : 30 tahun  
Pekerjaan : Pegawai Pusat Pasar  
Alamat : Kelurahan Pusat Pasar Medan

12. Nama : S.L. Tobing  
Umur : 50 tahun  
Pekerjaan : Pegawai DLLAJR  
Alamat : Kelurahan Pusat Pasar Medan
13. Nama : M. Silaen  
Umur : 50 tahun  
Pekerjaan : Pedagang  
Alamat : Perumnas Mandala Medan
14. Nama : Khairani  
Umur : 43 tahun  
Pekerjaan : Petugas Kebersihan  
Alamat : Desa Tanjung Morawa Deliserdang

PEMBINAAN DISIPLIN DI LINGKUNGAN MASYARAKA. KO

Perpustakaan  
Jenderal Ke

711.  
ZU  
p